



Kode Satker : 690781

BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2025**



PENGARAH:

dr. DARMAWALI HANDOKO, M. Epid

TIM PENYUSUN:

FARIDA KUSUMANINGRUM, SKM, MKM

OKTAVIANI CIPTA DWI PUTRI, S.E

SUKMAWATI, S.E

KONTRIBUTOR:

KAMBANG SARIADJI, S.Si., M.Biomed

SUBANGKIT, M.Biomed

BUDIYANTO, ST, M.Tr.A.P

ANTONIUS PAMILANGAN, SE., MAP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Semester I Tahun 2025 dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Laporan ini menggambarkan secara komprehensif tentang capaian kinerja BBLBK sepanjang semester I tahun 2025 berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), termasuk realisasi atas penggunaan APBN, serta upaya peningkatan mutu pelayanan, pelaksanaan kegiatan surveilans laboratorium, hingga koordinasi dengan jejaring laboratorium kesehatan nasional dan internasional. Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi internal, tetapi juga dapat memberikan gambaran transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBLBK. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 01 Juli 2025

Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi
Kesehatan



dr. Darmawali Handoko, M.Epid.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) selaku pengemban amanah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) berdasarkan capaian kinerja selama satu semester berdasarkan target indikator yang menjadi tanggung jawab BBLBK di tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan kegiatan di tahun mendatang.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan (IKK), antara lain:

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan, dengan IKK sebagai berikut:
 - a. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan;
 - b. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel;
 - c. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas;
 - d. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME);
 - e. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/atau internasional; dan
 - f. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori.
2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan IKK sebagai berikut:
 - a. Persentase Realisasi Anggaran;
 - b. Nilai Kinerja Anggaran; dan
 - c. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja semester I tahun 2025, capaian indikator kinerja kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat antara lain: Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi (41,70%) dari target 12 rekomendasi; Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel sebanyak 10.189 (101,89%) dari target sebanyak 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel; Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas tercapai 100%; Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sebanyak 21 kali (1050%) dari target 2 kali; Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring,

lembaga/institusi nasional dan/atau internasional sebanyak 6 MoU/PKS/Laporan (120%) dari target 5 MoU/PKS/Laporan; dan Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository tercapai 100%.

Sedangkan, capaian indikator kinerja dukungan manajemen pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat antara lain: Persentase Realisasi Anggaran tercapai sebesar 50,37% (52,47%) dari target 96%; Nilai Kinerja Anggaran tercapai sebesar 83,43 NKA (61,41%) dari target sebesar 80,1 NKA; dan Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi tercapai 98% (122,50%) dari target 80%.

Pada semester I tahun anggaran 2025, Total pagu awal Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp45.510.062.000 (empat puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan efisiensi belanja barang Rp30.910.107.000 dan belanja modal Rp300.223.000, jadi total efisiensi pada semester I tahun 2025 adalah Rp31.210.330.000, sehingga pagu efektif menjadi sebesar Rp14.299.732.000. Realisasi anggaran semester I pertanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp7.203.300.778 atau sebesar 50,37% dari total pagu efektif Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1. Analisis Situasi	12
1.2. Maksud dan Tujuan	13
1.3. Kelembagaan	13
1.3.1. Dasar Hukum	13
1.3.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	14
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	38
1.5. Isu Strategis Organisasi	42
1.6. Sistematika Laporan	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	44
2.1. Perencanaan Kinerja	44
2.2. Perjanjian Kinerja	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	53
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).....	54
3.1.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	129
3.2. Realisasi Anggaran	170
3.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	173
3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya	175
3.5. Penghargaan/ Apresiasi	179
3.6. Inovasi/ Terobosan	180
BAB IV PENUTUP	187
4.1. Kesimpulan.....	187
4.2. Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut.....	188
LAMPIRAN	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Pembagian wilayah binaan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	36
Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	38
Tabel 1. 3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	39
Tabel 1. 4. Daftar Pegawai Tugas Belajar Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025	39
Tabel 1. 5. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	40
Tabel 1. 6. Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025	41
Tabel 1. 7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	41
Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	45
Tabel 2. 2. Analisis SMART IKK Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	46
Tabel 2. 3. Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	50
Tabel 2. 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025	51
Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2024 dan 2025	54
Tabel 3. 2. Sandingan Capaian Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Semester I Tahun Anggaran 2025	56
Tabel 3. 3. Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	59
Tabel 3. 4. Capaian IKK Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	68
Tabel 3. 5. Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	77

Tabel 3. 6. Daftar Jenis dan Hasil Pemantapan Mutu Eksternal yang Diikuti Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan pada Semester I Tahun 2025	98
Tabel 3. 7. Daftar MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/Institusi nasional dan/ atau internasional yang Dilakukan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	113
Tabel 3. 8. Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	165
Tabel 3. 9. Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan IKK Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	166
Tabel 3. 10. Laporan Posisi Barang Milik Negara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Pertanggal 30 Juni 2025	168
Tabel 3. 11. Efisiensi Rincian Output (RO) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2025	170
Tabel 3. 12. Standar Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten Berdasarkan KMK RI. No. HK.01.07/Menkes/1801/2024	172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2023	21
Gambar 1. 2.	Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/2657/2024.....	21
Gambar 1. 3.	Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/4977/2025	22
Gambar 1. 4.	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025	38
Gambar 2. 1.	Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024	49
Gambar 3. 1.	Bimbingan Teknis untuk Wabah ISPA dan HMPV.....	80
Gambar 3. 2.	Kegiatan OJT K3 dan Pengelolaan Limbah dan Biorepositori.....	81
Gambar 3. 3.	Bimbingan Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 1, 2, dan 3.....	82
Gambar 3. 4.	Bimbingan Teknis Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 untuk Penyakit Potensi Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV).....	83
Gambar 3. 5.	Bimbingan Teknis Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 untuk Penyakit Potensi Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV).....	84
Gambar 3. 6.	Pelaksanaan Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal Pemeriksaan PCR Influenza Terintegrasi COVID-19 Tahun 2025	85
Gambar 3. 7.	Bimbingan Teknis Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 Batch 1	85
Gambar 3. 8.	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Campak dan Pertusis Berbasis Laboratorium	86
Gambar 3. 9.	Melaksanakan Supervisi dalam Rangka Monev dan Valdat Malaria Plasmodium knowlesi dan Penjaminan Mutu Pemeriksaan Laboratorium PK.....	87
Gambar 3. 10.	Bimbingan Teknis Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 6 dan 7	87
Gambar 3. 11.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Labkesmas dalam Pemeriksaan Malaria dan Pengendalian Vektor di Wilayah Regional 7	88
Gambar 3. 12.	Bimbingan Teknis Pelatihan Penyegaran Tenaga Mikroskopis.....	89

Gambar 3. 13. Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria bagi Tenaga Uji Silang Kabupaten/Kota Jayapura	89
Gambar 3. 14. Pertemuan Penyusunan Dokumen Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tahun 2025	127
Gambar 3. 15. Rapat Koordinasi Nasional Sistem Laboratorium Surveilans Sentinel ILI-SARI Terintegrasi COVID-19 Tahun 2025	128
Gambar 3. 16. Pelatihan Tenaga Laboratorium Rumah Sakit dalam Rangka AMR Prevalance Survey Tahun 2025.....	128
Gambar 3. 17. Bimbingan Teknis Penyiapan Dokumen Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tahun 2025	129
Gambar 3. 18. Audiensi Kegiatan WHO terkait WGS Polio.....	129
Gambar 3. 19. Penyusunan RPK dan RPD	130
Gambar 3. 20. Basic Training in Medical Mycology	130
Gambar 3. 21. Sosialisasi Visi dan Misi, INM dan IKP, Cuci Tangan, Tamplate SOP dan LHU	131
Gambar 3. 22. Kunjungan Japan International Cooperation System (JICS) dan ACPHEED DRA.....	131
Gambar 3. 23. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Surveilans Sentinel Penyakit Infeksi Emerging.....	132
Gambar 3. 24. Pelatihan Pemahaman SNI ISO 15189:2022	132
Gambar 3. 25. Joint Capacity Building Workshop on Malaria and Lymphatic Filariasis Elimination and Cross-border Collaboration	133
Gambar 3. 26. One Health Leadership Training.....	134
Gambar 3. 27. Site Visit AMR Prevalence Survey.....	134
Gambar 3. 28. Kunjungan Assessment Biorepositori untuk program kerjasama TGF Stellar.....	135
Gambar 3. 29. Site Visit Country Team Global Fund	135
Gambar 3. 30. Koordinasi Pemeriksaan netralisasi antibodi spesimen uji klinis Booster Covid-19 (BCOV) 2021 dan 2022.....	136
Gambar 3. 31. Site Visit Pelatihan Rumah Sakit dalam rangka AMR Prevelance Survey	137
Gambar 3. 32. Audiensi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan ke Inspektorat Jenderal II Terkait PNBP	137
Gambar 3. 33. Pelatihan Penguatan Lab Sequencing Platform Illumina Program BGSi HUB TB	138
Gambar 3. 34. ToT Pemantapan Mutu Eksternal Mikroskopis TBC	139
Gambar 3. 35. Pandemi Preparedness Workshop New Delhi.....	139
Gambar 3. 36. Kunjungan Lapangan Persiapan Pengembangan Labkesmas	140
Gambar 3. 37. Finalisasi Protokol Surveilans Terpadu Avian Influenza.....	140
Gambar 3. 38. Pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan	141
Gambar 3. 39. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemeriksaan PCR	141

Gambar 3. 40. Persiapan Penyusunan Kurikulum dan Modul MOOC Penatalaksanaan Spesimen ILI SARI.....	142
Gambar 3. 41. Pertemuan Finalisasi Draft Pedoman Surveilans Resisten Antimikroba (AMR)	143
Gambar 3. 42. Pelatihan Kalibrasi Peralatan Laboratorium	143
Gambar 3. 43. Penyusunan Kurikulum MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius	144
Gambar 3. 44. Harnessing Genomics for infectious disease surveillance and public health	144
Gambar 3. 45. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemeriksaan PCR	145
Gambar 3. 46. Regional Workshop on Bacteriology EQA Program Development	146
Gambar 3. 47. Kunjungan Lapangan UNDP ke BBLBK Koordinasi terkait Aplikasi SMILE	146
Gambar 3. 48. Pertemuan Lanjutan Analisis Gap ISO/EIC 17043.....	147
Gambar 3. 49. Sosialisasi Spesimen Penyakit KLB bagi Petugas Lab Sudinkes Kota Jakarta Selatan.....	147
Gambar 3. 50. Survei Lapangan Terkait Penatausahaan Aset di Lab Gizi Bogor	148
Gambar 3. 51. Update Pemeriksaan Netralisasi Antibodi Spesimen Uji Klinis Booster Covid-19 (BCOV) 2021 dan 2022 dan On The Job Training (OJT) di BBLBK.....	149
Gambar 3. 52. Rekonsiliasi Data Kepesertaan PPNPN Serta Iuran Semester I Tahun 2025	149
Gambar 3. 53. On Job Training Surveilans Avian Influenza (Flu Burung) Terpadu Lintas Sektor	150
Gambar 3. 54. Bimbingan Mentoring Persiapan Akreditasi 15189:2022.....	151
Gambar 3. 55. Pertemuan Penyusunan Dokumen SNI/ISO 17043:2023	151
Gambar 3. 56. RPHL Global Leadership Laboratory Program (GLLP) Training of Trainers and Training of Mentors	152
Gambar 3. 57. On The Job Training Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah.....	152
Gambar 3. 58. Orientasi Program Rightsizing untuk Surveilans Sentinel ILI-SARI	153
Gambar 3. 59. National Center for Global Health and Medicine (NCGM) Kementerian Kesehatan Jepang ke BBLabBioKes	153
Gambar 3. 60. On Job Training Surveilans Avian Influenza (Flu Burung) Terpadu Lintas Sektor	154
Gambar 3. 61. On the Job Training (OJT) ISO/IEC 17043	154
Gambar 3. 62. Penyusunan Modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius.....	155

Gambar 3. 63. Workshop Peningkatan Wawasan Petugas Surveilans RS dan Puskesmas di Jakarta Timur.....	155
Gambar 3. 64. Penerimaan CPNS Baru Tahun 2025 di BBLBK	156
Gambar 3. 65. Pembahasan Dokumen Mutu Akreditasi SNI ISO 15189.....	157
Gambar 3. 66. Refreshing Mikroskopis Malaria Bagi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM) di Puskesmas dan RS Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta	157
Gambar 3. 67. On The Job Training (OJT) Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah	158
Gambar 3. 68. Pertemuan Caoching Intensif Finalisasi Dokumen ISO/IEC 17043:2023.....	158
Gambar 3. 69. Implementasi Surveilans Terpadu Avian Influenza Sebagai Tindak Lanjut dari Workshop dan On The Job Training	159
Gambar 3. 70. Pelatihan Audit Internal SNI ISO 15189:2022 Berbasis SNI ISO 19011:2018.....	159
Gambar 3. 71. On The Job Training (OJT) ISO/IEC 17043.....	160
Gambar 3. 72. Finalisasi Modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius.....	161
Gambar 3. 73. Kegiatan Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging.....	161
Gambar 3. 74. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium Tuberkulosis.....	162
Gambar 3. 75. On The Job Training (OJT) Pemeriksaan Congenital Rubella Syndrom (CRS).....	162
Gambar 3. 76. Meningkatkan Peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat Menuju Indonesia Emas	163
Gambar 3. 77. Penyusunan Tools Assessment Kapasitas Surveilans Sentinel ILI di Pintu Masuk Negara.....	164
Gambar 3. 78. On The Job Training Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah di Pintu Masuk dan Wilayah.....	164
Gambar 3. 79. Sertifikat Penghargaan atas peran serta dan turut aktif sebagai narasumber berbasis laboratorium di labkesmas regional 1	174
Gambar 3. 80. Aplikasi Laboratory Information Management System (LIMS) .	174
Gambar 3. 81. Buku Pedoman Keamanan Hayati di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	176
Gambar 3. 82. Perjanjian Kerja Sama antara BBLBK dengan PT. Wahana Pamunah Limbah	177
Gambar 3. 83. Buku Pedoman Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius ...	178
Gambar 3. 84. Buku Panduan Instruksi Kerja Pemeriksaan Laboratorium Virus Influenza.....	179

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Salah satu langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai harapan masyarakat adalah dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, akurat, dan terukur. Hal ini bertujuan agar proses pemerintahan dapat berjalan secara bertanggung jawab, efektif, efisien, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini harus disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penilaian akuntabilitas, hingga akhirnya dilaporkan kepada Presiden RI sebagai kepala pemerintahan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintahan (LAKIP) adalah wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah terkait penggunaan anggaran. Pengukuran, evaluasi kinerja, serta pengungkapan hasil analisis pengukuran kinerja secara memadai menjadi elemen penting dalam penyusunan laporan kinerja. Tujuan utama dari laporan ini adalah menyediakan informasi terukur mengenai pencapaian kinerja kepada pihak pemberi mandat. Selain itu, LAKIP juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pembentukan UPT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Kehadiran BBLBK merupakan bagian dari upaya penguatan transformasi layanan kesehatan primer serta sistem ketahanan kesehatan.

Transformasi BBLBK melalui perjalanan yang signifikan, dimulai dari status sebelumnya sebagai Laboratorium Rujukan Nasional Prof. Dr. Sri Oemijati yang awalnya berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes). Kemudian, laboratorium ini dialihkan ke Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebelum akhirnya bernaung di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat hingga saat ini.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) selaku pengemban amanah wajib menyusun laporan kinerja berdasarkan capaian kinerja selama satu tahun berdasarkan target indikator yang menjadi tanggung jawab BBLBK di tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Sebagai laporan capaian kinerja BBLBK atas Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan pada tahun 2025;
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran BBLBK tahun anggaran 2025 yang transparan dan akuntabel;
- 3) Sebagai bahan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh DIPA BBLBK tahun anggaran 2025;
- 4) Sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun mendatang; dan
- 5) Sebagai dasar dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja BBLBK di masa yang akan datang.

1.3. Kelembagaan

1.3.1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan/pedoman dalam penyusunan LAKIP Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan semester I tahun 2025 ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 10) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
- 13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 15) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
- 16) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 17) Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/4977/2025 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025; dan
- 18) Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/2663/2024 tentang Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Tata Nilai, dan Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024.

1.3.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjelaskan bahwa Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan berkualitas yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespons berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, dan serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan alat kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan. Transformasi sosial menciptakan manusia Indonesia unggul dengan sistem kesehatan yang tangguh dan responsive, setiap penduduk berusia Panjang dan hidup sehat, stunting di bawah 5% tuberculosis dan kusta tereliminasi, usia harapan hidup (UHH) menjadi 80 tahun. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan sesuai dengan RPJPN 2025-2045, Presiden RI menetapkan visi sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2025–2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Kementerian Kesehatan melaksanakan visi Presiden tersebut di bidang kesehatan yaitu dengan “Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah 8 (delapan) misi Presiden RI tahun 2025–2029, antara lain:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan, keamanan, dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden tersebut guna mendukung peningkatan kualitas manusia khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
- 2) Membudayakan gaya hidup sehat;
- 3) Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau;
- 4) Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
- 5) Memperkuat tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil, dan berkelanjutan
- 6) Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
- 7) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisiensi.

Tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama periode 2025-2029, antara lain:

- 1) Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
- 2) Masyarakat berperilaku hidup sehat;
- 3) Layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau;
- 4) Sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
- 5) Tata kelola dan pendanaan kesehatan yang efektif;
- 6) Teknologi kesehatan yang maju; dan
- 7) Kementerian kesehatan yang mampu menjadi *learning organization*.

Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Laboratorium Biologi Kesehatan. Selain itu, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan;
- c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan di bidang biologi kesehatan;

- e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang biologi kesehatan;
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium biologi kesehatan;
- h. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium biologi kesehatan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
- k. Pelaksanaan respon terhadap risiko bioterorisme di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- n. Pengelolaan data dan informasi;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. Pelaksanaan urusan administrasi.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga dapat menyelenggarakan fungsi tambahan, sebagai berikut:

- a. Rujukan nasional pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan; dan
- b. Uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/2663/2024 tentang Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Tata Nilai, dan Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) mempunyai visi: "Menjadi laboratorium dengan hasil pemeriksaan berstandar internasional". Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut, antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan secara profesional dengan standart pelayanan prima serta peningkatan mutu secara terus menerus;
- 2) Melakukan analisis kesehatan masyarakat melalui surveilans berbasis laboratorium;
- 3) Melakukan koordinasi jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional; dan
- 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.

Strategi dalam mewujudkan misi tersebut, antara lain:

- 1) Pemeriksaan profesional dengan pelayanan prima dan peningkatan mutu berkelanjutan, diantaranya:

- a. Penguatan Sistem Manajemen Mutu: Mengimplementasikan standar mutu internasional seperti ISO 15189 atau ISO 17025 untuk semua proses pemeriksaan;
 - b. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan rutin bagi tenaga laboratorium untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
 - c. Pengembangan Teknologi: Mengadopsi teknologi terbaru dalam pemeriksaan laboratorium untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi; dan
 - d. Evaluasi Berkala: Melakukan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan peningkatan mutu berkelanjutan.
- 2) Analisis kesehatan masyarakat melalui surveilans berbasis laboratorium
- a. Pembangunan Data Sistem Surveilans: Mengembangkan platform surveilans berbasis laboratorium yang terintegrasi dengan data kesehatan masyarakat;
 - b. Kolaborasi Antar-Lembaga: Berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah dan institusi terkait untuk mengumpulkan data epidemiologis yang relevan;
 - c. Pemantauan Penyakit Prioritas: Fokus pada penyakit menular dan tidak menular yang menjadi beban utama kesehatan masyarakat; dan
 - d. Peningkatan Kapasitas Deteksi: Mengembangkan kemampuan laboratorium untuk mendeteksi patogen baru atau ancaman kesehatan yang muncul.
- 3) Koordinasi jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan kerja sama nasional/internasional.
- a. Penguatan Jejaring Laboratorium: Membangun sistem jejaring yang mencakup laboratorium nasional, regional, hingga tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan responsivitas;
 - b. Kerja Sama Global: Menjalin kemitraan dengan organisasi internasional seperti WHO, ASEAN, dan laboratorium referensi lainnya;
 - c. Standarisasi Protokol: Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh jejaring laboratorium kesehatan masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan Pelatihan Bersama: Mengadakan pelatihan lintas lembaga untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik.
- 4) Penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan
- a. Analisis Data Berbasis Bukti: Menggunakan hasil laboratorium untuk mendukung formulasi kebijakan yang berbasis bukti;
 - b. Kajian Kebijakan Kesehatan: Melakukan studi untuk mengidentifikasi kebijakan kesehatan yang relevan dan inovatif;
 - c. Partisipasi dalam Forum Kebijakan: Berkontribusi aktif dalam pertemuan atau forum kesehatan untuk menyampaikan rekomendasi berbasis data laboratorium; dan
 - d. Peningkatan Akses Informasi: Menyediakan laporan berkala kepada pemangku kepentingan untuk membantu pengambilan keputusan.

- 5) Penilaian, respon cepat, dan kewaspadaan dini dalam penanggulangan KLB/Wabah atau bencana
- Penguatan Kapasitas Respon Cepat: Melatih tim tanggap darurat laboratorium untuk merespons kejadian luar biasa atau bencana secara efisien;
 - Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan sistem peringatan dini berbasis laboratorium untuk mendeteksi potensi wabah; dan
 - Kolaborasi Multi-Sektor: Berkoordinasi dengan sektor lain seperti BNPB, rumah sakit, dan lembaga kesehatan lainnya untuk respons terintegrasi.

Tata nilai yang dianut oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dikenal dengan akronim “SOLID” yang memiliki arti, sebagai berikut:

- S: Solutif = Laboratorium yang memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan pemeriksaan laboratorium di Indonesia
- O: Objektif = Selalu mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan hasil yang sesungguhnya
- L: Loyalitas = Selalu setia dan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
- I: Internasional = Berusaha menjadi laboratorium dengan hasil pemeriksaan berstandar internasional
- D: Taat dan patuh terhadap peraturan dan bertanggung jawab akan tugas dan tanggung jawab

Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan adalah:
“The Result You Can Trust”

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dipimpin oleh Kepala. Susunan organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan terdiri atas:

- Subbagian Administrasi Umum; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Kepala dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Pembentukan, pengubahan, dan/atau penghapusan instalasi sebagaimana dimaksud mengacu pada pedoman instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Instalasi dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi. Kepala instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/4977/2025 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025. Surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) Tim Kerja dan 9 (sembilan) instalasi di lingkungan BBLBK.

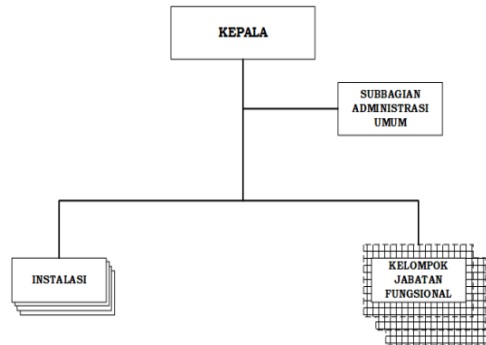
Tim kerja di lingkungan BBLBK, antara lain:

- 1) Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM, dan Kemitraan;
- 2) Tim Kerja Program Layanan; dan
- 3) Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa.

Sedangkan Instalasi di lingkungan BBLBK, antara lain:

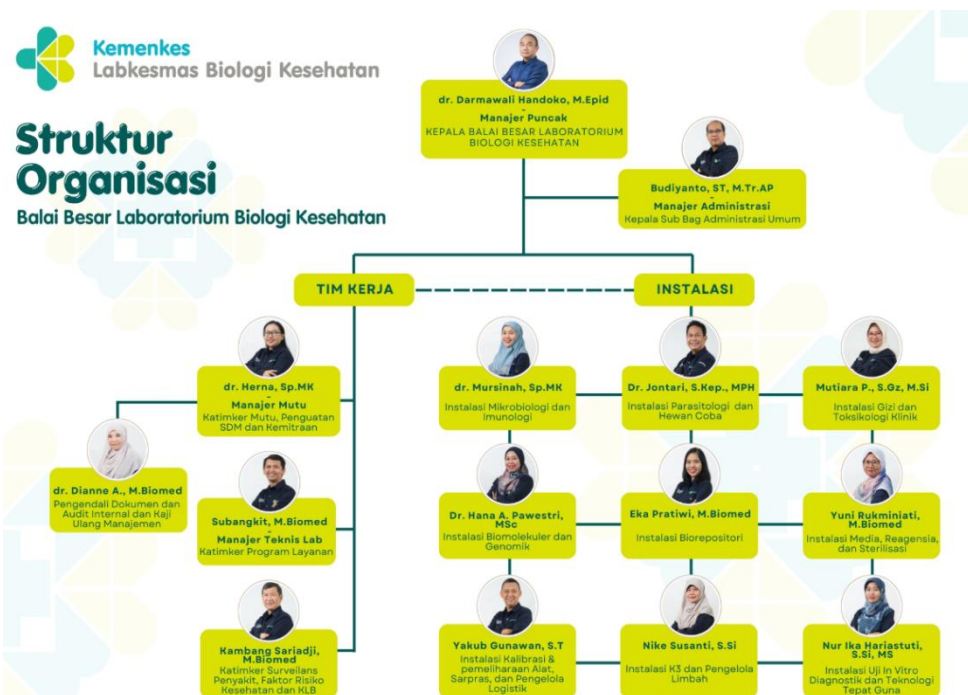
- 1) Instalasi Mikrobiologi dan Imunologi;
- 2) Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba;
- 3) Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik;
- 4) Instalasi Biomolekuler dan Genomik;
- 5) Instalasi Biorepositori;
- 6) Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi;
- 7) Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik;
- 8) Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah; dan
- 9) Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna

Struktur organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan terlihat pada Gambar 1.1.



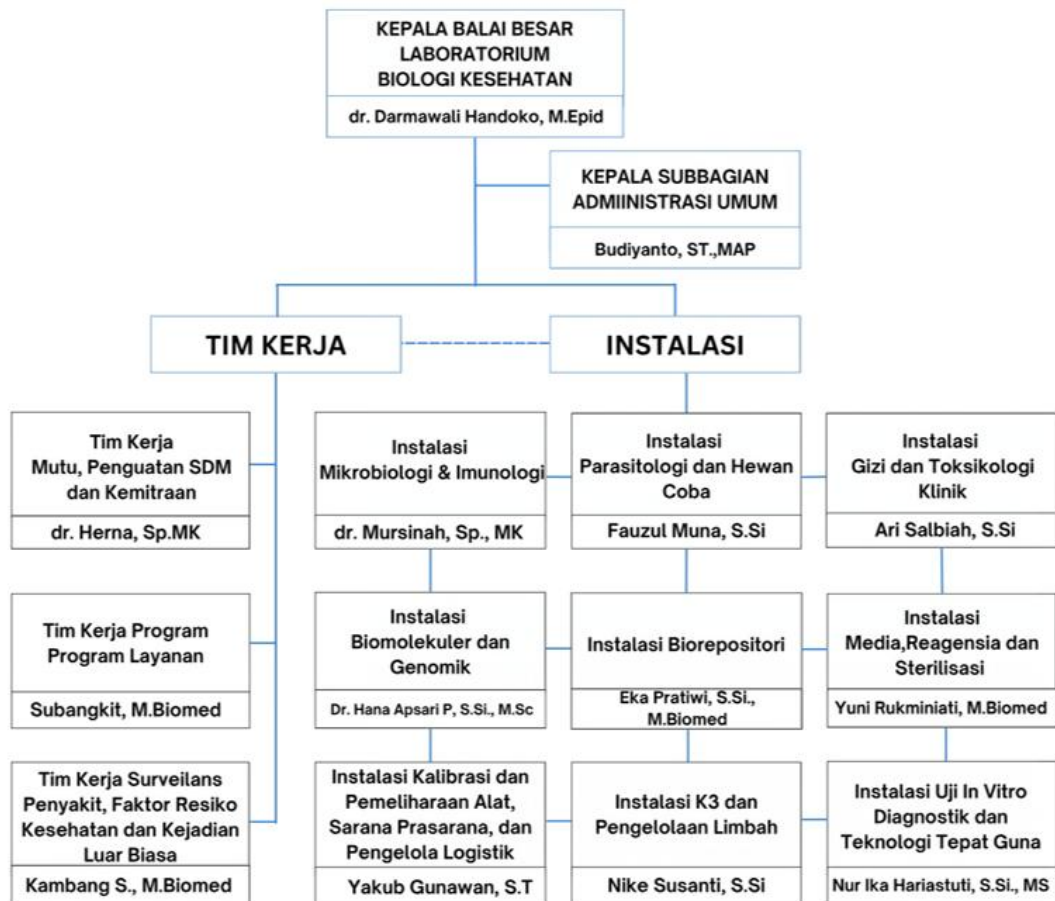
Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2023

Kemudian Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan membuat Surat Keputusan Kepala BBLBK Nomor HK.02.03/B.IX.2/4977/2025 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang menjelaskan tentang Ketua Tim Kerja dan Kepala Instalasi beserta tugas dari masing-masing pelaksana kegiatan dalam susunan organisasi laboratorium tahun 2025, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1. 2. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/2657/2024

Pada bulan Juni 2025, Kepala Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik pindah bekerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga diperlukan penggantinya yang disahkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/4977/2025, seperti yang terlihat pada Gambar 1.3.



**Gambar 1. 3. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor
HK.02.03/B.IX.2/4977/2025**

Adapun uraian tugas dari masing-masing struktural maupun nonstruktural, antara lain:

- A. Manajer Puncak (Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan)
 1. Menjamin bahwa integritas sistem manajemen dipelihara dalam perencanaan dan implementasinya serta bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan laboratorium yang ada di bawah Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai persyaratan sistem manajemen mutu;
 2. Memberikan bukti komitmen tentang pengembangan dan penerapan sistem manajemen dan meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan;

3. Mengkomunikasikan kepada organisasi mengenai pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan, persyaratan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 4. Melakukan kaji ulang manajemen berdasarkan laporan audit dan saran manajemen;
 5. Memastikan kesesuaian dengan standar yang sudah ditetapkan dalam panduan mutu.
- B. Manajer Administrasi (Kepala Sub Bagian Administrasi Umum)
1. Memastikan bahwa administrasi terkait mutu dan teknis dapat dipertanggung-jawabkan;
 2. Memfasilitasi permintaan terkait administratif laboratorium untuk pemeliharaan mutu dan teknis;
 3. Menyusun rencana anggaran laboratorium dan evaluasi administratif;
 4. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium peralatan, logistik seperti reagen dan bahan habis pakai, maintenance dan kegiatan laboratorium lainnya;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi administrasi dan sarana prasarana gedung laboratorium, kegiatan pengendalian dokumen dan instalasi yang berada di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
 6. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan laboratorium serta proses pembelian barang dan jasa;
 7. Memfasilitasi sarana dan prasarana semua instalasi di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
 8. Membantu Manajer Mutu dalam pelaksanaan tugas lainnya terkait manajemen mutu laboratorium.
- C. Manajer Mutu (Ketua Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan)
1. Bertanggung jawab terhadap Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatan teknis dan manajemen laboratorium di bawah Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
 2. Membawahi penanggung jawab dan anggota pengendali dokumen dan audit internal dan kaji ulang manajemen;
 3. Merencanakan, mengkoordinir, dan mengevaluasi penyusunan serta kaji ulang dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal;
 5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja manajemen mutu laboratorium;
 6. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia di laboratorium;

7. Memantau implementasi sistem manajemen mutu;
8. Bekerja sama dengan Manajer Teknis untuk menjalankan jaminan mutu;
9. Bekerja sama dengan Manajer Teknis untuk memperoleh ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin sistem mutu di laboratorium;
10. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatan teknis dan manajemen laboratorium di bawah Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
11. Pelaksanaan program kerja manajemen mutu laboratorium;
12. Merencanakan, mengkoordinir, dan mengevaluasi penyusunan kaji ulang dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
13. Melakukan koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara Manajer Administrasi, Manajer Teknis, Manajer Surveilans dan KLB dan para kepala instalasi;
14. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Pimpinan terkait kegiatan Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan; dan
15. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala.

D. Manajer Teknis (Ketua Tim Kerja Program Layanan)

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan manajemen laboratorium sesuai persyaratan sistem manajemen mutu;
2. Mengkoordinasikan dan sinergitas pelaksanaan penerapan manajemen laboratorium sesuai dengan sistem mutu;
3. Mengkoordinasikan serta sinergitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang ada untuk menjamin sistem mutu laboratorium dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas instalasi di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.
5. Melakukan koordinasi dengan kepala instalasi untuk memastikan hasil uji sesuai dengan standar pelayanan;
6. Melakukan verifikasi hasil uji laboratorium;
7. Melakukan evaluasi program dan pelayanan laboratorium;
8. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara Manajer Administrasi, Manajer Teknis, Manajer Surveilans dan KLB dan para kepala instalasi;
9. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja Program Layanan;
10. Membuat pedoman standar pelayanan;
11. Melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja Program Layanan;
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap instalasi dan substansi Tim Kerja;

13. Menyusun laporan secara rutin Program Layanan; dan
 14. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala.
- E. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala. Manajer Surveilans dan KLB (Ketua Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Resiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa)
1. Bertanggung jawab terhadap Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatan teknis dan manajemen laboratorium di bawah Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja tim surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan dan KLB;
 3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia di tim surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan dan KLB;
 4. Melakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi program tim surveilans dan KLB;
 5. Bekerja sama dengan Manajer Teknis untuk memastikan kegiatan surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan dan KLB sesuai dengan standar pelayanan dan sistem jaminan mutu;
 6. Bekerja sama dengan Manajer Teknis untuk memperoleh ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan dan KLB;
 7. Melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 8. Melakukan koordinasi antar tim kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 10. Melakukan Analisis dan Menyusun laporan secara rutin Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
 11. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala.
- F. Pengendali Dokumen dan Audit Internal Serta Kaji Ulang Manajemen
1. Merencanakan dan berkoordinasi dengan Manajer Mutu untuk pelaksanaan audit internal, kaji ulang dokumen dan kaji ulang manajemen;
 2. Melaksanakan audit internal, kaji ulang dokumen dan kaji ulang manajemen dan melaporkan ke Manajer Mutu;
 3. Menarik dokumen yang tidak sah atau kadaluarsa dari semua tempat penggunaan;
 4. Melakukan pengarsipan dokumen mutu, baik yang masih digunakan atau yang kadaluarsa untuk keperluan legal;

5. Membuat identifikasi dokumen mutu; dan
6. Membantu Manajer Administrasi dalam penatalaksanaan dokumen;
7. Mengarsipkan edisi resmi dokumen; dan
8. Mendistribusikan dan menyediakan dokumen yang sesuai di tempat kegiatan yang penting bagi efektivitas fungsi laboratorium.

G. Instalasi Mikrobiologi dan Imunologi

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada timja terkait;
3. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan media, reagensia dan BHP untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
4. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan alat pendukung laboratorium untuk disampaikan kepada instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik;
5. Menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana tahun berjalan di instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
6. Membuat konsep uraian tugas personil dan juga Prosedur teknis dalam pengujian parameter jenis spesimen dan lain-lain serta melaksanakan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
7. Melaksanakan pelayanan instalasi yang bersangkutan yaitu melakukan pemeriksaan Mikrobiologi (bakteriologi dan virologi) dan Imunologi terhadap spesimen;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
9. Melaksanakan pengembangan instalasi yang bersangkutan;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinergisitas antar instalasi, dan dengan tim kerja (Manajer Mutu, Manajer Teknis, Manajer Administrasi dan Manajer Surveilas dan KLB) di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
11. Melakukan pelaporan/Entry data hasil pemeriksaan di sistem Informasi laboratorium (SIL);
12. Melaksanakan jaminan mutu laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya;
13. Bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan/kompetensi laboratorium dalam menyajikan hasil pengujian;
14. Bertanggung jawab terhadap ketelitian dan keabsahan hasil pengujian;
15. Melakukan koordinasi dengan timja terkait dalam rangka pengkajian, surveilans, mutu/akreditasi, pengaduan pelanggan terhadap pemeriksaan hasil uji;

16. Bertanggung jawab untuk membimbing dan atau menjadi narasumber/pelatih bagi peserta PKL/magang/penelitian/kunjungan;
17. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;
18. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

H. Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada timja terkait;
3. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan media, reagensia dan BHP untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
4. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan alat pendukung laboratorium untuk disampaikan kepada instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik;
5. Menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana tahun berjalan di instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
6. Membuat konsep uraian tugas personil dan juga prosedur teknis dalam pengujian parameter jenis spesimen dan lain-lain serta melaksanakan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
7. Melaksanakan pelayanan instalasi yang bersangkutan yaitu melakukan pemeriksaan parasitologi terhadap spesimen;
8. Melakukan pemeliharaan Hewan Coba beserta pemanfaatannya;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
10. Melaksanakan pengembangan instalasi yang bersangkutan;
11. Melaksanakan koordinasi dan sinergisitas antar instalasi, dan dengan tim kerja (Manajer Mutu, Manajer Teknis, Manajer Administrasi dan Manajer Surveilans dan KLB) di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
12. Melakukan pelaporan/Entry data hasil pemeriksaan di sistem Informasi laboratorium (SIL);
13. Melaksanakan jaminan mutu laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya;

14. Bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan/kompetensi laboratorium dalam menyajikan hasil pengujian;
15. Bertanggung jawab terhadap ketelitian dan keabsahan hasil pengujian;
16. Melakukan koordinasi dengan timja terkait dalam rangka pengkajian, surveilans, mutu/akreditasi, pengaduan pelanggan terhadap pemeriksaan hasil uji;
17. Bertanggung jawab untuk membimbing dan atau menjadi narasumber/pelatih bagi peserta PKL/magang/penelitian/kunjungan;
18. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;
19. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

I. Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
3. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan media, reagensia dan BHP untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
4. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan alat pendukung laboratorium untuk disampaikan kepada instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik;
5. Menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana tahun berjalan di instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
6. Membuat konsep uraian tugas personil dan juga Prosedur teknis dalam pengujian parameter jenis spesimen dan lain-lain serta melaksanakan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
7. Melaksanakan pelayanan instalasi yang bersangkutan yaitu melakukan pemeriksaan Gizi dan Toksikologi Klinik terhadap spesimen;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
9. Melaksanakan pengembangan instalasi yang bersangkutan;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinergisitas antar instalasi, dan dengan tim kerja (Manajer Mutu, Manajer Teknis, Manajer Administrasi dan Manajer Surveilans dan KLB) di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;

11. Melakukan pelaporan/Entry data hasil pemeriksaan di sistem Informasi laboratorium (SIL);
12. Melaksanakan jaminan mutu laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya;
13. Bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan/kompetensi laboratorium dalam menyajikan hasil pengujian;
14. Bertanggung jawab terhadap ketelitian dan keabsahan hasil pengujian;
15. Melakukan koordinasi dengan timja terkait dalam rangka pengkajian, surveilans, mutu/akreditasi, pengaduan pelanggan terhadap pemeriksaan hasil uji;
16. Bertanggung jawab untuk membimbing dan atau menjadi narasumber/pelatih bagi peserta PKL/magang/penelitian/kunjungan;
17. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;
18. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

J. Instalasi Biomolekuler dan Genomik

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran instalasi, kemudian menyampaikannya kepada tim kerja terkait;
3. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan media, reagensia dan BHP untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
4. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan alat pendukung laboratorium, untuk disampaikan kepada instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik;
5. Menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana tahun berjalan di instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada timja terkait
6. Membuat uraian tugas personil sesuai dengan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
7. Menyusun prosedur teknis pengujian parameter spesimen, serta melaksanakan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
8. Melaksanakan seluruh pemeriksaan laboratorium berbasis molekuler dan genomik di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
10. Melaksanakan pengembangan instalasi yang bersangkutan;
11. Melaksanakan koordinasi dan sinergisitas antar instalasi, dan dengan tim kerja (Manajer Mutu, Manajer Teknis, Manajer Administrasi dan Manajer Surveilans dan KLB) di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
12. Melaporkan hasil pemeriksaan di sistem Informasi laboratorium (SIL) atau sistem lain sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyelenggarakan uji validasi dan verifikasi berbasis molekuler dan genomik;
14. Melaksanakan jaminan mutu laboratorium yang menjadi tanggung jawab instalasinya;
15. Bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan/kompetensi laboratorium dalam menyajikan hasil pengujian;
16. Bertanggung jawab terhadap ketelitian dan keabsahan hasil pengujian;
17. Melakukan koordinasi dengan timja terkait dalam rangka pengkajian, surveilans, mutu/akreditasi, pengaduan pelanggan terhadap pemeriksaan hasil uji;
18. Bertanggung jawab untuk membimbing dan atau menjadi narasumber/pelatih bagi peserta PKL/magang/penelitian/kunjungan;
19. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;
20. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
21. Menerapkan manajemen laboratorium dengan sistem mutu/akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

K. Instalasi Biorepositori

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
3. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan media, reagensia dan BHP untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
4. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan alat pendukung laboratorium untuk disampaikan kepada instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik;

5. Menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana tahun berjalan di instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
6. Melakukan penerimaan, pemantauan, pemeliharaan dan pengelolaan spesimen serta pelaksanaan Biorepositori di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
7. Melaksanakan koordinasi terkait implementasi sistem Informasi laboratorium (SIL) baik internal BBLBK maupun Eksternal Jejaring Laboratorium kesehatan;
8. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;
9. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

L. Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
3. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan alat pendukung laboratorium untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
4. Menyusun rekapitulasi data usulan media reagensia, BHP dan pendukung laboratorium lainnya dari instalasi untuk disampaikan kepada timja terkait;
5. Menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana tahun berjalan di instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
6. Melakukan pengelolaan terhadap media, reagensia, BHP dan bahan penunjang lainnya meliputi penerimaan, penyediaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan sesuai kebutuhan (bekerja sama dengan Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik);
7. Melakukan uji kualitas media, reagensia dan bahan penunjang;
8. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;

9. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- M. Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik
1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
 2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
 3. Pengelolaan dan perawatan serta pemanfaatan fasilitas Biosafety Laboratory Level-3 (BSL-3);
 4. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan peralatan laboratorium (termasuk inventarisir, kalibrasi dan sertifikasi serta perbaikan) yang bersifat elektrikal dan mekanikal serta mencakup juga gedung laboratorium;
 5. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
 6. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran kebutuhan BHP untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
 7. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran kebutuhan alat pendukung laboratorium;
 8. Menyusun rekapitulasi data usulan pengadaan alat penunjang laboratorium dari instalasi lainnya dan disampaikan kepada tim kerja terkait;
 9. Menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana tahun berjalan di instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
 10. Melakukan kalibrasi dan uji kinerja peralatan laboratorium serta estimasi ketidakpastian hasil kalibrasi;
 11. Melakukan koordinasi dengan timja terkait dalam rangka pengkajian, surveilans terhadap pemeriksaan hasil kalibrasi;
 12. Bekerja sama dengan Instalasi Media Reagensia dan Sterilisasi untuk melakukan pengelolaan terhadap media, reagensia, BHP dan bahan penunjang lainnya meliputi penerimaan, penyediaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan sesuai kebutuhan;
 13. Bertanggung jawab untuk membimbing dan atau menjadi narasumber/pelatih untuk pelatihan dan siswa/mahasiswa PKL/magang;
 14. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk

menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;

15. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
16. Melakukan evaluasi pemasok barang dan jasa bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

N. Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Menyiapkan data usulan kegiatan dan anggaran di lingkungan instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
3. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan media, reagensia dan BHP untuk disampaikan kepada instalasi media reagensia dan sterilisasi;
4. Menyusun data usulan kegiatan dan anggaran khususnya kebutuhan alat pendukung laboratorium untuk disampaikan kepada instalasi sarana dan prasarana, kalibrasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
5. Melaksanakan koordinasi terkait implementasi sistem manajemen biorisiko di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
6. Memberikan informasi tentang Biosafety di laboratorium kepada petugas laboratorium dan atau tamu laboratorium;
7. Melakukan pencatatan dan penanganannya bila ditemukan infeksi terkait laboratorium, tumpahan, dan penanganan limbah sesuai dengan pedoman Biosafety laboratorium;
8. Melakukan koordinasi dengan kepala instalasi dan ketua tim kerja terhadap semua kegiatan yang menimbulkan bahaya di laboratorium;
9. Melakukan pendataan riwayat kesehatan petugas laboratorium (medical record) dan melaksanakan vaksinasi petugas laboratorium;
10. Melengkapi tanda-tanda bahaya setelah adanya penilaian risiko;
11. Melakukan penanganan respon kegawatdaruratan;
12. Melakukan pendataan pengunjung, sarana dan prasarana, jaringan internet, dan telekomunikasi serta spesimen (*agent*) terkait faktor kerahasiaan;
13. Mengkoordinir Satuan Pengamanan di Laboratorium dan Petugas Kebersihan Laboratorium/Lingkungan;
14. Mengoperasikan instalasi pengolahan limbah cair domestik dan laboratorium;
15. Melakukan pemantauan, pemeliharaan dan pengelolaan K3, Limbah serta Biorepositori;

16. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;
17. Membuat laporan tahunan Instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

O. Instalasi Uji In Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna

1. Menyusun rencana kerja instalasi yang bersangkutan;
2. Pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium;
3. Menyiapkan data usulan Kegiatan dan anggaran di lingkungan Instalasi yang bersangkutan dan menyampaikan kepada tim kerja terkait;
4. Menyusun data usulan Kegiatan dan anggaran kebutuhan BHP untuk disampaikan kepada Instalasi media reagensia dan sterilisasi;
5. Menyusun data usulan Kegiatan dan anggaran kebutuhan alat pendukung laboratorium untuk disampaikan kepada Instalasi kalibrasi dan pemeliharaan alat, sarpras, Pengelolaan logistik;
6. Membuat konsep uraian tugas personil dan juga prosedur teknis dalam pengujian parameter jenis spesimen dan lain-lain serta melaksanakan pengelolaan instalasi yang bersangkutan;
7. Penyelenggaraan layanan in-vitro diagnostik untuk alat Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas Biosafety Laboratory Level 3 (BSL-3);
9. Penyelenggaraan layanan uji pemantapan mutu eksternal (PME) Uji Profisiensi bagi jejaring laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Melakukan penapisan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang kesehatan masyarakat;
11. Melaksanakan penjaminan mutu laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya;
12. Melakukan pelaporan/Entry data hasil pemeriksaan di sistem Informasi laboratorium (SIL);
13. Melakukan koordinasi dengan timja terkait dalam rangka pengkajian, surveilans, pengaduan pelanggan terhadap pemeriksaan hasil uji pemantapan mutu eksternal/uji profisiensi;
14. Melaksanakan koordinasi dan sinergisitas antar instalasi, dan dengan tim kerja (Manajer Mutu, Manajer Teknis, Manajer Administrasi dan Manajer Surveilas dan KLB) di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;

15. Bertanggung jawab untuk membimbing dan atau menjadi narasumber / pelatih untuk pelatihan dan /mahasiswa PKL/magang;
16. Menyiapkan data kemajuan pelaksanaan dan laporan akhir Kegiatan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala disampaikan kepada timja terkait;
17. Membuat laporan tahunan instalasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan /atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Kesmas yang memiliki cakupan binaan nasional. Untuk mendukung efisiensi, efektivitas, optimalisasi, dan sinergitas pelaksanaan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 dan tingkat 4, serta memaksimalkan layanan unggulan masing-masing UPT, telah ditentukan mekanisme koordinasi antar-UPT di bidang laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam mekanisme ini, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berperan sebagai koordinator nasional dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi fungsi laboratorium kesehatan masyarakat tingkat regional;
2. Mengkoordinasikan pemetaan masalah kesehatan masyarakat dan endemisitas penyakit dan faktor risiko kesehatan serta kemampuan layanan masing-masing regional;
3. Mengkoordinasikan pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat regional;
4. Mengkoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pelayanan laboratorium tingkat regional; dan
5. Mengkoordinasikan penyusunan/perumusan rekomendasi kebijakan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat regional.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan merupakan UPT tingkat 5 sehingga wilayahnya mencakup seluruh nasional yang terfokus pembinaan di Tingkat 4. Adapun pembagian wilayah binaan UPT di Tingkat 4 dalam lingkup Ditjen Kesmas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1. Pembagian wilayah binaan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Regionalisasi	UPT Bidang Labkesmas	Layanan Unggulan	Wilayah Binaan
Regional 1	1. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh	Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis	1. Aceh 2. Sumatera Utara
	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Medan	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
Regional 2	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	1. Sumatera Barat 2. Riau 3. Kepulauan Riau
	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan	1. Jambi 2. Bengkulu 3. Bangka Belitung 4. Sumatera Selatan 5. Lampung
Regional 3	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
	3. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	1. Banten 2. DKI Jakarta 3. Jawa Barat 4. Kalimantan Barat
Regional 4	2. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Yogyakarta	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	1. D.I. Yogyakarta 2. Jawa Tengah
Regional 5	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
	3. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang	Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis	

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025**

Regionalisasi	UPT Bidang Labkesmas	Layanan Unggulan	Wilayah Binaan
Regional 6	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	1. Jawa Timur 2. Bali 3. Nusa Tenggara Barat 4. Nusa Tenggara Timur
	2. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
Regional 7	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Timur 3. Kalimantan Utara 4. Kalimantan Tengah
	2. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
Regional 8	1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan	1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Barat 3. Sulawesi Tenggara 4. Sulawesi Tengah
	2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
	3. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala	Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	
Regional 9	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado	Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan	1. Sulawesi Utara 2. Gorontalo
Regional 10	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Ambon	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	1. Maluku 2. Maluku Utara
Regional 11	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua	1. Pelaksanaan pemeriksaan spesimen klinis 2. Pelaksanaan pengujian sampel lingkungan, vektor, reservoir, dan zoonosis	1. Papua 2. Papua Barat 3. Papua Tengah 4. Papua Selatan 5. Papua Pegunungan 6. Papua Barat Daya

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di BBLBK berdasarkan daa Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMKA) per 30 Juni 2025 (terlampir) adalah sebanyak 70 orang pegawai yang terdiri dari 54 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 15 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS).

1) Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat secara tetap sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Berdasarkan data dari aplikasi SIMKA per 30 Juni 2025, jumlah PNS di lingkungan BBLBK tercatat sebanyak 70 orang pegawai. Komposisi PNS di lingkungan BBLBK pada tahun terdiri dari 53 orang perempuan (75,71%) dan 17 orang laki-laki (24,29%) seperti yang terlihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1. 4. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

Jika ditinjau dari golongan, maka jumlah terbanyak adalah PNS Golongan III yaitu sebanyak 57 orang pegawai (81,43%) dan yang paling sedikit adalah Golongan IV yaitu sebanyak 3 orang (4,29%). Sedangkan jumlah pegawai dengan Golongan II sebanyak 10 orang (14,29%). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester 1 Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	IV	3	4,29
2.	III	57	81,43
3.	II	10	14,29
TOTAL		70	100,00

Sumber: Data SIMKA per 30 Juni 2025

Komposisi pegawai BBLBK jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan yang terbanyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 32 orang (45,71%) dan yang paling sedikit adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S3 yaitu hanya 1 orang (1,43%). Sedangkan, pegawai dengan tingkat pendidikan S2, D III, dan SLTA masing-masing sebanyak 16 orang (22,86%), 16 orang (22,86%), dan 5 orang (7,14%), seperti yang terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3. Komposisi Pegawai Negara Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester 1 Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	S3	1	1,43%
2.	S2	16	22,86%
3.	S1	32	45,71%
4.	D III	16	22,86%
5.	SLTA	5	7,14%
TOTAL		70	100%

Sumber: Data SIMKA per 30 Juni 2025

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan turut berperan dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam bentuk pemberian izin pegawai untuk melakukan tugas belajar secara mandiri, yang dulu disebut dengan istilah izin belajar, dengan melakukan pertimbangan secara selektif sesuai dengan kompetensi, peta jabatan, dan masa kerja pegawai. Tahun 2025, tercatat sebanyak 5 orang pegawai sedang melaksanakan tugas belajar mandiri dengan daftar pegawai seperti yang terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4. Daftar Pegawai Tugas Belajar di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025

No	Nama	Jenjang	Peminatan	Universitas	Sumber Dana
1.	Yakub Gunawan, ST	S2	Manajemen	Universitas Esa Unggul, Jakarta	Mandiri
2.	Juwita Kurniawati	D IV	Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Mandiri
3.	Markus Evan Anggia	D IV	Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Mandiri
4.	Kartika Pela	D IV	Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	Mandiri
5.	Nico Hartandi	S1	Biomedik Program Studi Biologi	Fakultas Biologi dan Pertanian, Universitas Nasional, Jakarta	Mandiri

Sumber: Data Kepegawaian per 31 Desember 2024

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan memiliki sumber daya manusia yang menduduki jabatan struktural sebanyak dua orang, yaitu Kepala Balai sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan satu Kepala Sub Bagian Administrasi Umum sebagai Jabatan Pengawas. Mayoritas pegawai di BBLBK telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan jumlah 49 orang (70,00%), sementara 19 orang (27,14%) lainnya masih berada dalam Jabatan Pelaksana. Informasi lebih rinci mengenai komposisi pegawai berdasarkan jabatannya terlihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5. Komposisi Pegawai Pegawai Negara Sipil Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	(%)
Jabatan Struktural			
1.	Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan	1	1.43%
2.	Kepala Subbagian Administrasi Umum	1	1.43%
Jabatan Fungsional			
1.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	3	4.29%
2.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	1	1.43%
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1.43%
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	2.86%
5.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	2.86%
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1	1.43%
7.	Arsiparis Ahli Muda	1	1.43%
8.	Dokter Ahli Muda	1	1.43%
9.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1	1.43%
10.	Perencana Ahli Muda	1	1.43%
11.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1.43%
12.	Pranata Komputer Ahli Muda	1	1.43%
13.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	5	7.14%
14.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	2	2.86%
15.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	2	2.86%
16.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	2	2.86%
17.	Teknisi Litkayasa Mahir	6	8.57%
18.	Teknisi Litkayasa Penyelia	10	14.29%
19.	Teknisi Litkayasa Terampil	6	8.57%
Jabatan Pelaksana			
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	1	1.43%
2.	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara/Analisis Barang Milik Negara	1	1.43%
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1.43%
4.	Arsiparis Ahli Pertama	1	1.43%
5.	Arsiparis Terampil	1	1.43%
6.	Dokter Ahli Pertama	1	1.43%
7.	Epidemiolog Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	1	1.43%
8.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	2	2.86%
9.	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1.43%
10.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1	1.43%
11.	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	2.86%
12.	Perencana Ahli Pertama	2	2.86%
13.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	2	2.86%
14.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1.43%
15.	Teknisi Elektromedis Terampil	1	1.43%
TOTAL		70	100,00

Sumber: Data SIMKA per 30 Juni 2025

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pada awal bulan Agustus 2024, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menerima mutasi 1 (satu) orang pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dengan jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 6. Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Syafni Elwina, S.KM	S1 Kesehatan Masyarakat	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama

Sumber: Data SIMKA per 31 Desember 2024

3) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS)

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, atau pegawai lainnya yang gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam menjalankan tugas-tugasnya hingga 30 Juni 2025, BBLBK didukung oleh 15 orang PPNPNS dengan jabatan pramubakti yang bertugas sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) serta tenaga administrasi. Penetapan PPNPNS dilakukan melalui Surat Keputusan KPA Sekertaris Jenderal Kesehatan Masyarakat tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri pada BBLBK Tahun Anggaran 2024, dengan kontrak kerja selama satu tahun yang bersifat tidak mengikat serta memungkinkan evaluasi kinerja sewaktu-waktu. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1. 7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1.	Fithriani, M.Si.	Perempuan	S2 - Bioteknologi
2.	Alma Ayuwandari, S.Si	Perempuan	S1 - Biologi
3.	Iis Imroatun Sholihah, S.Si	Perempuan	S1 - Biologi
4.	Selly Veronica Oktaviani, S.Si	Perempuan	S1 - Biologi
5.	Aulia Rizki, S. Si	Perempuan	S1 - Teknobiologi
6.	Uud Nourma Reswandar, S.Si	Laki-Laki	S1 - Kimia
7.	Suharyadi Eko Pratomo, S.Kom	Laki-Laki	S1 - Teknik Informatika
8.	Nurul Syiffa Adinda, S. Kom	Perempuan	S1 - Sistem Informasi
9.	Khaery Wiguna, ST	Laki-Laki	S1 - Teknik Elektro
10.	Siti Rahmatul Ru'iyah, S.Tr.Kes	Perempuan	DIV - Teknologi Laboratorium Medis
11.	Lisna Wati Putri, A.Md.Kes	Perempuan	D3 - Teknologi Laboratorium Medis
12.	Aenun Zikra Marsya, A. Md. Kes	Perempuan	D3 - Teknologi Laboratorium Medis
13.	Alifah Budi Setyaningrum, A.Md.Kes	Perempuan	D3 - Teknologi Laboratorium Medis
14.	Sauma Romaintan Naibaho.AMAK	Perempuan	D3- Analis Kesehatan
15.	Herman	Laki-Laki	SMA

Sumber: Data SIMKA per 31 Desember 2024

1.5. Isu Strategis Organisasi

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan selama tahun 2025, antara lain:

- 1) Dalam Permenkes No. 26 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, BBLBK memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan yang terintegrasi dan berkualitas di Indonesia. Salah satu aspek penting dari tugas pembinaan ini adalah pelaksanaan bimbingan yang diberikan untuk memastikan bahwa laboratorium di bawahnya dapat menjalankan tugas dengan standar yang sesuai, termasuk dalam pengelolaan reagen, logistik, dan pemeriksaan laboratorium. Dengan demikian, laboratorium mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung surveilans kesehatan. Selain itu, BBLBK juga bertanggung jawab dalam penjaminan mutu laboratorium dengan melibatkan proses monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem mutu laboratorium untuk memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan dapat dipercaya. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi aktif dan pengawasan berkelanjutan, yang memungkinkan laboratorium-laboratorium di bawahnya untuk memenuhi standar nasional maupun internasional. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan antar-laboratorium, sehingga mempermudah pengelolaan kasus-kasus yang memerlukan analisis lebih lanjut. Dengan adanya sistem ini, laboratorium di berbagai daerah dapat saling mendukung dan mempercepat respons terhadap kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBLBK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di dalam lingkup internal maupun dalam hubungan kerja dengan instansi terkait. Pembinaan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh laboratorium di bawahnya. Lebih jauh, Balai Besar juga mendukung pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pembinaan SDM di laboratorium tersebut. Dukungan ini memastikan bahwa tenaga kerja di laboratorium memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang dinamis, termasuk penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), wabah, atau bencana lainnya yang berbasis laboratorium.
- 3) BBLBK berperan sebagai penggerak utama dalam sistem laboratorium kesehatan di Indonesia, memastikan keberlanjutan pelayanan yang bermutu tinggi serta mendukung terciptanya sistem ketahanan kesehatan nasional yang tangguh. Meski BBLBK memiliki mandat strategis untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium di bawahnya, pelaksanaan tugas ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa Balai Besar ini baru dibentuk pada awal tahun 2024, Sebagai organisasi yang masih dalam tahap awal operasional, beberapa aspek pendukung pelaksanaan tugas, seperti pengembangan SDM, sistem kerja, dan infrastruktur, masih dalam proses penyesuaian dan penguatan. Keterbatasan ini

mencakup belum optimalnya proses pengorganisasian jejaring laboratorium di seluruh wilayah, yang memerlukan waktu untuk membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif.

- 4) Kendala lain yang dihadapi BBLBK di tahun 2025 adalah kebutuhan akan penyesuaian tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai untuk mendukung tugas teknis dan fungsional. Meskipun demikian, BBLBK tetap berkomitmen untuk mengatasi keterbatasan ini melalui langkah-langkah strategis. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pembentukan instalasi pendukung, dan penguatan kapasitas organisasi menjadi fokus utama agar pembinaan laboratorium di bawahnya dapat segera terlaksana secara optimal, meskipun dalam tahap awal pengembangan.

1.6. Sistematika Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja ini disusun dengan mengikuti sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan ikhtisar beberapa hal yang penting di dalam perencanaan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam bab ini juga menggambarkan sumberdaya yang mendukung dalam pencapaian kinerja. Pada bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana, Efisiensi Sumber Daya, Penghargaan/Apresiasi dan Inovasi/Terobosan.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana yang merinci sasaran dan program yang telah ditentukan dalam rencana strategis. Dalam rencana kinerja, ditentukan target capaian tahunan untuk semua indikator kinerja yang berkaitan dengan sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana ini dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan kebijakan anggaran, serta merupakan bentuk komitmen instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan kinerja memiliki peran penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Proses ini membantu menetapkan arah program dan kegiatan instansi, sekaligus mengelola sumber daya serta tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang tertuang dalam rencana strategis, yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa laboratorium kesehatan, terutama laboratorium kesehatan masyarakat, memiliki peran krusial dalam mendukung dan menjadi pilar penting dalam menunjang pelayanan kesehatan primer. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 memberikan landasan yang kuat bagi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam menyusun perencanaan kinerja. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, Labkesmas dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian dalam Lembar Catatan Hasil Kesepakatan Tiga Pihak (Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan) terkait perubahan struktur dan penyesuaian rencana kerja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2025. Perubahan ini didorong oleh adanya beberapa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) baru yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja UPT, terutama di bidang laboratorium kesehatan. Sebagai konsekuensinya, rencana kerja tahun 2025 untuk UPT perlu disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru, termasuk penyesuaian anggaran, sasaran, dan indikator kinerja, termasuk BBLBK selaku organisasi baru yang perlu menyesuaikan diri.

Sejalan dengan kebijakan untuk melakukan transformasi di bidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan yaitu “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang

berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”. Arah kebijakan ini sejalan dengan kebijakan transformasi kesehatan.

Dalam rangka menjalankan kebijakan di atas, maka strategi Kementerian Kesehatan hingga 2025 dirumuskan dalam 6 pilar:

- 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas;
- 2) Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas;
- 3) Transformasi menuju ke sistem ketahanan kesehatan yang tangguh;
- 4) Transformasi pembiayaan kesehatan dilakukan untuk menuju pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi untuk mewujudkan ketersediaan, kecukupan, keberlanjutan, keadilan serta efektivitas dan efisiensi pada penyelenggaraan pembiayaan;
- 5) Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan; dan
- 6) Transformasi teknologi kesehatan menuju pada digitalisasi kesehatan dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan.

Satker BBLBK memiliki 2 kegiatan yaitu pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan serta kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Dalam pencapaian output maka diperlukan suatu indikator sebagai tolok ukur dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 sehingga dapat terukur dengan baik. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai BBLBK selama tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan internasional	5 MoU/ PKS/ Laporan
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
2. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
	2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
	3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Hasil program Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dinyatakan berhasil apabila target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat tercapai. Adapun penetapan IKK dan target mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timebound*), meliputi:

1. *Specific* (spesifik), Indikator yang ditetapkan harus disusun dengan jelas, terinci, dapat dibedakan dari yang lain dan tidak berdwimakna.
2. *Measurable* (terukur), artinya Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan dapat terukur, mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan indikator seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
3. *Achievable* (dapat dilaksanakan atau dicapai), artinya Indikator yang ditetapkan harus bersifat realistis, dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, serta bisa dicapai.
4. *Relevance* (relevan), artinya indikator yang ditetapkan terkait langsung atau selaras dengan apa yang diukur (visi dan misi).
5. *Timebound* (terikat waktu), artinya indikator yang ditentukan memiliki jadwal dan kurun waktu pencapaian target yang jelas.

Metode dengan kriteria SMART tersebut dipilih agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan. Analisis SMART untuk masing-masing IKK BBLBK Semester I TA 2025 ditampilkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Analisis SMART IKK Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

IKK	<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time-bound</i>
Jumlah Rekomendasi hasil surveilans	Menyusun 12 rekomendasi hasil surveilans	12 rekomendasi, dapat dicapai dengan cara perhitungan penjumlahan	Target ini dapat dicapai dengan melakukan surveilans	Penting untuk meningkatkan kualitas layanan	Dicapai selama 1 tahun

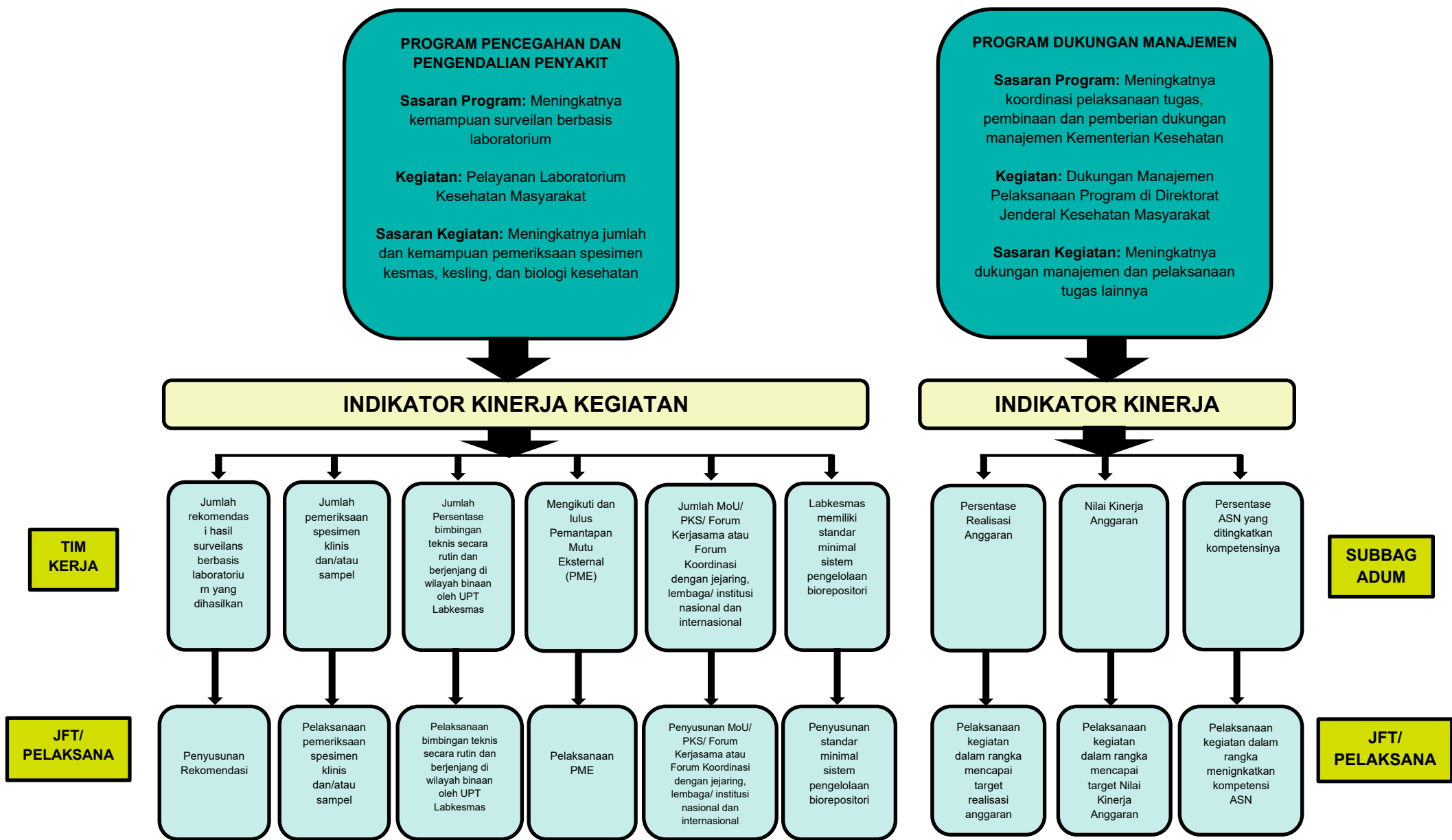
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

IKK	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
berbasis laboratorium yang dihasilkan	berbasis laboratorium	rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	berbasis laboratorium yang komprehensif dan analisis data yang tepat	dan hasil laboratorium dalam kesehatan lingkungan	
Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	Melakukan pemeriksaan terhadap 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen, dapat dicapai dengan cara penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Dengan alokasi sumber daya yang tepat dan efisiensi waktu, target ini dapat tercapai	Penting untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif untuk diagnosis dan pemantauan Kesehatan	Dicapai selama 1 tahun
Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	Melaksanakan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di seluruh wilayah binaan	100%, dapat dicapai dengan cara perhitungan Jumlah labkesmas Tingkat 4 yang dilaksanakan bimbingan teknis sesuai ruang lingkup oleh UPT Labkesmas dibagi jumlah seluruh Labkesmas Tingkat 4 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100%	Achievable dengan perencanaan yang matang dan koordinasi dengan wilayah binaan	Penting untuk memastikan kualitas dan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah binaan	Dicapai selama 1 tahun
Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Mengikuti dan lulus dalam 2 kali Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali mengikuti dan lulus PME, dapat dicapai dengan cara perhitungan Penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Target ini dapat dicapai dengan mempersiapkan laboratorium sesuai standar mutu yang ditetapkan dan pelatihan yang memadai	Penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil laboratorium sesuai standar nasional atau internasional	Dicapai selama 1 tahun
Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/ atau internasional	Membuat 5 MoU/PKS atau laporan kerjasama dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS atau laporan kerjasama, dapat dicapai dengan Penjumlahan MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Dapat dicapai melalui kolaborasi yang efektif dengan berbagai lembaga atau institusi terkait	Penting untuk memperluas jaringan kerjasama dan dukungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lingkungan	Dicapai selama 1 tahun
Labkesmas memiliki standar minimal sistem	Menerapkan standar minimal sistem	100%, dapat dicapai dengan cara perhitungan Jumlah standar sistem	Achievable dengan penyesuaian terhadap standar yang berlaku	Penting untuk memastikan pengelolaan	Dicapai selama 1 tahun

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

IKK	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
pengelolaan biorepositori	pengelolaan biorepositori di laboratorium	pengelolaan biorepositori yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepository dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100 %	dan pelatihan staf yang memadai	biorepositori yang efektif dan sesuai standar nasional atau internasional	
Persentase Realisasi Anggaran	Mencapai 96% dari total anggaran yang telah dialokasikan	96% realisasi anggaran, dapat dicapai dengan cara perhitungan Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	Dapat dicapai dengan perencanaan anggaran yang efektif dan pengawasan pelaksanaan anggaran secara rutin	Penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran	Dicapai selama 1 tahun
Nilai Kinerja Anggaran	Mendapatkan nilai kinerja anggaran sebesar 80,1 NKA	80,1 NKA, dapat dicapai dengan Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu	Target ini dapat dicapai melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya	Penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dicapai selama 1 tahun
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Meningkatkan kompetensi 80% dari ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan lainnya	80% ASN dengan peningkatan kompetensi, dapat dicapai dengan cara perhitungan Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	Dapat dicapai dengan penyediaan program pelatihan yang relevan dan akses yang memadai bagi ASN untuk mengikuti pelatihan	Penting untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui peningkatan kompetensi ASN	Dicapai selama 1 tahun

Target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja kemudian dilakukan penjabaran (*Cascading*) kinerja sehingga seluruh pegawai Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mempunyai peran dalam pencapaian target kinerja tersebut. *Cascading* merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2024

Setelah *cascading* tersusun maka dilakukan penyusunan matriks peran hasil dari masing-masing Tim Kerja dan Sub Bagian Administrasi Umum, seperti yang terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Kegiatan	Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan	Tim Kerja Program Layanan	Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan KLB	Sub Bagian Admnistrasi Umum
A	Menguatnya surveilan yang adekuat				
1	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan				
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel				
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas				
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)				
5	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan / atau internasional				
6	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori				
B	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik				
1	Persentase Realisasi Anggaran				
2	Nilai Kinerja Anggaran				
3	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				

2.2. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan dengan indikator kinerja tertentu. Melalui perjanjian ini, tercipta komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah terkait pencapaian kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur antara pemberi dan penerima amanah, maka BBLBK menetapkan target kinerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja BBLBK Tahun 2025 menetapkan Kepala Balai Besar sebagai penerima amanah atau tanggung jawab kinerja dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai pemberi amanah. Perjanjian Kinerja BBLBK Tahun 2025 dengan anggaran senilai Rp45.510.062.000, tampak pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan /Sasaran Kegiatan/ Sasaran Kegiatan UPT	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran Strategis: Menguatnya surveilan yang adekuat		
I.	Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program: Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium		
1.	Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar	
		2. Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinis dan lingkungan sesuai standar	
		3. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	
2.	Sasaran Kegiatan UPT: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen Klinis dan/atau Sampel

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan /Sasaran Kegiatan/ Sasaran Kegiatan UPT	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100 %
A.	Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik		
II.	Program: Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan		
1.	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat		
2.	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96 %
		2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
		3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80 %

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 rincian anggaran BBLBK, terdiri dari:

1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebesar Rp35.548.806.000
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat sebesar Rp9.961.256.000

Berdasarkan Permenpan No.53 Tahun 2014, lampiran I halaman 4 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja dan tindakan organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta penjelasan tersebut. Akuntabilitas kinerja mencerminkan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan kinerja adalah wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Akuntabilitas ini mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjelaskan kinerja, serta tindakan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta penjelasan tersebut. Akuntabilitas kinerja mencerminkan tanggung jawab instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip akuntabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 7, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sebagai pengemban amanah, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) wajib menyusun Laporan Kinerja yang sesuai dengan peraturan, termasuk PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja BBLBK dilakukan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan kinerja dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian pada masing-masing indikator. Selain itu, pencapaian indikator kinerja tahun berjalan juga dibandingkan dengan capaian dari tahun sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi indikator kegiatan dilakukan secara rutin melalui proses monitoring dan evaluasi yang dijadwalkan setiap bulan, triwulan, dan tahunan. Proses ini menggunakan berbagai instrumen, termasuk pengisian *e-monev* (sistem monitoring dan evaluasi elektronik) dari BAPPENAS, penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), *e-performance*, serta RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).

Capaian Kinerja Organisasi ini menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja dan rencana aksi. Melalui analisis capaian kinerja, dapat dilihat sejauh mana program, kegiatan, dan indikator kinerja yang direncanakan berhasil direalisasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, penjelasan ini juga memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil yang dicapai, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi selama periode pelaporan.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Idealnya, pengukuran tingkat capaian kinerja BBLBK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian atau realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab BBLBK disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2024 dan 2025

Sasaran	Indikator	Target	Capaian 2024	(%)	Capaian 2025	(%)
Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi	5 Rekomendasi	41,67	5 Rekomendasi	41,67
	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen Klinis dan/atau Sampel	9.335 Spesimen Klinis dan/atau Sampel	93,35	10.189 Spesimen Klinis dan/atau Sampel	101,89
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00
	4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali	6 Kali	300,00	11 Kali	550,00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

Sasaran	Indikator	Target	Capaian 2024	(%)	Capaian 2025	(%)
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan	4 MoU/PKS/ Laporan	80,00	6 MoU/PKS/ Laporan	120,00
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96 %	2,59%	2,70	50,37 %	52,47
	2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA	21,62 NKA	26,99	49,19 NKA	61,41
	3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi	80 %	80%	100,0	98 %	122,50

Salah satu aspek penilaian akuntabilitas kinerja unit kerja adalah menyandingkan capaian indikator kinerja antara unit kerja yang setara. Oleh karena itu, BBLBK sebagai Satuan Kerja UPT di lingkup Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas juga harus membandingkan capaian kinerjanya dengan Satuan Kerja UPT lainnya di lingkup Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas. Dalam hal ini, BBLBK membandingkan capaian kinerja Semester I tahun 2025 dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (BBLKL) Salatiga sebagai sesama laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 yang menjadi rujukan nasional. Rincian perbandingan kinerja antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada semester I tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Sandingan Capaian Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Semester I Tahun Anggaran 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan			Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan		
				T	C	%	T	C	%
1.	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Rekomendasi	12	5	41,67	12	4	33,33
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel	Spesimen Klinis dan/atau Sampel	10.000	10.189	101,89	10.000	5.253	52,53
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	%	100	100	100,0	100	100	100,00
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Kali	2	11	550,00	2	7	350,00
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/ atau internasional	MoU/PKS/ Laporan	5	6	120,00	5	6	120,00
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	%	100	100	100,00	100	100	100,00
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	%	96	50,37	52,47	96	32,70	34,06
		2. Nilai Kinerja Anggaran	NKA	80,1	49,19	61,41	80,1	48,65	60,74
		3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi	%	80	98,00	122,50	80	95,60	119,50
		4. Kinerja implementasi WBK Satker	Skala	0	0	0	75	90,31	120,41

Keterangan: T= Target; C= Capaian

Pada Semester I tahun 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seluruh target IKK tersebut berhasil mencapai bahkan mayoritas melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian IKK jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi (41,67%) dari target 12 rekomendasi, jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel tercapai sebanyak 10.189 (101,89%) dari target sebanyak 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel, persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas tercapai 100%, mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) tercapai sebanyak 11 kali (550%) dari target 2 kali, jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional tercapai sebanyak 6 MoU/PKS/Laporan dari target 5 MoU/ PKS/Laporan, Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository tercapai 100%, persentase realisasi anggaran tercapai sebesar 50,37% (52,47%) dari target 96%, Nilai Kinerja Anggaran tercapai sebesar 49,19 NKA (61,41%) dari target sebesar 80,1 NKA, dan persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi tercapai 98% (122,50%) dari target 80% pegawai.

Penjelasan mengenai analisis pencapaian kinerja masing-masing IKK pada Satker BBLBK Semester 1 tahun 2025, sebagai berikut:

1) Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan

a) Definisi Operasional

1. Surveilans adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
2. Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup:
 - a. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - b. Surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; dan
 - c. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan.
3. Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi/rekomendasi/ laporan.

(Sumber: pedoman surveilans berbasis laboratorium dan twinning program).

4. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa hasil surveilans penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/ atau regional.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan capaian IKK jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan adalah melalui penjumlahan rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Capaian IKK =

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Rekomendasi hasil surveylans berbasis laboratorium dalam 1 tahun}}{\sum \text{Target rekomendasi hasil surveylans berbasis laboratorium}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{12} \times 100\% \\ &= 41,67\% \end{aligned}$$

c) Analisis Capaian Kinerja

Jumlah target rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Labkesmas semester I tahun 2025 oleh BBLBK sesuai dengan amanah dari perjanjian kerja adalah 12 rekomendasi kebijakan per tahun. Namun dalam pelaksanaannya selama satu semester, BBLBK berhasil mendapatkan capaian sebanyak 5 Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan ini disusun untuk memperkuat kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan tersedianya sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan surveilans laboratorium. Dengan demikian, diharapkan sistem surveilans berbasis laboratorium dapat mendeteksi, memantau, dan merespons penyakit dengan lebih efektif, sehingga mampu meminimalisir dampak kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh berbagai ancaman penyakit menular maupun tidak menular. Penguatan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dalam penyelenggaraan Labkesmas di seluruh tingkat layanan juga menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini.

Adapun Rekomendasi Kebijakan selama kurun waktu satu semester tahun 2025 beserta penjelasan singkatnya terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

No	Judul Rekomendasi Kebijakan	Uraian Singkat	Rekomendasi yang Diberikan	Target Pemangku Kepentingan
1	Temuan Kasus Bordetella spp, Bagaimana Makna dan Responnya?	Temuan kasus Bordetella spp. dalam surveilans berbasis laboratorium kesehatan masyarakat di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menunjukkan adanya infeksi yang perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun infeksi akibat Bordetella spp. umumnya lebih ringan dibandingkan dengan B. Pertussis dan Bordetella parapertussis, beberapa spesies seperti B. holmesii, B. hinzii, dan B. bronchiseptica dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada individu dengan imunitas lemah. Saat ini, pedoman tatalaksana hanya tersedia untuk B. pertussis dan B. parapertussis, sedangkan penanganan Bordetella spp. lainnya belum memiliki acuan pedoman yang spesifik. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan surveilans, kajian epidemiologi, serta penyusunan petunjuk teknis untuk deteksi dan pengendalian Bordetella spp..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan surveilans laboratorium, kajian epidemiologi, serta penyusunan panduan klinis dan kebijakan penatalaksanaan Bordetella spp. Hal bisa dilakukan dari Kemenkes (Direktorat Penanggulangan Penyakit) dan Kementan (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) 2. Peningkatan dan pengembangan Diagnostik Bordetella spp untuk memastikan identifikasi jenis spesiesnya, penelitian lebih lanjut diperlukan guna memahami pola infeksi dan risiko kesehatannya. Hal ini bisa dilakukan dari Kemenkes (Direktorat Kesehatan Primer dan Komunitas), BRIN 3. Melakukan tindak lanjut hasil positif dengan evaluasi klinis dan konsultasi, serta melaporkan temuan ke Dinas Kesehatan untuk pemantauan lebih lanjut. Hal ini dilakukan oleh Dinkes dan Fasyankes pengirim 4. Melakukan sosialisasi pencegahan ke masyarakat, terkait penularan Bordetella spp melalui hewan peliharaan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap Bordetella spp. Hal ini bisa dilakukan Labkesmas, Dinkes, dan Direktorat Penanggulangan Penyakit 	BBLBK, Direktorat Penanggulangan Penyakit, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Primer dan Komunitas.
2	Dampak Kebijakan Permenkeu 45 /2024 di Labkesmas Terhadap Upaya Penanggulangan Klb/Wabah dan	Labkesmas memiliki fungsi vital seperti pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan, surveilans kesehatan berbasis laboratorium, analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan, serta pelaksanaan penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidi atau Skema Pendanaan Alternatif: Pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pemberian subsidi atau skema pendanaan alternatif dengan menanggung semua biaya pemeriksaan Laboratorium kesehatan dalam upaya penanganan wabah/KLB/Surveilans bagi daerah 	Labkesmas, Dinkes

No	Judul Rekomendasi Kebijakan	Uraian Singkat	Rekomendasi yang Diberikan	Target Pemangku Kepentingan
	Surveilans Penyakit di daerah	dan respon cepat untuk penanggulangan KLB/wabah atau bencana lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana kebijakan fiskal tersebut dapat mempengaruhi upaya penanggulangan KLB/wabah di daerah, yang seringkali membutuhkan respon cepat dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Artikel ini bertujuan bagaimana potensi dampak kebijakan PMK 45/2024 terhadap Labkesmas dan implikasinya terhadap efektivitas penanggulangan KLB/wabah di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat dari KLB.	<p>yang memiliki keterbatasan anggaran untuk pemeriksaan laboratorium.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi Dampak Ekonomi dan Kesehatan: Diperlukan kajian menyeluruh terhadap dampak kebijakan ini, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan masyarakat, guna menyesuaikan kebijakan agar tidak menghambat pelayanan kesehatan. 3. Penyusunan Mekanisme Khusus untuk Daerah Prioritas: Pemerintah Pusat dapat menetapkan mekanisme khusus bagi daerah dengan risiko tinggi terhadap wabah agar tidak terbebani biaya tambahan dalam pemeriksaan laboratorium. 4. Penerbitan Regulasi Pendukung: Pemerintah perlu segera menerbitkan Permenkes yang mengatur pengecualian tarif bagi pemeriksaan laboratorium dalam kondisi darurat kesehatan, sehingga ada dasar hukum yang memungkinkan layanan tetap dapat diakses secara gratis ketika diperlukan. 	
3	Selama Masa Lebaran, Waspada Flu Burung Mengintai, Jangan sampai terjangkau.	Flu Burung, atau Avian Influenza, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang burung dan unggas. Walaupun begitu, manusia pun dapat tertular penyakit ini, terutama jika memiliki hubungan dekat dengan unggas, misalnya sering mengunjungi pasar unggas yang kotor, melakukan perjalanan ke daerah dengan banyak kasus flu burung, atau memakan daging unggas yang tidak benar-benar matang. Awalnya, virus flu burung hanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem pemantauan dan deteksi dini dengan Meningkatkan pemantauan terhadap unggas di pasar tradisional dan peternakan serta Membangun sistem pelaporan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan unggas sakit atau mati mendadak. 2. Regulasi Ketat Perdagangan Unggas dengan Mewajibkan pemeriksaan kesehatan unggas sebelum dijual serta Menerapkan standar kebersihan di pasar unggas dan peternakan. 3. Edukasi dan Sosialisasi kepada masyarakat dengan Kampanye kesadaran tentang bahaya flu burung dan 	Kementerian kesehatan, Kementerian Pertanian bersama Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan Daerah, Badan Karantina Pertanian, WHO dan FAO

No	Judul Rekomendasi Kebijakan	Uraian Singkat	Rekomendasi yang Diberikan	Target Pemangku Kepentingan
		menyebar di antara unggas. Virus flu burung sangat patogen (HPAI) A(H5N1) terus menyebar luas di populasi burung liar secara global. Virus yang beredar di burung liar dapat menular ke hewan liar dan domestik, menyebabkan wabah pada unggas dan kasus sesekali pada mamalia. Sebagian besar kasus influenza burung pada manusia disebabkan oleh penularan setelah kontak langsung dengan burung yang terinfeksi atau lingkungan mereka yang terkontaminasi.	<p>cara pencegahannya, terutama menjelang Lebaran serta Pelatihan bagi peternak dan pedagang tentang biosekuriti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan keamanan pangan dengan Pengawasan ketat terhadap produk unggas di pasaran dan Anjuran memasak daging unggas dengan suhu minimal 70°C sebelum dikonsumsi. 5. Koordinasi antar lembaga dengan Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan dinas terkait dalam pengendalian flu burung serta Kerja sama dengan WHO dan FAO untuk pemantauan perkembangan virus secara global. 	
4	Evaluasi dan Penguatan Jejaring Laboratorium Influenza di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Tinjauan dan Penilaian	Infeksi saluran pernapasan seperti Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, terutama pada kelompok rentan. Untuk memantau dan merespons ancaman ini, Indonesia telah mengembangkan sistem surveilans sentinel yang didukung oleh jaringan laboratorium nasional dan regional yang dipimpin oleh National Influenza Centre (NIC). Sistem ini mencakup 13 laboratorium kesehatan masyarakat regional dan 7 laboratorium rumah sakit yang melakukan uji molekuler terhadap spesimen dari situs sentinel di seluruh Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelaporan data dan peningkatan akses reagen dengan Mempertahankan dan memperluas sistem pelaporan berbasis digital serta memperkuat rantai pasok dan logistik reagen, termasuk mekanisme pengadaan darurat dan pemetaan kebutuhan secara regional. 2. Penguatan manajemen laboratorium dan infrastruktur penunjang dengan Alokasi dana khusus untuk pemeliharaan fasilitas dan penggantian peralatan, Penguatan pelatihan teknis berkelanjutan untuk petugas laboratorium terutama di laboratorium daerah dan rumah sakit rujukan, Implementasi standar nasional biosafety dan biosecurity di semua jejaring laboratorium. 3. Perbaikan dan Implementasi PME/EQA dengan implementasi program PME/EQA secara nasional dan berkala. 4. Harmonisasi dengan Standar Internasional dengan penyusunan panduan nasional yang selaras dengan 	Dirjen pengendalian dan pencegahan Ppenyakit, Dirjen tata kelola kesehatan masyarakat, UNDP, UPT Labkesmas tier 5 dan 4.

No	Judul Rekomendasi Kebijakan	Uraian Singkat	Rekomendasi yang Diberikan	Target Pemangku Kepentingan
			<p>regulasi global dan Fasilitasi pelatihan nasional dan pertukaran pengetahuan antar laboratorium.</p> <p>5. Peningkatan Efisiensi Operasional dan SDM dengan program pelatihan berkala secara nasional dan regional.</p>	
5	Rekomendasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan BBLBK	Keberadaan Laboratorium hewan coba, sangat dibutuhkan dalam tahap awal penemuan, percobaan dan penelitian-penelitian biomedis dengan menggunakan hewan coba (transpormasi pilar ke 3 sistem ketahanan kesehatan). Hewan coba masih diperlukan untuk melakukan uji coba dan pengumpulan data dalam berbagai penelitian-penelitian penyakit infeksius maupun non-infeksius maupun pengujian vaksin (mendukung transpormasi pilar ke 1 layanan primer dan preventif). Keberadaan lab hewan yang masih sangat jarang di Indonesia. Gedung laboratorium hewan coba yang berada di satu lokasi dengan Universitas dan UPT yang menggunakan hewan coba sebagai objek (IPB, BRIN, RS, dan Lembaga Riset serta laboratorium besar) memudahkan koordinasi antar instansi dan individu yang menggunakan hewan coba.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Penguatan Peran Strategis Laboratorium dalam Kebijakan Kesehatan Kehadiran Analis Kebijakan di BBLBK diharapkan mampu menjembatani hasil teknis laboratorium dengan proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Ini akan menjadikan BBLBK tidak hanya sebagai institusi teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam sistem kesehatan nasional. 2. Peningkatan Kualitas Rekomendasi dan Advokasi Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy). 3. Optimalisasi Fungsi Tanggap Darrat dan Respons Wabah. 4. Penyusunan Kebijakan Internal dan Perencanaan Berbasis Bukti. 5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Program. 6. Dukungan terhadap Harmonisasi Kebijakan Lintas Sektor dan Mitra Internasional. 	BBLBK, Dirjen Kesprimkom.

Capaian IKK jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium ini mengakomodir 4 fungsi Labkesmas, meliputi:

- 1) Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon, wabah dan bencana;
- 2) Pengelolaan dan analisis data laboratorium analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium;
- 3) Pengembangan teknologi tepat guna; dan
- 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Untuk mencapai target jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium, beberapa kegiatan yang dilakukan, meliputi:

- 1) Penguatan Sistem Informasi Surveilans
 - Meningkatkan integrasi data melalui pengembangan dan optimalisasi aplikasi seperti Laboratory Information Management System (LIMS).
 - Memastikan laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) di tingkat daerah terkoneksi dengan sistem pusat untuk mempercepat pelaporan dan analisis data.
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Melakukan pelatihan bagi tenaga surveilans dan analisis laboratorium terkait prosedur dan protokol surveilans berbasis laboratorium.
 - Memberikan bimbingan teknis tentang analisis data, interpretasi hasil, dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti.
- 3) Penguatan Kapasitas Laboratorium
 - Memastikan laboratorium memiliki fasilitas, peralatan, dan bahan habis pakai yang memadai untuk mendukung pengujian dan surveilans.
 - Melakukan sertifikasi dan akreditasi laboratorium sesuai standar nasional dan internasional.
- 4) Pengumpulan dan Analisis Data yang Cepat dan Akurat
 - Melaksanakan survei lapangan atau pengumpulan spesimen dari wilayah-wilayah strategis.
 - Menggunakan data real-time untuk menganalisis tren penyakit dan mendeteksi ancaman kesehatan masyarakat.
- 5) Koordinasi dan Kolaborasi Antar-Instansi
 - Mengadakan pertemuan rutin dengan stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, institusi kesehatan, dan mitra internasional.
 - Menyusun rekomendasi bersama berdasarkan hasil surveilans untuk langkah intervensi yang efektif.

- 6) Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
 - Menyusun laporan hasil surveilans yang komprehensif dan berbasis data untuk mendukung pengambilan kebijakan.
 - Mengirimkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.
- 7) Evaluasi dan Monitoring Berkesinambungan
 - Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan surveilans untuk mengetahui efektivitas dan kendala.
 - Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki metode dan sistem surveilans di masa depan.

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas surveilans sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan berdampak dalam pengendalian penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, penguatan surveilans yang adekuat menjadi salah satu sasaran strategis yang krusial dalam program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Surveilans yang efektif memerlukan dukungan penuh, salah satunya dari laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) sebagai pilar utama dalam menyediakan data yang akurat, cepat, dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan surveilans berbasis laboratorium menjadi fokus utama dalam mencapai sasaran program ini. Penguatan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten dalam penyelenggaraan Labkesmas di seluruh tingkat layanan juga menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Keterbatasan atau faktor penghambat yang ditemui dalam pencapaian target IKK jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium ini, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai masih menjadi tantangan dalam implementasi di berbagai daerah.
2. Kesenjangan infrastruktur antarwilayah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, dapat menghambat penerapan standar yang seragam.
3. Koordinasi lintas sektor dan antar instansi seringkali menghadapi hambatan birokrasi yang memperlambat respons dan pelaksanaan kebijakan.
4. Perubahan kebijakan yang bersifat dinamis dan adanya ketergantungan pada komitmen politik dapat mempengaruhi keberlanjutan program dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi

yang tepat untuk mengatasi keterbatasan tersebut guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Pemecahan masalah dan tindak lanjut yang dilakukan atas faktor penghambat yang ditemui dalam proses pencapaian target IKK jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium ini, antara lain:

1. Optimalisasi anggaran dan penguatan SDM, melalui:
 - Memprioritaskan kegiatan dengan dampak tinggi dalam penggunaan anggaran.
 - Mengajukan usulan tambahan anggaran melalui skema dana hibah atau kerja sama dengan lembaga donor.
 - Memberdayakan tenaga kontrak/PPNPN untuk memenuhi kebutuhan SDM jangka pendek.
 - Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan workshop berbasis kompetensi.
 - Penggunaan teknologi, seperti sistem digital atau otomatisasi, untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.
2. Peningkatan infrastruktur dan strategi pendekatan wilayah, melalui:
 - Pengajuan program khusus untuk pengembangan infrastruktur di daerah terpencil melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
 - Penggunaan teknologi alternatif seperti telemedicine atau drone untuk mengatasi keterbatasan fisik.
 - Identifikasi daerah prioritas dengan kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur.
 - Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi internasional untuk pengadaan peralatan dan fasilitas.
3. Simplifikasi prosedur dan peningkatan koordinasi, melalui:
 - Menyederhanakan proses perizinan atau pelaksanaan program melalui revisi regulasi.
 - Penggunaan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi dan pengambilan keputusan lintas sektor secara lebih cepat.
 - Pembentukan tim lintas sektor yang bertugas khusus menangani hambatan koordinasi.
 - Pertemuan rutin dan forum komunikasi untuk memetakan solusi bagi hambatan birokrasi.
4. Stabilitas kebijakan, advokasi dan edukasi, melalui:
 - Membuat kebijakan yang berbasis data dan bukti sehingga dapat bertahan meskipun ada perubahan politik.
 - Menetapkan peraturan yang mengikat dan berjangka panjang melalui regulasi tingkat tinggi seperti undang-undang.

- Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan untuk memperkuat dukungan politik terhadap program.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di berbagai daerah.

h) Justifikasi Capaian Melebihi Target

Justifikasi mengapa capaian IKK jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dapat melebihi target, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Laboratorium:

- Adanya peningkatan kapasitas di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK), termasuk penggunaan teknologi modern seperti *Laboratory Information Management System* (LIMS), memungkinkan analisis data lebih cepat dan akurat.
- Pelatihan intensif yang diberikan kepada tenaga laboratorium meningkatkan kemampuan mereka dalam mendukung pengambilan data dan analisis surveilans.

2. Integrasi Data yang Lebih Baik:

- Penguatan integrasi data antar-laboratorium dan peningkatan koordinasi antar-unit kerja menghasilkan pengumpulan data yang lebih komprehensif.
- Pemanfaatan platform digital dalam surveilans berbasis laboratorium mempercepat proses pengolahan data untuk menghasilkan rekomendasi.

3. Kerja Sama Lintas Sektor:

- Koordinasi yang lebih baik antara laboratorium dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendukung penyampaian data yang lebih luas dan relevan untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti.
- Kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi internasional berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan surveilans, baik dari segi pendanaan maupun teknis.

4. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Pemangku Kebijakan:

- Dukungan dari pemangku kebijakan yang semakin kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah, meningkatkan alokasi sumber daya dan melibatkan instansi dalam surveilans berbasis laboratorium.
- Tingginya kebutuhan akan data berbasis laboratorium untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan kesehatan mendorong percepatan pelaksanaan surveilans.

5. Adanya Perubahan Situasi Kesehatan:

- Peningkatan kasus penyakit tertentu, seperti penyakit menular, mendorong kebutuhan lebih banyak surveilans berbasis laboratorium untuk mengidentifikasi penyebab, pola, dan penyebaran penyakit.

- Kondisi darurat kesehatan atau wabah lokal dapat memicu pelaksanaan surveilans tambahan yang menghasilkan rekomendasi lebih banyak dari yang diperkirakan.
- 6. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi:
 - Inovasi dalam metode surveilans, seperti penggunaan teknologi diagnostik yang lebih cepat dan canggih, memungkinkan pengumpulan data dan analisis yang lebih efisien.
 - Optimalisasi sumber daya lokal (seperti media pemeriksaan atau reagen buatan dalam negeri) mendukung peningkatan kapasitas laboratorium untuk menghasilkan rekomendasi lebih cepat.
- 7. Monitoring dan Evaluasi yang Efektif:
 - Monitoring berkala terhadap pelaksanaan surveilans memastikan target dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
 - Evaluasi yang terus dilakukan memungkinkan identifikasi celah dalam proses, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk meningkatkan kinerja.

Keseluruhan faktor ini berkontribusi pada pencapaian indikator yang melampaui target, sekaligus mencerminkan upaya yang lebih baik dalam pengelolaan surveilans berbasis laboratorium untuk mendukung sistem kesehatan nasional.

2) Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel

a) Definisi Operasional

1. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk *new emerging* dan *re-emerging*, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
2. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain berbasis laboratorium.
3. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau pengujian sampel mencakup spesimen dan/atau sampel yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit dalam periode 1 (satu) semester.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan dalam pencapaian target IKK jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel adalah melalui penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

Persentase Capaian IKK =

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Pemeriksaan spesimen klinis atau sampel dalam 1 tahun}}{\sum \text{Target pemeriksaan spesimen klinis atau sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{10.189}{10.000} \times 100\% \\ &= 101,89\% \end{aligned}$$

c) Analisis Capaian Kinerja

Sebagai institusi yang berperan strategis dalam mendukung sistem surveilans berbasis laboratorium, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kapasitas deteksi laboratorium penyakit menular di Indonesia. Salah satu indikator utama dari kinerja BBLBK pada tahun 2025 adalah target pemeriksaan sebanyak 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel. Spesimen yang diperiksa merupakan spesimen yang berasal dari kiriman berbagai provinsi dan fasilitas kesehatan daerah. Setiap spesimen yang diperiksa menjadi data penting dalam mengidentifikasi potensi wabah, mendeteksi patogen baru, dan memahami pola penyebaran penyakit di berbagai wilayah.

Selain itu, pemeriksaan spesimen ini juga berperan dalam mendukung pendekatan surveilans berbasis laboratorium yang terintegrasi. Data hasil pemeriksaan digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini terhadap ancaman kesehatan masyarakat, seperti penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah. Dalam prosesnya, BBLBK juga berkolaborasi dengan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat, institusi pemerintah, dan lembaga internasional untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap setiap temuan kritis penyakit potensi wabah.

Pencapaian kinerja jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel adalah melalui penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel ini mengakomodir 3 fungsi BBLBK sebagai Labkesmas, antara lain:

- 1) Pemeriksaan spesimen klinik
- 2) Pengujian sampel
- 3) Pengelolaan logistik khusus laboratorium

Capaian IKK jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel balai besar laboratorium biologi kesehatan semester I tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Capaian IKK Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah
1	CAM – Campak	2412
2	POL – Polio	1827
3	DIF – Difteri	423
4	PCA – PME Campak Rubella	159
5	CRS – IgM & IgG Rubella	39

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah
6	JEP – JapaneseEncephalitis	48
7	PLK – Polio Lingkungan	14
8	PDI – PME Difteri	10
9	AVI – Avian Influenza	53
10	PER – Pertusis	1160
11	ILI	1411
12	SAR – SARI	2010
13	SIN – Sindrom	219
14	WGS	95
15	MER – Mers-cov	65
16	PMO – PME Monkeypox	26
17	HFM – HFMD	13
18	RAB – Rasbies	6
19	COV – Covid-19	2
20	RCK – Rickettsia	1
21	S3A – Dengue, Zika, Chikungunya	1
22	PMI – PME Influenza	4
23	LGL – Legionella	10
24	MLR – Malaria	82
25	ZNK – Zink	62
26	RET – Retinol	49
27	PMP – PME Proksimat	2
JUMLAH		10.189
TARGET		10.000
ANALISIS CAPAIAN		Melebihi Target
		Melebihi Target

Dengan pendekatan yang holistik, pencapaian melebihi target ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia. BBLBK terus berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai pusat unggulan dalam surveilans laboratorium kesehatan, memastikan bahwa setiap spesimen yang diperiksa menjadi landasan penting bagi pengambilan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKK jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel balai besar laboratorium biologi kesehatan tahun 2025, antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur Laboratorium:

- Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas laboratorium untuk memastikan ketersediaan alat dan perlengkapan yang sesuai standar.

- Pengadaan reagen, bahan habis pakai, dan media pemeriksaan yang mencukupi untuk menunjang pemeriksaan spesimen.
- 2. Optimalisasi Sistem Informasi Laboratorium:
 - Penggunaan *Laboratory Information Management System* (LIMS) untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan data spesimen dan hasil pemeriksaan.
 - Integrasi data antar-laboratorium untuk mendukung proses pemeriksaan spesimen secara efisien.
- 3. Pelaksanaan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM:
 - Pelatihan teknis bagi tenaga laboratorium untuk meningkatkan keterampilan dalam pengujian spesimen.
 - Penyegaran rutin terhadap metode dan protokol pemeriksaan yang relevan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4. Kerja Sama dan Koordinasi Lintas Instansi:
 - Kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan (seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik) untuk memastikan alur pengiriman spesimen klinis berjalan lancar.
 - Koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mendukung pengiriman dan pengujian spesimen.
- 5. Penguatan Manajemen Spesimen:
 - Pengaturan jadwal penerimaan spesimen untuk menghindari penumpukan dan memastikan setiap spesimen dapat diproses tepat waktu.
 - Penyediaan transportasi khusus untuk pengiriman spesimen klinis dari daerah terpencil ke laboratorium pusat.
- 6. Pelaksanaan Surveilans Aktif:
 - Surveilans berbasis laboratorium untuk pengambilan spesimen dari lokasi prioritas (misalnya, daerah dengan potensi wabah atau peningkatan kasus penyakit tertentu).
 - Penyelenggaraan surveilans sentinel untuk penyakit menular tertentu yang memerlukan pemeriksaan laboratorium.
- 7. Monitoring dan Evaluasi Proses Pemeriksaan:
 - Pemantauan harian jumlah spesimen yang diterima dan diperiksa untuk memastikan pencapaian target.
 - Evaluasi rutin terhadap hambatan yang muncul selama proses pemeriksaan spesimen dan penerapan solusi segera.
- 8. Peningkatan Jaringan Laboratorium Kesehatan Masyarakat:
 - Pengembangan dan pemberdayaan laboratorium di daerah untuk mendukung pemeriksaan spesimen secara desentralisasi.
 - Pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis kepada laboratorium daerah untuk meningkatkan jumlah spesimen yang dapat diperiksa.
- 9. Promosi dan Edukasi:

- Penyuluhan kepada fasilitas pelayanan kesehatan tentang pentingnya pengiriman spesimen klinis untuk pemeriksaan.
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium dalam mendukung diagnosis penyakit.

10. Strategi Pendekatan Prioritas:

- Fokus pada jenis spesimen dan penyakit tertentu yang menjadi prioritas nasional, seperti penyakit menular (difteri, TBC, HIV/AIDS) atau penyakit tidak menular yang membutuhkan surveilans berbasis laboratorium.

Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara terintegrasi dan sistematis, target pemeriksaan 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel dapat tercapai secara efektif.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target pemeriksaan ini tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara BBLBK dengan laboratorium jejaring dan fasyankes di seluruh Indonesia. Melalui pelatihan rutin, bimbingan teknis, dan pengawasan yang berkelanjutan, BBLBK berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi laboratorium di tingkat regional dan lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap spesimen yang dikumpulkan dari berbagai wilayah dapat diolah dengan metode yang standar dan menghasilkan data yang dapat diandalkan.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian target pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya:

- Kekurangan tenaga laboratorium terampil untuk menangani volume spesimen yang tinggi.
- Terbatasnya anggaran untuk pengadaan reagen, bahan habis pakai, dan peralatan laboratorium.

2. Infrastruktur yang Tidak Memadai:

- Keterbatasan kapasitas laboratorium untuk menangani spesimen dalam jumlah besar.
- Kondisi fasilitas yang kurang optimal, seperti alat yang rusak atau teknologi yang sudah usang.

3. Kesulitan dalam Pengelolaan Spesimen:

- Keterlambatan pengiriman spesimen dari fasilitas kesehatan ke laboratorium, terutama dari daerah terpencil atau sulit dijangkau.
- Kualitas spesimen yang buruk akibat penyimpanan atau transportasi yang tidak memenuhi standar.

4. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:

- Hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antara laboratorium dengan fasilitas kesehatan atau instansi terkait.
 - Tidak adanya sistem alur pengiriman spesimen yang terintegrasi secara nasional.
5. Kesenjangan Geografis:
- Jarak dan aksesibilitas yang sulit di wilayah terpencil atau kepulauan yang memengaruhi pengiriman spesimen.
 - Ketimpangan infrastruktur laboratorium di berbagai wilayah, khususnya di daerah tertinggal.
6. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi:
- Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan spesimen laboratorium.
 - Minimnya pengambilan spesimen di lapangan akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi.
7. Gangguan Operasional:
- Gangguan teknis, seperti kerusakan alat laboratorium atau sistem teknologi informasi (LIMS) yang tidak berjalan optimal.
 - Ketergantungan pada pasokan reagen impor yang sering mengalami keterlambatan atau kendala logistik.
8. Masalah Administrasi dan Regulasi:
- Proses administrasi yang birokratis dan memakan waktu untuk pengadaan alat atau bahan laboratorium.
9. Dinamika Penyakit dan Wabah:
- Lonjakan kasus penyakit tertentu yang tidak terduga sehingga menambah beban kerja laboratorium.
 - Fokus yang terpecah pada penanganan wabah lain, sehingga target spesimen klinis tidak tercapai.
10. Keterbatasan Sistem Monitoring dan Evaluasi:
- Kurangnya sistem yang efektif untuk monitoring jumlah spesimen yang diterima dan diperiksa secara berkala.
 - Tidak adanya mekanisme umpan balik yang cepat untuk mengatasi permasalahan di lapangan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan strategi mitigasi seperti peningkatan kapasitas laboratorium, penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi teknologi, serta penyediaan sumber daya yang memadai.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Tindak lanjut atas faktor penghambat dalam pencapaian target pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya:

- Penambahan tenaga laboratorium: Rekrutmen tenaga ahli laboratorium baru atau peningkatan kompetensi tenaga yang ada melalui pelatihan teknis secara berkala.
 - Optimalisasi anggaran: Mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan reagen, bahan habis pakai, dan pemeliharaan alat laboratorium.
2. Infrastruktur yang Tidak Memadai:
- Modernisasi fasilitas laboratorium: Pengadaan peralatan baru yang sesuai dengan kebutuhan serta perbaikan peralatan yang rusak.
 - Peningkatan kapasitas laboratorium: Membangun atau memperluas laboratorium di wilayah dengan jumlah spesimen tinggi.
3. Kesulitan dalam Pengelolaan Spesimen:
- Peningkatan sistem transportasi spesimen: Mengembangkan jaringan transportasi yang cepat dan efisien, terutama untuk wilayah terpencil.
 - Sosialisasi standar pengelolaan spesimen: Edukasi kepada fasilitas kesehatan mengenai cara penyimpanan dan pengiriman spesimen yang sesuai dengan standar.
4. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi:
- Pembentukan tim koordinasi khusus: Tim lintas instansi untuk memastikan pengiriman spesimen dan pengawasan pemeriksaan berjalan lancar.
 - Integrasi sistem informasi: Menghubungkan laboratorium dan fasilitas kesehatan melalui aplikasi LIMS (*Laboratory Information Management System*).
5. Kesenjangan Geografis:
- Pembangunan laboratorium regional: Membuka cabang laboratorium di daerah strategis untuk mendekatkan layanan dengan lokasi pengambilan spesimen.
 - Pemanfaatan teknologi jarak jauh: Penggunaan teknologi telelaboratorium untuk mendukung pengolahan data dari daerah terpencil.
6. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi:
- Kampanye edukasi: Meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis dan surveilans.
 - Peningkatan sosialisasi: Melibatkan tenaga kesehatan dan masyarakat untuk aktif dalam proses pengambilan spesimen.
7. Gangguan Operasional:
- Peningkatan pemeliharaan alat: Membentuk tim teknis pemeliharaan peralatan secara berkala untuk mencegah kerusakan.
 - Diversifikasi sumber reagen: Mengurangi ketergantungan pada impor dengan memanfaatkan produk dalam negeri.

8. Masalah Administrasi dan Regulasi:
 - Simplifikasi prosedur administrasi: Mempercepat proses pengadaan alat dan bahan melalui sistem yang lebih sederhana dan transparan.
9. Dinamika Penyakit dan Wabah:
 - Manajemen beban kerja: Menyusun prioritas pemeriksaan spesimen berdasarkan tingkat urgensi.
 - Peningkatan fleksibilitas operasional: Menyiapkan tim respons cepat untuk menangani lonjakan kasus penyakit tertentu.

10. Keterbatasan Sistem Monitoring dan Evaluasi:

- Penguatan monitoring: Mengembangkan sistem monitoring real-time untuk melacak jumlah spesimen yang diterima dan diperiksa.
- Evaluasi berkala: Melakukan evaluasi rutin terhadap hambatan yang dihadapi untuk perbaikan di masa mendatang.

Tindak lanjut ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi, meningkatkan efisiensi operasional laboratorium, serta memastikan target pemeriksaan spesimen tercapai sesuai dengan rencana.

h) Justifikasi Capaian Melebihi Target

Justifikasi capaian melebihi target pemeriksaan 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel, antara lain:

1. Peningkatan Permintaan Pemeriksaan:
 - Meningkatnya jumlah kasus penyakit tertentu atau wabah di masyarakat menyebabkan lonjakan permintaan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel.
 - Adanya program prioritas kesehatan, seperti surveilans penyakit menular, yang memerlukan pemeriksaan laboratorium lebih intensif.
2. Optimalisasi Sumber Daya Laboratorium:
 - Penggunaan sistem manajemen laboratorium yang lebih efisien, seperti LIMS (*Laboratory Information Management System*), meningkatkan produktivitas dan kapasitas pemeriksaan.
 - Pemanfaatan tenaga laboratorium secara optimal melalui penjadwalan kerja yang efektif, termasuk lembur atau operasional di luar jam kerja reguler.
3. Dukungan Teknologi dan Infrastruktur:
 - Modernisasi peralatan laboratorium meningkatkan kecepatan dan akurasi pemeriksaan spesimen.
 - Perbaikan infrastruktur logistik, termasuk sistem transportasi spesimen, mempercepat pengiriman dan pengolahan sampel.
4. Kerjasama Lintas Sektor:

- Koordinasi yang baik dengan fasilitas kesehatan di berbagai daerah meningkatkan pengiriman spesimen ke laboratorium.
 - Kemitraan dengan lembaga lain, seperti universitas atau organisasi kesehatan, untuk mendukung pemeriksaan spesimen tambahan.
5. Sosialisasi dan Kampanye:
- Peningkatan kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium menyebabkan lebih banyak spesimen dikirim untuk diuji.
 - Pelaksanaan program edukasi terkait manfaat surveilans laboratorium juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah spesimen yang diperiksa.
6. Manajemen Wabah atau Kejadian Luar Biasa:
- Respon terhadap wabah atau kejadian luar biasa kesehatan (KLB) meningkatkan volume spesimen yang harus diperiksa untuk diagnosis dan pemantauan epidemiologi.
 - Program pengendalian penyakit tertentu, seperti tuberkulosis, HIV, atau malaria, yang intensif pada tahun tersebut.
7. Pendekatan Fleksibel terhadap Target:
- Laboratorium menerapkan strategi fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari program kesehatan nasional atau daerah, sehingga jumlah spesimen yang diperiksa melampaui target awal.
- Capaian yang melebihi target menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi sumber daya, teknologi, dan koordinasi. Hal ini mencerminkan kemampuan laboratorium untuk beradaptasi terhadap tantangan kesehatan masyarakat serta memenuhi kebutuhan pelayanan yang lebih besar dari perkiraan.

3) Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas

a) Definisi Operasional

1. Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan.
2. Sasaran pembinaan:
 - a. Labkesmas Tingkat 4, Labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2.
 - *) Khusus UPT Balai Labkesmas Papua ditambahkan sasaran 10% Labkesmas tingkat 1 (karena belum memiliki Labkesda Kabupaten/Kota)
 - b. Labkesmas Tingkat 5 Labkesmas Regional mencakup 11 Labkesmas Koordinator Regional dan 10 Labkesmas Tingkat 4 lainnya.

3. Metode bimbingan teknis: pendampingan/koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/ pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 kali dalam setahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas.
4. Ruang lingkup pembinaan Labkesmas Tingkat 5 untuk BBLBK adalah pemeriksaan spesimen klinis
5. Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas.
6. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah presentase labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan capaian IKK bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah Jumlah labkesmas Tingkat 4 yang dilaksanakan bimbingan teknis sesuai ruang lingkup oleh UPT Labkesmas dibagi jumlah seluruh Labkesmas Tingkat 4 dalam kurun waktu 1 (satu) semester dikalikan 100%.

Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah persentase labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis. Cara penghitungan capaian IKK dari indikator persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas yaitu :

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Bimtek dalam 1 tahun}}{\sum \text{Target pelaksanaan bimtek}} \times 100\% \\ &= \frac{21}{21} \times 100\% \\ &= 100,0\% \end{aligned}$$

c) Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas mengakomodir 2 fungsi Labkesmas, meliputi:

1. Komunikasi dengan pemangku kepentingan
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) berkomitmen untuk mencapai target kinerja berupa 100% bimbingan teknis yang dilaksanakan secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Labkesmas. Target ini mencerminkan peran strategis Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dalam memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas bagi laboratorium kesehatan masyarakat binaannya. Ada 21 Labkesmas Regional yang menjadi ampunan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan terkait bimbingan teknis. Pada implementasinya tidak hanya Labkesmas yang menjadi binaan, namun beberapa Rumah Sakit dan Laboratorium daerah dan swasta juga menjadi pembinaan terkait PME.

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa laboratorium jejaring mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, baik secara nasional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pemberdayaan sumber daya manusia, penguatan sistem kerja, asistensi teknis terkait pemeriksaan laboratorium dan PME serta adopsi teknologi terbaru untuk mendukung layanan laboratorium yang efisien dan akurat. Daftar kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sepanjang tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5. Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

No	Jenis Bimbingan Teknis	UPT Labkesmas / Instansi	Jumlah UPT
1.	Bimtek Wabah ISPA dan HMPV	Seluruh Labkesmas Regional	22
2.	Kegiatan OJT K3 dan Pengelolaan Limbah dan Biorepositori	BLKM Manado	1
3.	Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di regional 1, 2, dan 3	BLKM Banda Aceh, BLKM Medan, BLKM Batam, BBLKM Palembang, BLKM Palembang, dan BLKM Baturaja	6
4.	Kegiatan Sosialisasi Kajian Suhu Pengiriman Spesimen ILI-SARI	6 Labkesmas : BBLKM Banjar Baru, BBLKM Makassar, BBLKM Surabaya, BBLKM Palembang, BLKM Manado, BLKM Makassar 5 Rumah Sakit : RSUD Dr. Jusuf SK, RSUD Undata, RSUD Prov NTB, RSUD Depati Bahrin, RSUD Hasri Ainun Habibie 5 Puskesmas: PKM Karang Rejo, PKM Birobuli, PKM Karang Taliwang, PKM Pemali, PKM Kabilah.	6 5 5
5.	Bimtek Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 untuk Penyakit	Labkesda Prov. Sumatera Utara dan BLKM Medan	2

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

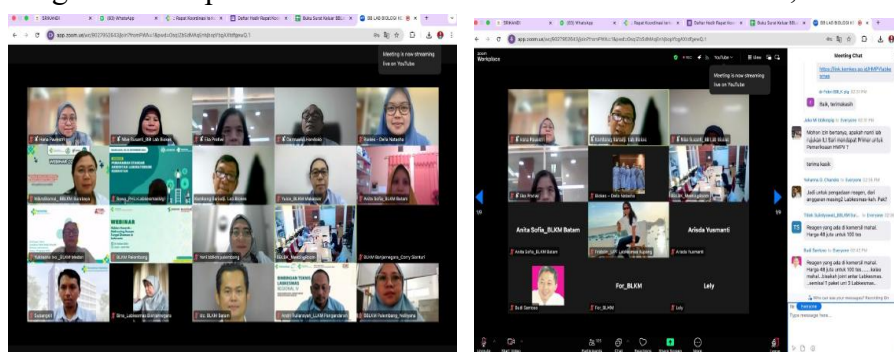
No	Jenis Bimbingan Teknis	UPT Labkesmas / Instansi	Jumlah UPT
		Maybrat, PKM Kab. Raja Ampat, PKM Kab. Sorong Selatan, PKM Kab. Tambraw, PKM Kab. Monokwari, PKM Kab. Monokwari Selatan, PKM Kab. Fak-fak, PKM Kab. Kaimana, PKM Kab. Pegunungan Arfak, PKM Kab. Teluk Bintuhi, PKM Kab. Wondama.	
		1 Labkesma Tier 3 Prov. Papua	1
		6 Dinkes Prov : Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan.	6
		2 BKK : BKK Kelas I Jayapura, BKK Kelas II Merauke	2
11.	Melaksanakan Supervisi dalam Rangka Monev dan Valdat Malaria Plasmodium knowlesi dan Penjaminan Mutu Pemeriksaan Laboratorium PK	BLKM Banda Aceh	1
12.	Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 6 dan 7.	BBLKM Surabaya, Loka LKM Waikabubuk, BBLKM Banjarbaru, Loka LKM Tanah Bumbu	4
13.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Labkesmas Dalam Pemeriksaan Malaria dan Pengendalian Vektor di Wilayah Regional 7	3 Labkes Prov : Labkes Prov. Kalimantan Selatan, Labkes Prov. Kalimantan Tengah, Labkes Prov. Kalimantan Timur.	3
		21 Labkesda : Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Paser, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kota Palangkaraya, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara, Kab. Kapuas, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab Seruyan.	21
14.	Bimtek Pelatihan Penyegaran Tenaga Mikroskopis.	Labkes Kab. Timor Tengah Selatan, PKM Kab. Timor Tengah Selatan, UPTD Latnakes Kab. Timor Tengah Selatan	3
15.	Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria bagi tenaga uji silang Kabupaten/Kota Jayapura.	Petugas Uji Silang dari Prov. Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.	1

No	Jenis Bimbingan Teknis	UPT Labkesmas / Instansi	Jumlah UPT
16.	Bimtek Labkesmas Tingkat 4 bagi Labkesmas Tingkat 3, 2, 1 di Wilayah Regional 10.	2 Dinkes : Dinkes Prov Maluku, Dinkes Prov Maluku Utara 3 Rumah Sakit : RSUP Dr. J Leimena Kota Ambon, RSUD Dr. M Haulussy Kota Ambon, RSUD Dr.H.Chasan Boesoirie 2 Labkes Prov : Labkesda Prov Maluku, Labkesda Prov. Maluku Utara 3 Labkesda Kota : Labkesda Kota Ambon, Labkesda Kota Tual, Labkesda Kota Ternate 12 Puskesmas : PKM Lateri, PKM Air Salobar, PKM Suli, PKM Hutumury, PKM Rijali, PKM Rumahtiga, PKM Waihaong, PKM Air Besar, PKM Karpan, PKM Un, PKM Kalumata, PKM Siko.	2 3 2 3 12

Berikut disampaikan beberapa dokumentasi pada saat kegiatan bimbingan teknis berlangsung.

1) Bimbingan Teknis untuk Wabah ISPA dan HMPV

Dalam kegiatan persiapan Labkesmas terkait adanya peningkatan kasus Human Metapneumovirus (HMPV) di China yang mungkin dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di Indonesia, pada Senin 13 Januari 2025 dilakukan pertemuan rapat koordinasi membahas tatalaksana pengambilan spesimen serta alur pemeriksaan spesimen HMPV secara daring. Kepala Instalasi Biorepositori Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Ibu Eka Pratiwi, S.Si, M.Biomed, berkesempatan menjadi narasumber pada bimbingan teknis wabah ISPA dan HMPV oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta. Materi yang dibawakan adalah pengambilan spesimen. Kepala Instalasi Biomolekuler dan Genomik BBLBK, ibu dr. Hana A. Pawestri, S,Si, MSc membawakan materi mengenai Pemaparan Alur dan Teknis Pemeriksaan HMPV, dan Kepala



Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah BBLBK, Ibu Nike Susanti, S.Si membawakan materi mengenai Biosafety dan Biosecurity Pemeriksaan HMPV.

Gambar 3. 1. Bimbingan Teknis untuk Wabah ISPA dan HMPV

2) Kegiatan OJT K3 dan Pengelolaan Limbah dan Biorepositori

Dalam rangka peningkatan SDM K3, Pengolahan Limbah dan Biorepositori di Balai Labkesmas Manado, maka bersama ini kami mohon untuk dapat melakukan On Job Training (OJT) di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Rencana On Job Training (OJT) akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025, Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BLKM Manado, Kepala Instalasi K3, Limbah dan Biorepositori BLKM Manado beserta anggotanya, Kepala BBLBK, Kepala Sub.Bagian Administrasi Umum BBLBK, Katimker Mutu, SDM, dan Kemitraan BBLBK, Katimker Program dan Layanan BBLBK, Kepala Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah BBLBK beserta anggota dan Kepala Instalasi Biorepositori BBLBK beserta anggota.

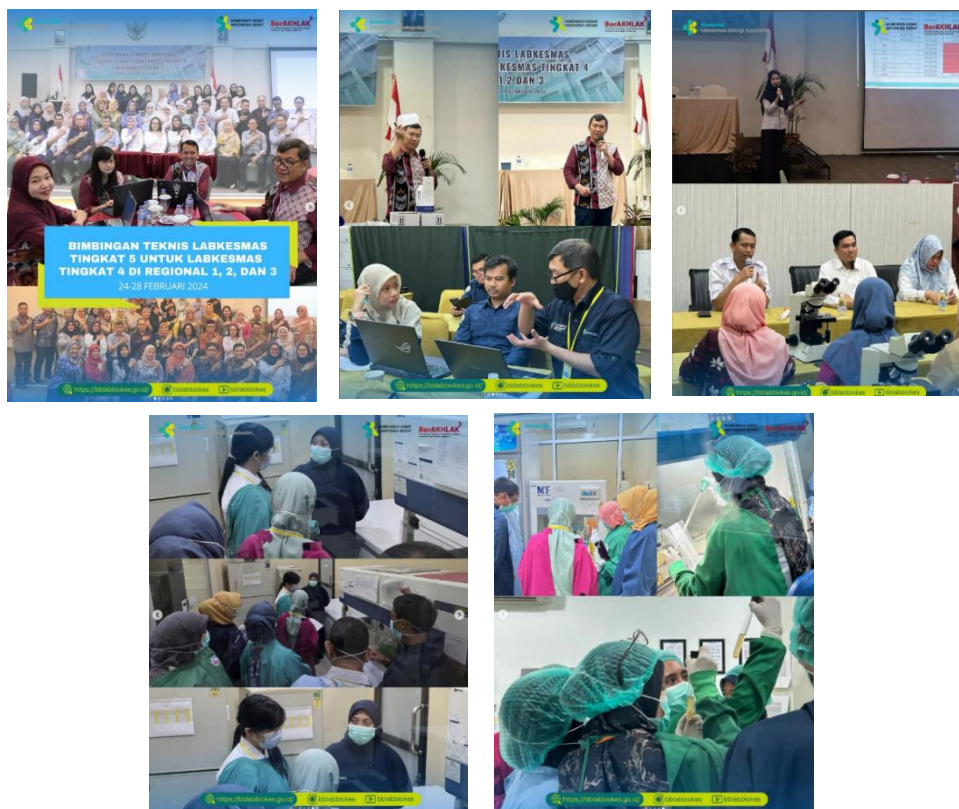
Pemaparan pertama dilakukan oleh Timker Mutu, SDM dan Kemitraan yaitu mengenai SDM yang ada di BBLBK serta terkait standar mutu yang ada di laboratorium. Kemudian dilanjutkan oleh Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah BBLBK yaitu terkait Biosafety laboratorium dan Biosecurity laboratorium, dan pemaparan terakhir oleh Instalasi Biorepositori mengenai manajemen penyimpanan spesimen. Kegiatan dilanjutkan dengan visitasi ke area laboratorium. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai sistem alur penerimaan spesimen sampai dengan keluar hasil berdasarkan sisi Biosafety dan Biosecurity.



Gambar 3. 2. Kegiatan OJT K3 dan Pengelolaan Limbah dan Biorepositori

3) Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di regional 1, 2, 3

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) ikut berpartisipasi sebagai nasarasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 1,2, dan 3 pada tanggal 24-28 Februari 2025 di Palembang. Kegiatan ini di selenggarakan oleh Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer bekerja sama dengan Global Fund. Bimbingan teknis ini diikuti oleh BLKM Banda Aceh, BLKM Medan, BLKM Batam, BBLKM Palembang, BLKM Palembang, dan BLKM Baturaja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial laboratorium dalam berbagai aspek, seperti transportasi spesimen infeksius, fungsi biorepositori Labkesmas tingkat 4 dalam mendukung Program Pengendalian Malaria dan keamanan pangan terkait keracunan makanan yg bersumber dari bakteri patogen. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam menjalankan fungsi-fungsi Labkesmas secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pengendalian penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia.



Gambar 3. 3. Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di regional 1, 2, dan 3

4) Bimtek Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 untuk Penyakit Potensial Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV)

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Laboratorium Nasional, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan bersama dengan Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer melaksanakan Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 sesuai KMK Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 dalam Implementasi Standar Pelayanan untuk Penyakit Potensial Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV) di dua tempat yaitu Labkesmas Medan, Labkesda Prov Sumatera Utara dan Labkesmas Surabaya, Labkesda Prov Jawa Timur pada tanggal 14-18 April 2025.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menilai dan memperkuat implementasi standar pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tingkat 3 dan Tingkat 4 dalam mendukung deteksi, surveilans, dan respon penyakit menular, termasuk Flu Burung, Pertusis, dan Human Meta Pneumovirus (HMPV), guna meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan masyarakat terhadap ancaman penyakit berpotensi KLB dan wabah. Berdasarkan hasil observasi dan penilaian yang dilakukan, sebagai rencana tindak lanjut yaitu agar Labkesda Provinsi dan Balai Labkesmas melakukan

upaya pemenuhan sumber daya dan pelayanan tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan kepada Labkesmas Tingkat 5 (Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan) serta Kementerian Kesehatan agar terus melakukan koordinasi, pembinaan serta pendampingan dalam penyelenggaraan Labkesmas.



Gambar 3. 4. Bimtek Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 untuk Penyakit Potensial Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV)

5) Bimtek Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 untuk Penyakit Potensial Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV)

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Laboratorium Nasional, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan bersama dengan Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer melaksanakan Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 sesuai KMK Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 dalam Implementasi Standar Pelayanan untuk Penyakit Potensial Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV) di Labkesmas Makassar dan Labkesda Prov Sulawesi Selatan pada tanggal 21-25 April 2025. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengidentifikasi kendala, mengevaluasi pencapaian, dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapabilitas Labkesmas dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) untuk menilai sejauh mana implementasi standar pelayanan di Labkesmas Tingkat 3 dan Tingkat 4 telah dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pemilihan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan adalah pertimbangan geografis terkait pintu masuk negara yang

berkorelasi dengan bandara udara besar sehingga potensi masuk penyakit wabah dari luar bisa lebih cepat. Selain itu Labkesmas tersebut juga mewakili labkesmas yang ada di Indonesia.



Gambar 3. 5. Bimtek Penguatan Labkesmas Tingkat 4 dan 3 untuk Penyakit Potensial Wabah (Flu Burung, Pertusis dan HMPV)

6) Pelaksanaan Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal Pemeriksaan PCR Influenza Terintegrasi COVID-19 Tahun 2025

Pada tanggal 20-23 April 2025 Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai National Influenza Center (NIC) mengadakan Pertemuan Koordinasi Kegiatan Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal Pemeriksaan PCR Influenza Bagi Laboratorium Pemeriksa Spesimen ILI-SARI. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis awal untuk memastikan bahwa laboratorium yang terlibat dalam pemeriksaan spesimen ILI-SARI dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang akurat, valid, dan terpercaya melalui keikutsertaan dalam Uji Profisiensi. Dalam pertemuan ini juga dilakukan sharing informasi kondisi terkini kasus Influenza yang diperiksa, pemantapan mutu yang dilakukan, tantangan dan hambatan yang dihadapi sehingga dapat meningkatkan koordinasi antar laboratorium sentinel ILI-SARI. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laboratorium agar menghasilkan data yang dapat diandalkan, sehingga berkontribusi pada pengawasan dan respon penyakit yang efektif.



Gambar 3. 6. Pelaksanaan Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal Pemeriksaan PCR Influenza Terintegrasi COVID-19 Tahun 2025

7) Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 Batch 1

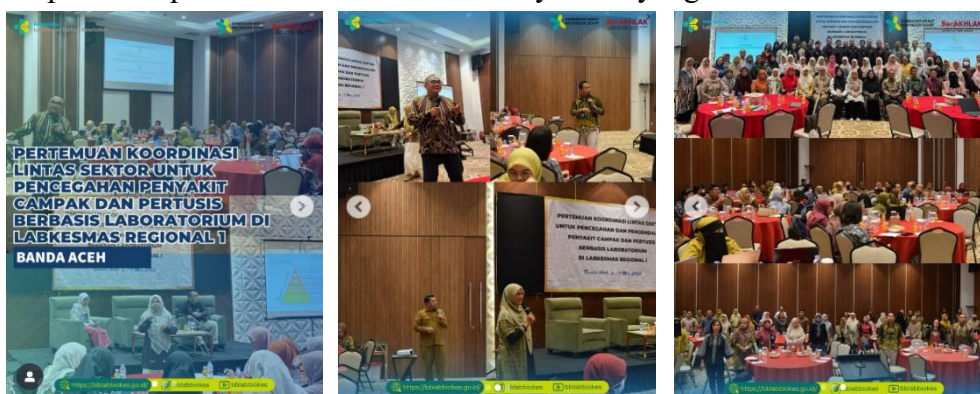
Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) ikut berpartisipasi sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 8, 9, 10 dan 11 yang diselenggarakan pada tanggal 5-10 Mei 2025 di Makassar. Bimbingan teknis ini diikuti oleh BBLKM Makassar, BLKM Makassar, BLKM Manado, BBLKM Ambon dan BLKM Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial laboratorium dalam berbagai aspek, seperti transportasi spesimen infeksius, fungsi biorepositori, pemeriksaan multipatogen saluran pernafasan dan keamanan pangan terkait keracunan makanan yg bersumber dari bakteri patogen. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi-fungsi labkesmas secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang berlaku dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.



Gambar 3. 7. Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 Batch 1

8) Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Campak dan Pertusis Berbasis Laboratorium

Pada tanggal 6–9 Mei 2025, telah berlangsung Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Campak dan Pertusis Berbasis Laboratorium yang diselenggarakan di Hotel Ayani, Banda Aceh. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Aceh dan menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penguatan surveilans laboratorium. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan turut hadir, diwakili langsung oleh Kepala Balai, dr. Darmawali Handoko M.Epid, dan Ibu Yuni Rukmiati, M.Biomed, yang hadir sebagai narasumber. Dengan semangat kolaborasi, pertemuan ini menjadi langkah maju dalam upaya bersama mencegah dan mengendalikan campak serta pertusis demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.



Gambar 3. 8. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Campak dan Pertusis Berbasis Laboratorium

9) Melaksanakan Supervisi dalam Rangka Monev dan Valdat Malaria Plasmodium knowlesi dan Penjaminan Mutu Pemeriksaan Laboratorium PK

Dalam rangka mendukung target eliminasi malaria nasional tahun 2030, perwakilan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) berkesempatan menjadi bagian dari tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Validasi Data Malaria Plasmodium knowlesi dan Penjaminan Mutu Pemeriksaan Laboratorium yang diselenggarakan di Provinsi Aceh pada tanggal 14-17 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penguatan pilar-pilar utama program malaria, khususnya dalam hal sistem diagnosis yang akurat dan andal, guna mendukung upaya nasional menuju eliminasi malaria.



Gambar 3. 9. Melaksanakan Supervisi dalam Rangka Monev dan Validasi Malaria Plasmodium knowlesi dan Penjaminan Mutu Pemeriksaan Laboratorium PK

10) Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 6, 7

Pada tanggal 19-23 Mei 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) turut berpartisipasi sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 6 dan 7 yang bertempat di Surabaya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer bekerja sama dengan Global Fund. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 4 labkesmas di regional 6 dan 7, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal pengetahuan dan kemampuan terkait transportasi spesimen infeksius, biorepositori, keracunan pangan, dan persiapan labkesmas menjadi laboratorium TB. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi-fungsi labkesmas secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang berlaku.



Gambar 3. 10. Bimtek Labkesmas Tingkat 5 untuk Labkesmas Tingkat 4 di Regional 6 dan 7

11) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Labkesmas Dalam Pemeriksaan Malaria dan Pengendalian Vektor di Wilayah Regional 7

Pada 19–23 Mei 2025, BBLKM Banjarbaru menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Labkesmas dalam Pemeriksaan Malaria dan Pengendalian Vektor di Wilayah Regional 7. BBLBK turut berpartisipasi sebagai narasumber, bersama BBLKL, LLKM Tanah Bumbu, Direktorat Penyakit Menular, dan Universitas Lambung Mangkurat. Peserta kegiatan terdiri dari petugas mikroskopis malaria dan petugas surveilans vektor dari Labkesmas tier 2 dan 3 di Regional 7. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan laboratorium malaria, memperkuat efektivitas pengendalian vektor, serta memperkuat jejaring kerja Labkesmas di Regional 7 (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara). Materi yang diberikan meliputi standar pelayanan Labkesmas, kebijakan program malaria, pembacaan sediaan darah malaria, quality assurance laboratorium malaria, survei jentik dan habitat vektor, identifikasi spesies vektor malaria, dan lainnya.



Gambar 3. 11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Labkesmas Dalam Pemeriksaan Malaria dan Pengendalian Vektor di Wilayah Regional 7

12) Bimtek Pelatihan Penyegaran Tenaga Mikroskopis

Dalam rangka mendukung upaya eliminasi malaria di Indonesia, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan turut ambil bagian sebagai fasilitator dalam Pelatihan Penyegaran Tenaga Mikroskopis Malaria yang diselenggarakan pada 11–14 Juni 2025 di Latnakes Kupang, NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga analis dalam membaca dan mengidentifikasi slide malaria secara akurat, peran penting dalam deteksi dini dan penanganan kasus malaria di lapangan. Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten

Timor Tengah Selatan, Latnakes Kupang, serta dukungan dari RAM (Rotarians Against Malaria) – Rotary Australia.



Gambar 3. 12. Bimtek Pelatihan Penyegaran Tenaga Mikroskopis

13) Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria bagi tenaga uji silang Kabupaten/Kota Jayapura

Dalam rangka mendukung upaya eliminasi malaria di Indonesia, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan turut ambil bagian sebagai fasilitator dalam Pelatihan Penyegaran Tenaga Uji Silang Mikroskopis Malaria yang diselenggarakan pada 15–21 Juni 2025 di Hotel Horison Kotaraja Jayapura, Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga analis dalam membaca dan mengidentifikasi slide malaria secara akurat—peran penting dalam deteksi dini dan penanganan kasus malaria di lapangan.



Gambar 3. 13. Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria bagi tenaga uji silang Kabupaten/Kota Jayapura

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Untuk mencapai target pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan, berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan:

1. Penyusunan Pedoman dan Materi Bimtek
 - Membuat modul atau panduan teknis terkait operasional laboratorium kesehatan masyarakat sesuai standar nasional.
 - Menyusun materi pelatihan yang mencakup pengelolaan kualitas laboratorium, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi LIMS, dan pengendalian penyakit berbasis laboratorium.
2. Identifikasi dan Penentuan Wilayah Prioritas
 - Menentukan wilayah binaan prioritas berdasarkan analisis kebutuhan dan kesenjangan kapasitas laboratorium di daerah tersebut.
 - Melakukan pemetaan Labkesmas yang membutuhkan bimbingan teknis lebih intensif.
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lapangan
 - Melaksanakan bimtek langsung di lokasi Labkesmas wilayah binaan untuk memberikan pelatihan on-site.
 - Melibatkan tenaga ahli atau fasilitator dari UPT Labkesmas dalam pelaksanaan bimtek.
 - Memberikan supervisi terkait pengelolaan spesimen, penerapan prosedur standar laboratorium, serta manajemen mutu hasil pemeriksaan.
4. Bimbingan Teknis Daring dan Hibrid
 - Menyelenggarakan bimtek secara daring untuk menjangkau daerah yang sulit diakses atau memiliki kendala transportasi.
 - Menggunakan platform digital untuk mendistribusikan materi dan melaksanakan sesi pelatihan.
5. Pendampingan Berkelanjutan
 - Menyediakan program pendampingan bagi Labkesmas, termasuk diskusi rutin, sesi tanya-jawab, atau kunjungan lapangan secara berkala.
 - Melakukan monitoring terhadap penerapan hasil bimtek melalui evaluasi kinerja Labkesmas.
6. Pelatihan Berjenjang Sesuai Tingkatan Kompetensi
 - Menyusun pelatihan berdasarkan tingkat kompetensi peserta, seperti dasar, menengah, dan lanjutan.
 - Memberikan pelatihan teknis khusus untuk penyakit prioritas (contoh: malaria, TB, HIV/AIDS).

7. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan
 - Melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta organisasi profesi dalam pelaksanaan bimtek.
 - Mendorong koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan bimbingan teknis.
8. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur dan Peralatan
 - Melakukan pemutakhiran peralatan laboratorium atau teknologi di wilayah binaan agar selaras dengan standar pelatihan.
9. Evaluasi dan Dokumentasi Kegiatan Bimtek
 - Melakukan evaluasi terhadap hasil bimtek untuk memastikan implementasi materi di lapangan.
 - Mendokumentasikan seluruh proses bimtek untuk referensi kegiatan serupa di masa mendatang.

Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut secara sistematis, BBLBK dapat memastikan bimbingan teknis berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif pada penguatan layanan laboratorium di wilayah binaan.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Untuk mencapai target bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas, ada beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Perencanaan yang Matang:
 - Penyusunan rencana bimbingan teknis yang jelas, terstruktur, dan terukur untuk setiap tingkatan atau jenjang kegiatan.
 - Menetapkan jadwal pelaksanaan dan target yang harus dicapai.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten:
 - Melibatkan instruktur atau fasilitator yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni.
 - Pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pengajar atau instruktur secara berkelanjutan agar dapat memberikan materi yang relevan dan *up-to-date*.
3. Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai:
 - Menyediakan fasilitas yang cukup, seperti ruang pelatihan, alat bantu belajar, perangkat teknologi, serta materi yang sesuai dengan standar yang diperlukan.
 - Akses ke sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan bimbingan teknis.
4. Koordinasi dan Kolaborasi yang Baik:
 - Membangun komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu UPT Labkesmas, instansi terkait, maupun peserta bimbingan teknis.

- Kolaborasi dengan pihak lokal dan pemangku kepentingan lain untuk mempermudah pelaksanaan.

5. Pendanaan yang Cukup:

- Memastikan adanya dana yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan, termasuk untuk honorarium pengajar, biaya perjalanan, dan pengadaan fasilitas yang diperlukan.
- Pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.

6. Monitoring dan Evaluasi:

- Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan bimbingan teknis untuk mengetahui sejauh mana target tercapai.
- Memberikan umpan balik yang konstruktif agar perbaikan dapat dilakukan dalam kegiatan berikutnya.

7. Komitmen dan Dukungan Pihak Terkait:

- Diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, pimpinan, serta stakeholder lainnya untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan bimbingan teknis.
- Kepemimpinan yang kuat untuk mendorong kelancaran program.

8. Motivasi Peserta:

- Meningkatkan partisipasi aktif dari peserta bimbingan teknis dengan memberikan insentif atau penghargaan yang dapat memotivasi mereka untuk berperan aktif.
- Penguatan pemahaman tentang manfaat dari kegiatan bimbingan teknis.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, UPT Labkesmas dapat mencapainya target bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah binaan.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Namun demikian, pelaksanaan bimbingan teknis ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Sebagai organisasi yang baru dibentuk pada awal tahun 2024, BBLBK masih dalam tahap penguatan kapasitas internal, baik dari sisi infrastruktur, sistem kerja, maupun pengorganisasian jejaring laboratorium di seluruh wilayah binaan. Koordinasi dan sinkronisasi yang efektif dengan laboratorium di daerah juga membutuhkan waktu untuk dapat terjalin dengan optimal. Kendala ini tidak mengurangi komitmen BBLBK untuk terus meningkatkan program pembinaan teknis sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan sistem laboratorium kesehatan nasional yang tangguh.

Beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian target bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Terbatasnya jumlah pengajar atau fasilitator yang kompeten dan berkualitas.
 - Kekurangan tenaga pelatih yang dapat menangani berbagai topik atau bidang yang diperlukan dalam bimbingan teknis.
 - Mobilitas dan ketersediaan pengajar yang terbatas, terutama di daerah terpencil.
2. Anggaran yang Tidak Memadai:
 - Keterbatasan dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan bimbingan teknis, seperti biaya transportasi, pengadaan materi, honorarium pengajar, dan sarana prasarana lainnya.
 - Ketergantungan pada anggaran yang terbatas atau pergeseran prioritas anggaran dari pihak yang berwenang.
3. Fasilitas yang Tidak Memadai:
 - Kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan, seperti ruang pelatihan yang cukup, alat bantu belajar, dan teknologi yang diperlukan.
 - Ketidaktersediaan fasilitas yang mendukung pembelajaran jarak jauh atau online bagi daerah yang sulit dijangkau.
4. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi:
 - Rendahnya koordinasi antara UPT Labkesmas, instansi terkait, dan *stakeholder* di tingkat daerah, yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.
 - Komunikasi yang kurang efektif antara pihak penyelenggara dan peserta, sehingga pelaksanaan tidak berjalan dengan baik.
5. Waktu Pelaksanaan yang Tidak Tepat:
 - Penjadwalan bimbingan teknis yang tidak sesuai dengan waktu atau kebutuhan peserta, misalnya bertabrakan dengan waktu sibuk atau acara lain yang lebih prioritas.
 - Ketidakmampuan untuk mengatur jadwal bimbingan teknis yang fleksibel dan sesuai dengan ketersediaan peserta di berbagai wilayah.
6. Resistensi dari Peserta:
 - Kurangnya motivasi atau minat dari peserta untuk mengikuti bimbingan teknis, karena dianggap tidak relevan atau tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka.
 - Partisipasi yang rendah atau tidak konsisten dari peserta yang menghambat kelancaran proses bimbingan teknis.
7. Keterbatasan Teknologi:

- Kendala dalam penggunaan teknologi, baik di tingkat penyelenggara maupun peserta, seperti keterbatasan akses internet di daerah terpencil atau keterbatasan perangkat yang digunakan.
- Keterbatasan kemampuan instruktur dalam menggunakan platform atau alat bantu pembelajaran berbasis teknologi.

8. Perubahan Kebijakan atau Prioritas:

- Perubahan kebijakan di tingkat pusat atau daerah yang mempengaruhi anggaran atau prioritas pelaksanaan bimbingan teknis.
- Adanya perubahan dalam arah kebijakan kesehatan yang mempengaruhi fokus atau jenis bimbingan teknis yang perlu dilakukan.

9. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi:

- Tidak adanya sistem monitoring yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan bimbingan teknis, sehingga kesalahan atau masalah tidak dapat terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat.
- Evaluasi yang kurang mendalam atau tidak dilakukan secara rutin untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan tercapai.

10. Faktor Geografis:

- Wilayah yang luas atau sulit dijangkau dapat menyulitkan pelaksanaan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang.
- Kondisi geografis yang dapat mempengaruhi akses peserta untuk mengikuti pelatihan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil.

Dengan mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor penghambat ini, UPT Labkesmas dapat mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan teknis di wilayah binaan dan mencapai target yang ditetapkan.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Untuk mengatasi faktor penghambat dalam pencapaian target bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas, beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pelatihan dan Pengembangan Pengajar: Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk pengajar atau fasilitator agar selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan bimbingan teknis.

- Penugasan Pengajar Berbasis Keahlian: Mengidentifikasi dan menugaskan pengajar yang memiliki keahlian di bidang-bidang spesifik yang dibutuhkan dalam bimbingan teknis.
 - Pemanfaatan Tenaga Pengajar Lokal: Mencari dan melibatkan tenaga pengajar dari wilayah binaan untuk mengurangi masalah mobilitas dan meningkatkan keterlibatan lokal.
2. Meningkatkan Anggaran dan Manajemen Keuangan
 - Pengajuan Dana yang Memadai: Mengusulkan anggaran yang lebih besar dan jelas kepada instansi terkait dengan justifikasi yang kuat tentang pentingnya bimbingan teknis bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
 - Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Memastikan dana yang ada dikelola dengan efisien dan transparan. Menggunakan teknologi untuk memonitor pengeluaran agar lebih tepat sasaran.
 - Kerja Sama dengan Pihak Ketiga: Mencari kerja sama dengan sektor swasta atau donor yang dapat menyediakan sumber daya tambahan dalam bentuk dana atau fasilitas.
 3. Meningkatkan Infrastruktur dan Fasilitas
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana: Menyediakan fasilitas pelatihan yang memadai, seperti ruang yang cukup, alat bantu pelatihan, serta perangkat teknologi yang diperlukan.
 - Penggunaan Platform Pembelajaran Online: Mengembangkan atau memanfaatkan platform pembelajaran berbasis teknologi untuk memperluas jangkauan pelatihan ke wilayah yang lebih terpencil.
 - Peningkatan Akses Internet: Meningkatkan akses internet di daerah-daerah sulit dijangkau dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau penyedia layanan internet.
 4. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
 - Koordinasi yang Lebih Intensif: Memperkuat koordinasi antara UPT Labkesmas, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya untuk merancang program bimbingan teknis yang relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik.
 - Penggunaan Teknologi untuk Komunikasi: Menggunakan aplikasi atau platform komunikasi digital untuk memperlancar koordinasi antar pihak terkait dan antara instruktur dan peserta bimbingan teknis.
 - Sosialisasi yang Lebih Baik: Meningkatkan pemahaman masyarakat atau peserta tentang pentingnya bimbingan teknis bagi kualitas layanan kesehatan melalui sosialisasi yang intensif.
 5. Penjadwalan yang Fleksibel dan Efektif
 - Penyesuaian Jadwal: Menyesuaikan jadwal bimbingan teknis dengan waktu yang paling memungkinkan bagi peserta, seperti menghindari bentrok dengan waktu kerja atau kegiatan penting lainnya.

- Bimbingan Teknis Berjenjang: Merancang pelatihan dengan pembagian yang jelas antara tingkat dasar, menengah, dan lanjutan, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.
6. Meningkatkan Motivasi Peserta
 - *Incentive* atau Penghargaan: Memberikan insentif atau penghargaan bagi peserta yang berpartisipasi aktif atau berhasil mengikuti seluruh rangkaian bimbingan teknis.
 - Penyuluhan tentang Manfaat Bimbingan Teknis: Menyusun materi sosialisasi yang menunjukkan manfaat jangka panjang dari pelatihan bagi pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan.
 - Memberikan Umpan Balik Positif: Memberikan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan kinerja peserta selama pelatihan.
 7. Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran
 - Pelatihan Daring (Online): Mengembangkan modul pelatihan daring (online) yang dapat diakses oleh peserta dari berbagai lokasi untuk mengatasi kendala geografis dan meningkatkan efisiensi.
 - Penggunaan Aplikasi Pembelajaran: Menggunakan aplikasi pembelajaran atau platform khusus untuk memfasilitasi interaksi dan evaluasi selama proses pelatihan.
 8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi yang Rutin
 - Monitoring Berkala: Melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan bimbingan teknis dan mengambil langkah koreksi jika ada masalah.
 - Evaluasi Dampak: Setelah setiap sesi bimbingan teknis, melakukan evaluasi dampak untuk menilai apakah tujuan pelatihan tercapai, dan untuk merancang perbaikan di masa depan.
 - Pengumpulan Umpan Balik: Mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai materi dan metode pelatihan untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut.
 9. Meningkatkan Partisipasi Peserta
 - Pemberian Informasi yang Jelas: Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait jadwal, tujuan, dan manfaat dari bimbingan teknis, sehingga peserta lebih tertarik dan termotivasi.
 - Fleksibilitas dalam Metode Pelatihan: Menggunakan berbagai metode pelatihan yang interaktif dan praktis untuk menarik minat peserta dan memastikan mereka memperoleh pengetahuan yang berguna.
 10. Menghadapi Kendala Geografis
 - Pemanfaatan Bimbingan Jarak Jauh: Bimbingan teknis berbasis daring atau penggunaan teknologi seperti video konferensi dapat mengatasi kendala geografis.

- Pelatihan Kelompok Lokal: Menyusun pelatihan dengan metode kelompok kecil di tingkat lokal yang dapat lebih mudah diakses dan dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan melaksanakan tindak lanjut di atas, UPT Labkesmas dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memastikan pencapaian target bimbingan teknis yang lebih optimal.

4) Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

a) Definisi Operasional

1. Pemantapan mutu eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu.
2. PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profisiensi untuk spesimen klinis/sampel pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu tahun.
3. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/baik/sesuai/memuaskan dan/atau kriteria kelulusan lainnya.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan pencapaian target IKK mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah melalui penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Cara penghitungan persentase capaian IKK jumlah mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Capaian IKK} &= \frac{\sum \text{Keikutsertaan PME dalam 1 tahun}}{\sum \text{Target PME}} \times 100\% \\ &= \frac{21}{2} \times 100\% \\ &= 1050\%\end{aligned}$$

c) Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian target IKK mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) ini mengakomodir 1 fungsi Labkesmas yaitu Pelaksanaan Mutu Eksternal (PME). Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kualitas dan akurasi hasil pemeriksaan laboratorium, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) telah berkomitmen untuk target mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sebanyak 2 kali. Pada satu semester tahun 2025 ini, BBLBK berhasil mencapai sebanyak 21 kali mengikuti PME, yang mencerminkan dedikasi laboratorium dalam memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional dan internasional. Program PME merupakan standar penting yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja laboratorium dalam pengujian spesimen secara eksternal. Keberhasilan dalam PME tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar mutu internasional tetapi juga membuktikan keandalan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium. Dengan lulusnya BBLBK dalam PME, laboratorium ini mampu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, jejaring laboratorium kesehatan, dan lembaga mitra nasional maupun internasional. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi BBLBK untuk menjadi laboratorium dengan hasil pemeriksaan berstandar internasional, sekaligus mendukung tujuan strategis dalam meningkatkan sistem surveilans berbasis laboratorium di Indonesia. Rincian PME yang diikuti oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6. Daftar Jenis dan Hasil Pemantapan Mutu Eksternal yang Diikuti Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan pada Semester I Tahun 2025

No	Jenis Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Hasil PME yang diikuti BBLBK
1.	PME WHO External Quality Assessment Programme for the Detection of Influenza Viruses/ SARS-CoV-2 by RT-PCR Panel 23 (2024)	Dari 15 sampel virus influenza kering dan SARS-Cov-2 dan virus pernapasan lainnya, Mayoritas laboratorium mampu memenuhi standar.
2.	PME Measles Molecular Proficiency Panel	Hasil Evaluasi: - Detection Assay: Lulus (100/91), - Genotyping RT-PCR: Lulus (50/41), - Sequencing analysis: Lulus (106/97) - Semua pengujian sampel lulus dengan skor maksimal.
3.	PME Global Measles and Rubella Laboratory Network	Hasil Evaluasi: - Detection RT-qPCR: Lulus (100/91), - Genotyping RT-PCR: Lulus (47/41) - Sequencing analysis: Lulus (100/91). - Semua pengujian sampel lulus dengan skor maksimal.
4.	PME Parameter uji retinol bahan uji serum darah	Hasil Pengujian:

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

No	Jenis Pemanjapan Mutu Eksternal (PME)	Hasil PME yang diikuti BBLBK
		<ul style="list-style-type: none"> - Uji Presisi: Didapatkan hasil rata-rata gabungan (Mean) = 44,02 dengan nilai SD 1,30 dan nilai CV 2,95%. Syarat keberterimaan nilai CV < 10,19%, Sehingga dapat disimpulkan uji presisi telah memenuhi persyaratan. - Uji Akurasi: Hasil uji akurasi retinol menggunakan serum NIST 968F level 1 dan level 2 nilainya berada dalam rentang normal keberterimaan NIST 968F. Sehingga dapat disimpulkan uji akurasi telah memenuhi persyaratan.
5.	PME Parameter uji Seng (Zn) bahan uji serum	<p>Hasil Pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena nilai F hitung < F tabel maka tidak ada perbedaan hasil pengujian kadar Zn antara Ari Salbiah, Ema Sahara, dan Laela Salamah sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga analisis memiliki presisi yang baik. - Ketiga analisis mempunyai kompetensi yang sama untuk melakukan pengujian Zn dalam serum dengan metode AAS.
6.	PME Parameter uji Seng (Zn) bahan uji larutan standar Zn 0.05 ppm; 0.1 ppm; 0.2 ppm; 0.3 ppm; 0.4 ppm; dan 0.5 ppm	<p>Hasil Pengujian:</p> <p>Nilai koefisien variasi dari 5 titik standar yang telah dibaca menunjukkan hasil dibawah 5% sehingga uji kesesuaian sistem alat memenuhi syarat.</p>
7.	PME Parameter uji Retinol (Vit. A) bahan uji Larutan standar retinol 20,21 ug/dL; 40,41 ug/dL; 80,82 ug/dL; 121,24 ug/dL	<p>Hasil Pengujian:</p> <p>Nilai koefisien variasi dari 4 titik standar yang telah dibaca menunjukkan hasil dibawah 5% sehingga uji kesesuaian sistem alat memenuhi syarat.</p>
8.	PME Parameter uji Seng (Zn) bahan uji larutan standar Zn 0.05 ppm; 0.1 ppm; 0.2 ppm; 0.3 ppm; 0.4 ppm; dan 0.5 ppm	<p>Hasil Pengujian:</p> <p>Nilai koefisien variasi dari 5 titik standar yang telah dibaca menunjukkan hasil dibawah 5% sehingga uji kesesuaian sistem alat memenuhi syarat.</p>
9.	PME Parameter uji Retinol (Vit. A) bahan uji Larutan standar retinol 20,21 ug/dL; 40,41 ug/dL; 80,82 ug/dL; 121,24 ug/dL	<p>Hasil Pengujian:</p> <p>Nilai koefisien variasi dari 4 titik standar yang telah dibaca menunjukkan hasil dibawah 5% sehingga uji kesesuaian sistem alat memenuhi syarat.</p>
10.	PME Parameter uji kadar abu bahan uji susu bubuk	<p>Hasil Pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena nilai F dihitung < F tabel maka tidak ada perbedaan hasil pengujian kadar abu susu bubuk antara Laela Salamah, Yusma, dan Haweningtyas sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga analisis memiliki presisi yang baik. - Ketiga analisis mempunyai kompetensi yang sama untuk melakukan pengujian kadar abu

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

No	Jenis Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Hasil PME yang diikuti BBLBK
		dalam susu bubuk dengan metode pengabuan kering.
11.	PME Parameter uji kadar air bahan uji susu bubuk	<p>Hasil Pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena nilai F dihitung < F tabel maka tidak ada perbedaan hasil pengujian kadar air susu bubuk antara Laela Salamah, Yusma, dan Haweningtyas sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga analis memiliki presisi yang baik. - Ketiga analis mempunyai kompetensi yang sama untuk melakukan pengujian kadar air dalam susu bubuk dengan metode pengabuan kering.
12.	PME AMR	Semua pengujian sampel lulus dengan skor maksimal menunjukkan bahwa kinerja laboratorium sangat baik dalam pelaporan hasil, dan ketepatan waktu.
13.	PME Parameter uji Zn komoditi Serum	<p>Hasil Pengujian:</p> <p>Karena Thitung < Ttabel maka tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata pengukuran di Laboratorium Gizi dan Toksikologi Klinik dengan Laboratorium Seameo Recfon sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua laboratorium sebanding.</p>
14.	PME Sertifikat/Laporan PME/EQAP Virus Influenza dan COVID-19, 2. PME/EQAP Virus Mpox	Semua pengujian sampel mampu memenuhi standar menunjukkan bahwa kinerja laboratorium sangat baik dalam pelaporan hasil, dan ketepatan waktu.
15.	PME Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal Pemeriksaan PCR Influenza Terintegrasi COVID-19 Tahun 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman panel uji akan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Mei 2025. - Panel akan dikirimkan dalam kondisi dingin (2-8 °C) bersama dengan surat pengantar dan petunjuk pelaksanaannya.
16.	Surat Pengantar Panel Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Pemeriksaan Influenza Terintegrasi COVID-19 Tahun 2025	5 (lima) tabung spesimen dengan volume 500µL untuk tiap tabungnya dengan kode ICP.25.001 s.d. ICP.25.005. Dalam paket disertakan pula surat pengantar resmi dari BBLBK dan panduan peserta Uji Profisiensi Pemeriksaan PCR Influenza terintegrasi COVID-19 untuk laboratorium jejaring pemeriksa ILI-SARI di Indonesia.
17.	Registrasi PME NAAT (PCR) Malaria dari UK-NEQAS	Semua pengujian sampel mampu memenuhi standar menunjukkan bahwa kinerja laboratorium sangat baik dalam pelaporan hasil, dan ketepatan waktu.
18.	PME Presisi Kadar Lemak	<p>Hasil Pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai koefisien variasi (CV) sebesar 1,05 menunjukkan bahwa presisi antar analis dalam

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025**

No	Jenis Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Hasil PME yang diikuti BBLBK
		pengukuran kadar lemak susu bubuk tersebut baik. Kedua analis mempunyai kompetensi yang sama untuk melakukan pengujian kadar lemak dalam susu bubuk dengan metode hidrolisis asam.
19.	Hasil Evaluasi PME-AMR Identifikasi Bakteri dan Uji Kepekaan Antibiotik Siklus 1 Tahun 2025	- Skor identifikasi bakteri: 12/12 Nilai Baik, Laboratorium berhasil mencapai untuk parameter identifikasi - Skor uji kepekaan antibiotik: 12/12 Nilai Baik, Laboratorium berhasil mencapai untuk parameter identifikasi
20.	Certificate Of Completion : In recognition of the completion of EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT PROGRAMME for Detection of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 by RT-PCR* of the WHO Global Influenza Surveillance and Response System Panel 23 (2024)	- Pengujian kerentanan antivirus untuk virus influenza akan tetap menjadi komponen opsional, karakterisasi molekuler melalui pengurutan diharapkan akan terus disertakan untuk tujuan edukasi. Formulir pengembalian hasil akan ditinjau untuk memudahkan pelaporan hasil dan analisis.
21.	Individual Report WHO Global Polio Laboratory Network - Virus Isolation - VIPT-2024-2	Hasil Pengujian: - Semua virus, termasuk strain nOPV2 diisolasi dengan benar. - Algoritmanya diikuti dengan benar dan data diserahkan tepat waktu. Skor akhir laboratorium: 100% (passing score minimum: 90%).
JUMLAH		21 Dokumen/Sertifikat PME
TARGET		2 Dokumen/Sertifikat PME
ANALISIS CAPAIAN		Melebihi target

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Untuk mencapai target mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME), UPT Labkesmas perlu melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya standar mutu dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh lembaga pemantapan mutu eksternal. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan:

1. Persiapan Internal Sebelum Pemantapan

- Peninjauan dan Peningkatan Standar Prosedur Operasional (SOP): Memastikan semua SOP yang relevan telah disusun dengan baik dan mengikuti pedoman yang berlaku, serta terus diperbarui sesuai kebutuhan.
- Audit Internal: Melaksanakan audit internal secara rutin untuk memastikan semua proses dan prosedur berjalan sesuai dengan standar

- yang ditetapkan. Hal ini juga membantu mendeteksi kekurangan yang perlu diperbaiki sebelum PME.
- Pelatihan dan Penyuluhan untuk Tenaga Kesehatan: Memberikan pelatihan dan pembekalan kepada semua tenaga kesehatan dan staf terkait mengenai kriteria, tujuan, dan persiapan yang dibutuhkan untuk mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal.
 - Penguatan Sistem Manajemen Mutu: Meningkatkan sistem manajemen mutu di dalam institusi, termasuk dokumentasi dan sistem pelaporan untuk memastikan semuanya siap mengikuti evaluasi eksternal.
2. Evaluasi dan Penyesuaian Program
- Evaluasi Proses Kerja: Melakukan evaluasi terhadap proses kerja yang ada, untuk memastikan setiap tahapan pelayanan dan kegiatan diikuti dengan prosedur yang sudah sesuai dengan standar eksternal yang ditetapkan.
 - Pemantauan Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan: Menyusun dan melaksanakan mekanisme pemantauan kinerja tenaga kesehatan di setiap tahap layanan, untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau perbaikan yang diperlukan.
 - Simulasi dan Uji Coba: Melaksanakan simulasi atau uji coba prosedur yang diharapkan untuk memenuhi standar eksternal, dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, agar lebih siap saat dilaksanakan di dunia nyata.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas
- Perbaikan Sarana dan Prasarana: Memastikan fasilitas yang digunakan, seperti ruang laboratorium, ruang perawatan, alat medis, dan teknologi, sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga pemantapan mutu eksternal.
 - Peningkatan Teknologi dan Sistem Informasi: Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang relevan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pemantapan mutu eksternal, seperti software untuk manajemen data, pelaporan, dan analisis mutu.
4. Monitoring dan Pengawasan
- Monitoring Berkala: Melakukan monitoring secara rutin terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan semua langkah dan standar yang ditetapkan dapat dipenuhi. Ini juga mencakup pengawasan terhadap proses pelayanan dan dokumentasi.
 - Penyusunan Laporan Mutu: Membuat laporan mutu yang terperinci dan lengkap untuk memudahkan tim evaluator eksternal dalam melakukan penilaian. Laporan ini harus mencakup semua aspek dari pelayanan, prosedur, serta kinerja lembaga.

- Evaluasi Hasil Pemantapan Mutu: Setelah pemantapan mutu eksternal dilaksanakan, lakukan evaluasi hasil dari kegiatan tersebut untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu perbaikan lebih lanjut.
5. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
- Tindak Lanjut terhadap Temuan Pemantapan: Jika terdapat temuan atau rekomendasi dari pemantapan mutu eksternal, segera susun rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur untuk mengatasi masalah atau kekurangan yang ditemukan.
 - Peningkatan Terus Menerus (*Continuous Improvement*): Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantapan mutu eksternal, lakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mempersiapkan evaluasi berikutnya.
6. Keterlibatan *Stakeholder* dan Komunikasi
- Sosialisasi kepada Semua Pihak Terkait: Menyusun strategi komunikasi untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami tujuan, manfaat, dan proses Pemantapan Mutu Eksternal. Hal ini termasuk mengedukasi peserta mengenai pentingnya mengikuti dan lulus pemantapan mutu.
 - Koordinasi dengan Pihak Eksternal: Melakukan koordinasi dengan lembaga pemantapan mutu eksternal atau pihak terkait lainnya untuk memastikan semua persyaratan dan prosedur diikuti dengan benar.
7. Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal
- Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung: Mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk evaluasi mutu eksternal, termasuk dokumentasi terkait prosedur pelayanan, rekam medis, laporan kinerja, dan hasil audit internal.
 - Kunjungan Lapangan atau Verifikasi: Menyiapkan tim atau petugas yang siap menerima kunjungan verifikasi dari pihak eksternal dan memastikan proses berjalan dengan lancar serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Membangun Budaya Mutu
- Keterlibatan Penuh dari Pimpinan: Memastikan bahwa pimpinan institusi terlibat langsung dalam proses pemantapan mutu eksternal dan menunjukkan komitmen penuh terhadap kualitas.
 - Peningkatan Kesadaran tentang Kualitas: Membangun budaya kualitas yang kuat di seluruh tingkat organisasi, dari staf paling bawah hingga manajer, agar setiap individu di lingkungan tersebut sadar akan pentingnya mutu dan pengendalian mutu.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan serius dan konsisten akan membantu UPT Labkesmas mencapai target untuk mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal dengan hasil yang baik.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target untuk mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan tersebut:

1. Komitmen dan Dukungan Manajemen
 - Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dari pimpinan lembaga atau UPT untuk memastikan bahwa semua sumber daya dan upaya diarahkan pada pencapaian standar mutu yang ditetapkan.
 - Dukungan Kebijakan: Kebijakan yang mendukung pelaksanaan PME, termasuk alokasi waktu, anggaran, dan sumber daya lainnya.
 - Budaya Mutu: Membangun budaya mutu di organisasi, di mana seluruh staf menyadari pentingnya kualitas dan pemantapan mutu eksternal.
2. Kompetensi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Tenaga Kesehatan yang Kompeten: Adanya tenaga kesehatan yang profesional, terlatih, dan memahami standar pelayanan yang diperlukan untuk PME.
 - Pelatihan dan Pembekalan: Pelaksanaan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan staf, khususnya terkait standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga pemantapan mutu eksternal.
 - Kesiapan Tim: Pembentukan tim internal yang solid, terorganisir, dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan serta melaksanakan PME.
3. Perencanaan dan Persiapan yang Matang
 - Dokumentasi yang Lengkap: Ketersediaan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan sesuai standar, termasuk SOP, laporan kegiatan, rekam medis, dan hasil audit.
 - Audit Internal Rutin: Pelaksanaan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kesiapan dan memastikan kepatuhan terhadap standar sebelum dilakukan evaluasi eksternal.
 - Rencana Kerja yang Terukur: Penyusunan rencana kerja yang terstruktur dan terukur untuk mempersiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan dalam PME.
4. Infrastruktur dan Fasilitas yang Memadai
 - Sarana dan Prasarana yang Sesuai: Tersedianya fasilitas seperti laboratorium, alat medis, ruang pelayanan, dan perangkat teknologi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Akses Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemantapan mutu, seperti sistem informasi laboratorium, sistem pelaporan, dan monitoring kualitas.
5. Dukungan Anggaran
 - Alokasi Dana yang Cukup: Tersedianya anggaran yang memadai untuk membiayai persiapan PME, seperti pelatihan, audit, perbaikan fasilitas, dan biaya administrasi.
 - Efisiensi Penggunaan Dana: Pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan PME.
 6. Koordinasi dan Kolaborasi
 - Kolaborasi Internal: Kerja sama yang baik antara seluruh bagian atau unit di organisasi untuk memastikan kelancaran proses persiapan dan pelaksanaan PME.
 - Dukungan Eksternal: Dukungan dari pihak eksternal, seperti lembaga pembina, instansi pemerintah, atau organisasi profesi, yang memberikan pembimbingan, pelatihan, atau evaluasi.
 - Komunikasi yang Efektif: Komunikasi yang lancar antara tim internal, pemimpin organisasi, dan lembaga penilai eksternal.
 7. Monitoring dan Evaluasi yang Efektif
 - Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara rutin terhadap progres pencapaian standar mutu untuk memastikan tidak ada aspek yang terlewatkan.
 - Tindak Lanjut Audit: Melakukan tindak lanjut segera terhadap temuan dari audit internal atau eksternal agar tidak menjadi hambatan dalam penilaian PME.
 - Feedback dari Tim Evaluator: Mendapatkan umpan balik dari lembaga pemantapan mutu eksternal sebelumnya untuk memperbaiki kekurangan di masa mendatang.
 8. Kesadaran dan Motivasi Seluruh Staf
 - Kesadaran akan Pentingnya Mutu: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh staf tentang pentingnya PME bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
 - Motivasi Kerja: Memberikan penghargaan atau insentif kepada staf yang menunjukkan kinerja baik dalam mendukung persiapan PME.
 - Keterlibatan Aktif: Melibatkan seluruh staf dalam proses persiapan, sehingga setiap individu merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan PME.
 9. Pengawasan dan Pembimbingan oleh Lembaga Pembina

- Supervisi Teknis: Adanya supervisi dari lembaga pembina atau pihak yang lebih berpengalaman untuk memastikan persiapan sesuai standar.
- Pemberian Panduan: Panduan teknis yang jelas dari lembaga pemantapan mutu eksternal mengenai prosedur dan kriteria penilaian.

10. Pengelolaan Risiko

- Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan PME, seperti ketidaklengkapan dokumen atau fasilitas yang kurang memadai.
- Strategi Mitigasi: Menyusun rencana mitigasi untuk mengatasi risiko yang mungkin muncul selama persiapan dan pelaksanaan PME.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut, UPT Labkesmas dapat lebih mudah mencapai target untuk mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal dengan hasil yang memuaskan.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang dapat memengaruhi pencapaian target untuk mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME):

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kurangnya Kompetensi Staf: Tenaga kesehatan atau staf mungkin belum memiliki kompetensi yang cukup untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- Keterbatasan Jumlah Staf: Keterbatasan jumlah staf dapat menyebabkan beban kerja tinggi sehingga persiapan untuk PME menjadi tidak maksimal.
- Minimnya Pelatihan: Kurangnya pelatihan atau pembekalan khusus terkait standar mutu eksternal.

2. Ketidaksiapan Dokumen dan Sistem Administrasi

- Dokumentasi yang Tidak Memadai: Dokumen seperti SOP, rekam medis, laporan kegiatan, atau data mutu mungkin tidak lengkap, tidak sesuai standar, atau belum diperbarui.
- Sistem Manajemen Mutu yang Lemah: Sistem pengelolaan mutu internal yang belum terstruktur dengan baik dapat menghambat kesiapan untuk PME.
- Ketidakteraturan dalam Pelaporan: Laporan kinerja atau data mutu yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan format yang diminta.

3. Kendala Infrastruktur dan Fasilitas

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Alat atau fasilitas laboratorium, perangkat medis, dan ruang kerja mungkin tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

- Kerusakan atau Ketidaktersediaan Alat: Peralatan yang rusak, kurang lengkap, atau tidak sesuai spesifikasi dapat menjadi penghambat utama dalam pemenuhan standar.
 - Keterbatasan Akses Teknologi: Kurangnya akses ke teknologi informasi, seperti perangkat lunak atau sistem informasi mutu, dapat menghambat pengelolaan data dan pelaporan.
4. Keterbatasan Anggaran
- Anggaran yang Tidak Cukup: Keterbatasan dana untuk membiayai persiapan PME, seperti pelatihan, perbaikan fasilitas, atau audit internal.
 - Efisiensi Penggunaan Dana yang Rendah: Dana yang tersedia mungkin tidak dikelola dengan optimal, sehingga tidak mendukung kebutuhan persiapan PME.
5. Kurangnya Dukungan dan Koordinasi
- Minimnya Dukungan dari Pimpinan: Jika pimpinan organisasi tidak memberikan perhatian penuh pada pentingnya PME, maka persiapan dapat terhambat.
 - Koordinasi Internal yang Lemah: Ketidakharmonisan atau kurangnya komunikasi antara unit kerja atau staf dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan untuk PME.
 - Kurangnya Kolaborasi Eksternal: Minimnya kerja sama atau bimbingan dari lembaga pembina atau pihak eksternal yang berpengalaman.
6. Kurangnya Pemahaman tentang Pemantapan Mutu
- Ketidaktahuan akan Standar: Staf mungkin tidak sepenuhnya memahami standar dan kriteria yang harus dipenuhi dalam PME.
 - Minimnya Sosialisasi: Informasi mengenai PME mungkin belum tersampaikan secara menyeluruh atau jelas kepada seluruh staf.
7. Hambatan Waktu
- Penjadwalan yang Tidak Efektif: Persiapan PME mungkin bentrok dengan kegiatan rutin lainnya, sehingga waktu untuk mempersiapkan diri menjadi terbatas.
 - Waktu Persiapan yang Pendek: Jadwal PME yang mendesak atau tidak memberikan cukup waktu untuk persiapan dapat mengurangi kualitas hasil evaluasi.
8. Monitoring dan Evaluasi yang Tidak Optimal
- Kurangnya Evaluasi Internal: Tidak adanya audit internal yang rutin untuk mengevaluasi kesiapan terhadap PME.

- Tidak Ada Tindak Lanjut terhadap Temuan: Temuan dari audit internal atau evaluasi sebelumnya tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan yang memadai.

9. Kendala Geografis

- Akses ke Wilayah Terpencil: Jika laboratorium atau fasilitas berada di wilayah yang sulit dijangkau, pengawasan atau dukungan dari lembaga eksternal dapat menjadi terbatas.
- Sulitnya Distribusi Fasilitas: Pengadaan alat atau bahan pendukung standar mungkin terhambat karena lokasi yang jauh atau akses logistik yang sulit.

10. Beban Kerja Tinggi

- Staf yang Overload: Tenaga kesehatan atau staf administratif yang terlalu sibuk dengan pekerjaan harian mungkin tidak memiliki waktu atau energi untuk fokus pada persiapan PME.
- Prioritas Lain yang Menghambat: Jika fokus organisasi lebih diarahkan pada kegiatan lain, seperti pelayanan harian, maka persiapan PME dapat tertunda.

11. Ketidakstabilan Kebijakan

- Perubahan Kebijakan yang Mendadak: Kebijakan yang berubah-ubah, baik dari internal maupun lembaga pembina, dapat menyebabkan kebingungan dalam mempersiapkan PME.
- Kurangnya Pedoman Teknis: Jika tidak ada panduan teknis yang jelas dari lembaga penilai eksternal, persiapan dapat menjadi tidak terarah.

Mengatasi faktor-faktor penghambat ini memerlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan seluruh komponen organisasi agar persiapan dan pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal dapat berjalan dengan sukses.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Berikut adalah pemecahan masalah dan tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai faktor penghambat pencapaian target mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME):

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Menyelenggarakan pelatihan khusus secara berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan terkait standar mutu dan pemantapan mutu eksternal.
- Rekrutmen Staf Tambahan: Jika memungkinkan, merekrut tenaga kesehatan tambahan untuk mengurangi beban kerja staf yang ada.
- Distribusi Tugas yang Efektif: Membagi tugas secara adil dan efisien untuk memastikan semua staf dapat berkontribusi tanpa merasa terbebani.

2. Ketidaksiapan Dokumen dan Sistem Administrasi

- Penyusunan dan Penyempurnaan SOP: Merevisi dan melengkapi standar operasional prosedur (SOP) sesuai pedoman dari lembaga pemantapan mutu eksternal.
 - Digitalisasi Dokumen: Mengadopsi sistem digital untuk pengelolaan dokumen dan data mutu agar lebih mudah diakses dan dikelola.
 - Audit Dokumen Internal: Melakukan audit internal untuk memastikan dokumen-dokumen yang relevan sudah lengkap dan sesuai standar.
3. Kendala Infrastruktur dan Fasilitas
- Pemeliharaan dan Perbaikan Alat: Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan atau penggantian alat yang rusak atau tidak sesuai standar.
 - Pengadaan Fasilitas Baru: Mengajukan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai kebutuhan.
 - Optimalisasi Fasilitas yang Ada: Menggunakan fasilitas yang tersedia secara maksimal, sambil mengupayakan peningkatan kualitas.
4. Keterbatasan Anggaran
- Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mendukung persiapan PME.
 - Pengajuan Anggaran Tambahan: Mengajukan anggaran tambahan ke pemerintah daerah atau lembaga donor
 - Kerja Sama dengan Pihak Eksternal: Menggandeng pihak swasta atau lembaga lain untuk mendukung pendanaan.
5. Kurangnya Dukungan dan Koordinasi
- Sosialisasi kepada Pimpinan: Memberikan pemahaman kepada pimpinan tentang pentingnya PME untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
 - Penguatan Tim Kerja: Membentuk tim koordinasi yang bertugas mengawasi dan memfasilitasi persiapan PME.
 - Komunikasi Efektif: Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif antara staf, pimpinan, dan lembaga pemantapan mutu eksternal.
6. Kurangnya Pemahaman tentang Pemantapan Mutu
- Sosialisasi Standar PME: Mengadakan sesi sosialisasi tentang standar dan prosedur PME kepada seluruh staf.
 - Mentoring oleh Ahli: Melibatkan ahli atau konsultan eksternal untuk memberikan bimbingan teknis.
 - Peningkatan Edukasi Internal: Menyediakan materi edukasi, seperti buku pedoman, modul pelatihan, atau panduan digital.
7. Hambatan Waktu
- Perencanaan Jadwal yang Matang: Menyusun jadwal persiapan PME yang realistis dan terorganisir.
 - Delegasi Tugas: Membagi tugas ke lebih banyak staf untuk mempercepat persiapan tanpa mengorbankan kualitas.

- Prioritas Kegiatan: Mengidentifikasi dan fokus pada kegiatan yang paling penting untuk mendukung PME.
- 8. Monitoring dan Evaluasi yang Tidak Optimal
 - Audit Internal yang Rutin: Menyusun jadwal audit internal secara berkala untuk memantau kesiapan terhadap PME.
 - *Feedback* dan Perbaikan: Menggunakan hasil audit untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan.
 - Sistem Monitoring Terpusat: Mengembangkan sistem monitoring terpusat untuk memudahkan evaluasi.
- 9. Beban Kerja Tinggi
 - Rekrutmen Tambahan: Mengupayakan penambahan staf untuk mengurangi beban kerja.
 - Fokus pada Prioritas: Mengurangi tugas non-prioritas agar staf dapat fokus pada persiapan PME.
 - Manajemen Waktu yang Baik: Mendorong penggunaan manajemen waktu yang efisien di antara staf.
- 10. Ketidakstabilan Kebijakan
 - Koordinasi dengan Pembina: Berkomunikasi secara aktif dengan lembaga pembina untuk mendapatkan arahan terkait kebijakan.
 - Adaptasi Cepat: Menyusun mekanisme untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan secara cepat.
 - Sosialisasi Kebijakan Baru: Memberikan pemahaman kepada staf tentang kebijakan yang baru diterapkan.

Dengan melaksanakan pemecahan masalah dan tindak lanjut di atas, kendala yang ada dapat diatasi secara efektif sehingga target untuk mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal dapat tercapai.

h) Justifikasi Capaian Melebihi Target

Berikut adalah beberapa justifikasi atau alasan mengapa capaian mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal (PME) bisa melebihi target:

1. Komitmen yang Tinggi dari Pimpinan dan Tim
 - Kepemimpinan yang Proaktif: Dukungan penuh dari pimpinan organisasi yang mendorong seluruh staf untuk fokus pada pelaksanaan dan pencapaian PME.
 - Motivasi Tim yang Kuat: Semangat dan kerja keras staf untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 - Budaya Mutu yang Baik: Organisasi memiliki budaya kerja yang mengutamakan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap standar mutu.
2. Perencanaan yang Matang

- Rencana Kerja yang Efektif: Penyusunan rencana kerja yang realistis dan terukur, dengan target yang jelas.
 - Strategi Persiapan yang Optimal: Menggunakan pendekatan strategis dalam persiapan PME, seperti audit internal, simulasi, atau uji coba sebelum penilaian eksternal.
 - Pengelolaan Waktu yang Baik: Penjadwalan kegiatan yang efisien dan terfokus pada pemenuhan kriteria PME.
3. Ketersediaan Sumber Daya yang Memadai
- Dukungan Anggaran yang Cukup: Alokasi anggaran yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan PME, seperti pelatihan, perbaikan fasilitas, dan pengadaan alat.
 - Fasilitas yang Memadai: Infrastruktur dan sarana yang sudah memenuhi atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan.
 - SDM yang Kompeten: Adanya staf yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman dalam pemenuhan standar mutu.
4. Efektivitas Pelatihan dan Pendampingan
- Pelatihan yang Intensif: Pelaksanaan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas staf.
 - Pendampingan dari Ahli: Dukungan dari konsultan atau lembaga pembina yang memberikan arahan teknis secara langsung.
 - Peningkatan Pemahaman: Sosialisasi yang berhasil meningkatkan pemahaman staf tentang standar PME dan kriteria penilaian.
5. Monitoring dan Evaluasi yang Konsisten
- Audit Internal yang Rutin: Evaluasi internal yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan mengikuti PME.
 - Feedback dan Tindak Lanjut: Adanya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi atau audit sebelumnya.
 - Sistem Monitoring yang Terintegrasi: Pemantauan progres yang efektif menggunakan sistem informasi atau dashboard kinerja.
6. Kolaborasi yang Baik dengan Pihak Eksternal
- Kerja Sama dengan Lembaga Pembina: Hubungan yang baik dengan lembaga pembina atau penyelenggara PME yang memberikan panduan dan bimbingan teknis.
 - Jaringan Kerja yang Luas: Kolaborasi dengan organisasi lain atau pihak ketiga untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pemenuhan standar mutu.
7. Inovasi dalam Proses Persiapan
- Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam PME.

- Inisiatif Baru: Adanya inisiatif atau program tambahan yang membantu organisasi dalam mencapai hasil yang lebih baik, seperti benchmarking dengan institusi lain.
 - Peningkatan Efisiensi Proses: Optimalisasi proses kerja untuk meningkatkan produktivitas staf dalam persiapan PME.
8. Adanya Tantangan yang Memotivasi
- Target yang Ambisius: Penetapan target tinggi sejak awal yang memotivasi tim untuk bekerja keras dan melampaui ekspektasi.
 - Kompetisi Positif: Adanya persaingan sehat antarunit atau antarlembaga untuk mencapai hasil terbaik dalam PME.
9. Dukungan dari Seluruh Staf
- Partisipasi Aktif: Seluruh staf terlibat dalam persiapan PME, menciptakan kerja sama tim yang solid.
 - Kesadaran Kolektif: Kesadaran bersama tentang pentingnya PME sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan.
 - Penghargaan Internal: Adanya insentif atau apresiasi bagi staf yang berkontribusi besar dalam pencapaian PME.
10. Faktor Eksternal yang Menguntungkan
- Penilaian yang Lebih Fleksibel: Lembaga pemantapan mutu memberikan penilaian yang kondusif atau mendukung pencapaian target.
 - Standar yang Relevan: Standar yang ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kapasitas organisasi, sehingga lebih mudah dicapai.
 - Momentum Positif: Adanya dukungan regulasi atau kebijakan pemerintah yang mendukung pelaksanaan PME.
- Dengan faktor-faktor di atas, capaian mengikuti PME bisa melebihi target karena organisasi tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap mutu dan pengembangan berkelanjutan.

5) Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/atau internasional

a) Definisi Operasional

1. Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan laboratorium kesehatan masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/wabah/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan kerjasama lainnya guna memadukan kemampuan bersama untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh.

2. Kerja sama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional.
3. MoU / PKS/ Forum kerjasama/ forum koordinasi adalah bentuk kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan/ atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan/ pengujian laboratorium/ magang/ penelitian/ fasilitator/ narasumber/ pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

b) Cara Perhitungan

Cara penghitungan capaian IKK dari indikator jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/Institusi nasional dan/ atau internasional yaitu dengan penjumlahan MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) semester.

Cara penghitungan persentase capaian IKK dari indikator jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ Institusi Nasional dan/ atau Internasional yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Capaian IKK} &= \frac{\sum \text{MoU dalam 1 tahun}}{\sum \text{Target MoU}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{5} \times 100\% \\ &= 120\% \end{aligned}$$

c) Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKK jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/Institusi nasional dan/ atau internasional mengakomodir 2 fungsi Labkesmas, meliputi:

- 1) Pengkoordinasian jejaring laboratorium kesehatan
- 2) Kerja sama dengan Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional

Pada Semester I Tahun 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) menetapkan target penyusunan 5 dokumen kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga, dan/atau institusi nasional maupun internasional. Melalui upaya yang terencana dan kolaborasi yang intensif, realisasi target tersebut berhasil melampaui ekspektasi dengan pencapaian total sebanyak 6 dokumen. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BBLBK dalam memperkuat jejaring dan kerja sama strategis untuk mendukung transformasi pelayanan laboratorium kesehatan nasional dan internasional. Daftar MoU, PKS, atau forum

koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional yang sudah dilakukan BBLBK sepanjang tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7. Daftar MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, lembaga/Institusi nasional dan/ atau internasional yang Dilakukan BBLBK Semester I Tahun 2025

No	Perjanjian Kerja Sama	Keterangan
1	PKS antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Biologi	PKS tentang kegiatan belajar kampus merdeka (MBKM)
2	PKS antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan Fakultas Pertanian Univ. Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian	PKS tentang program magang mahasiswa
3	PKS antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan UIN Walisongo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi	PKS tentang Pengembangan Pembelajaran/Peningkatan Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi
4	PKS antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri	PKS tentang Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5	PKS antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan PT. Vaksindo Satwa Nusantara	PKS tentang Program Magang Karyawan
6	PKS antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan Program Studi Magister Epidemiologi Universitas Airlangga	PKS tentang Permohonan Data sekunder untuk penelitian tesis mahasiswa
JUMLAH		6 Dokumen/Sertifikat PME
TARGET		5 Dokumen/Sertifikat PME
CAPAIAN		Melebihi target

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Berikut adalah kegiatan singkat yang dapat dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional:

1. Identifikasi dan Mapping Jejaring Potensial
 - Mengidentifikasi lembaga/institusi potensial yang relevan dengan bidang layanan atau program, baik nasional maupun internasional.
 - Melakukan analisis kerja sama berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis.
2. Penyusunan Draft MoU/PKS

- Menyusun rancangan MoU/PKS yang sesuai dengan tujuan kerja sama.
 - Mengacu pada standar perjanjian kerja sama yang berlaku.
 - 3. Pertemuan atau Forum Diskusi
 - Mengadakan pertemuan formal atau informal dengan pihak jejaring/lembaga terkait untuk membahas peluang kerja sama.
 - Menghadiri forum diskusi atau seminar nasional/internasional untuk membangun relasi dan membuka peluang MoU/PKS.
 - 4. Forum Koordinasi Internal
 - Melakukan rapat koordinasi internal untuk merumuskan strategi dan kesiapan sebelum melakukan kerja sama.
 - Melibatkan unit/bidang terkait dalam menyusun rencana tindak lanjut kerja sama.
 - 5. Penandatanganan MoU/PKS
 - Melaksanakan kegiatan penandatanganan MoU/PKS dengan pihak jejaring atau institusi.
 - Mendokumentasikan dan melaporkan proses penandatanganan untuk keperluan monitoring.
 - 6. Tindak Lanjut dan Implementasi
 - Menyusun rencana aksi berdasarkan poin-poin yang disepakati dalam MoU/PKS.
 - Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target.
 - 7. Publikasi dan Dokumentasi
 - Memublikasikan hasil kerja sama melalui media internal atau eksternal untuk memperkuat citra institusi.
 - Mendokumentasikan semua aktivitas terkait kerja sama untuk laporan kinerja dan evaluasi.
 - 8. Kolaborasi dalam Kegiatan Bersama
 - Melaksanakan kegiatan bersama sebagai bentuk implementasi MoU/PKS, seperti pelatihan, penelitian, atau pertukaran informasi.
 - Mengikuti kegiatan internasional seperti konferensi atau program pelatihan lintas negara yang relevan.
- Dengan langkah-langkah tersebut, target indikator kinerja terkait MoU/PKS atau forum kerja sama dapat tercapai secara efektif.
- e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target
- Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja terkait MoU/PKS atau forum kerja sama:
1. Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dan arahan strategis dari pimpinan organisasi.
 2. Jaringan yang Luas: Adanya relasi yang baik dengan jejaring/lembaga potensial, baik nasional maupun internasional.

3. SDM Kompeten: Tim yang memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan pemahaman hukum perjanjian.
4. Ketersediaan Anggaran: Dana yang cukup untuk mendukung proses koordinasi, pertemuan, atau perjalanan dinas.
5. Keselarasan Tujuan: Kesesuaian visi, misi, dan kebutuhan antara institusi dengan mitra kerja sama.
6. Dokumen Administrasi yang Siap: Draft MoU/PKS yang lengkap dan sesuai regulasi.
7. Teknologi Pendukung: Pemanfaatan teknologi untuk komunikasi dan dokumentasi yang efisien.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Berikut adalah faktor penghambat pencapaian target indikator kinerja terkait MoU/PKS atau forum kerja sama:

1. Kendala Komunikasi: Kesulitan koordinasi dengan lembaga mitra, terutama internasional.
2. Perbedaan Prioritas: Tidak sinkronnya tujuan atau kebutuhan antara institusi dan mitra.
3. Keterbatasan Anggaran: Dana yang tidak mencukupi untuk mendukung proses kerja sama.
4. SDM Tidak Kompeten: Kurangnya staf yang memahami prosedur penyusunan MoU/PKS.
5. Kendala Administrasi: Dokumen kerja sama yang belum lengkap atau tidak sesuai standar.
6. Regulasi yang Kompleks: Aturan hukum atau birokrasi yang memperlambat proses kerja sama.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Berikut adalah tindak lanjut untuk mengatasi faktor penghambat pencapaian target indikator kinerja terkait MoU/PKS atau forum kerja sama:

1. Meningkatkan Komunikasi: Menggunakan teknologi atau platform komunikasi yang efektif untuk menjangkau mitra dengan lebih mudah.
2. Harmonisasi Tujuan: Mengadakan diskusi awal untuk menyelaraskan visi dan kebutuhan dengan mitra.
3. Optimalisasi Anggaran: Mengajukan tambahan dana atau mencari alternatif pendanaan melalui CSR atau hibah.
4. Pelatihan SDM: Memberikan pelatihan terkait penyusunan dokumen dan negosiasi kepada staf.
5. Perbaikan Administrasi: Membentuk tim khusus untuk menyusun dokumen sesuai standar regulasi.
6. Simplifikasi Proses Birokrasi: Berkoordinasi dengan pihak hukum untuk mempercepat proses perjanjian kerja sama.

h) Justifikasi Capaian Melebihi Target

Berikut adalah justifikasi mengapa capaian indikator kinerja terkait MoU/PKS atau forum kerja sama bisa melebihi target:

1. Proaktif dalam Membangun Jejaring: Inisiatif yang kuat dalam mencari peluang kerja sama dengan berbagai lembaga/institusi.
2. Dukungan Pimpinan yang Optimal: Komitmen penuh dari pimpinan dalam mempercepat proses kerja sama.
3. Fleksibilitas dalam Penyesuaian Tujuan: Kemampuan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan mitra, sehingga memperluas peluang.
4. SDM yang Kompeten: Staf yang berpengalaman dan terampil dalam negosiasi serta penyusunan dokumen kerja sama.
5. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi dan administrasi.
6. Kerjasama dengan Banyak Pihak: Pendekatan kolaboratif yang mencakup jejaring nasional dan internasional.
7. Dukungan Kebijakan: Adanya regulasi atau program pemerintah yang mendukung peningkatan kerja sama lintas institusi.

6) Labkesmas Memiliki Standar Minimal Sistem Pengelolaan Biorepository

a) Definisi Operasional

1. Biorepositori merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; kontrol positif, pembandingan varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset.
2. Penyelenggaraan biorepositori untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya.
3. Penyelenggaraan biorepository memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan *biosafety dan biosecurity*.
4. Standar minimal pengelolaan sistem biorepositori, mencakup:
 - a. Sarana prasarana: ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan
 - b. SDM: kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository
 - c. Spesimen dan atau/sampel: jumlah spesimen dan/atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen/ sampel sebanyak minimal 1000 spesimen dan/atau sampel (baik secara manual maupun elektronik)
 - d. SOP: tersedia SOP pengelolaan sistem biorepository

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan capaian IKK labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori adalah jumlah standar sistem pengelolaan biorepositori yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepository dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100%.

Cara penghitungan capaian IKK labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori yaitu:

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{SOP dalam 1 tahun}}{\sum \text{Target SOP}} \times 100\% \\ & = \frac{100}{100} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

c) Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKK labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori ini mengakomodir 1 fungsi Labkesmas yaitu pengelolaan biorepository spesimen klinik dan sampel. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) berhasil mencapai 100% target standar minimal sistem pengelolaan biorepository dalam satu semester tahun 2025. Pencapaian ini didukung oleh pemenuhan berbagai komponen penting, termasuk standar sarana prasarana yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan 40% tenaga kerja telah mengikuti pelatihan biobank, serta ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelolaan spesimen. Dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut, BBLBK menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan biorepository yang terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung surveilans berbasis laboratorium, dengan melakukan penyimpanan spesimen yang didapat di biorepository.

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori:

1. Penyusunan SOP Biorepositori: Membuat dan menetapkan standar operasional prosedur sesuai pedoman nasional/internasional.
2. Pelatihan SDM: Melatih staf dalam pengelolaan sampel biologi, termasuk penyimpanan, dokumentasi, dan keamanan.
3. Pengadaan Fasilitas: Menyediakan perangkat penyimpanan, seperti freezer ultra-low temperature, dan sistem keamanan lingkungan.
4. Pengembangan Sistem Digital: Menerapkan sistem manajemen data untuk pencatatan dan pelacakan sampel.

5. Penerapan Kebijakan Keamanan: Menyusun kebijakan perlindungan data dan biosafety untuk menjamin integritas sampel.
6. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan audit rutin terhadap sistem pengelolaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian target untuk Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori:

1. Ketersediaan Anggaran: Alokasi dana yang cukup untuk pengadaan fasilitas dan sistem pengelolaan.
2. Kompetensi SDM: Tenaga kerja yang terlatih dan memiliki pengetahuan terkait biorepositori.
3. Dukungan Pimpinan: Komitmen dari pimpinan dalam memastikan standar sistem pengelolaan dipenuhi.
4. Fasilitas yang Memadai: Infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan dan keamanan sampel.
5. Regulasi yang Jelas: Adanya pedoman atau kebijakan yang mengatur pengelolaan biorepositori dengan standar nasional atau internasional.
6. Teknologi Pendukung: Pemanfaatan teknologi untuk manajemen data dan pengawasan biorepositori.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Berikut adalah faktor penghambat pencapaian target untuk Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori:

1. Keterbatasan Anggaran: Dana yang tidak mencukupi untuk pengadaan fasilitas atau pelatihan SDM.
2. Kurangnya SDM Terlatih: Staf yang belum memiliki kompetensi atau pengalaman dalam pengelolaan biorepositori.
3. Fasilitas yang Tidak Memadai: Infrastruktur penyimpanan yang tidak memenuhi standar teknis atau keselamatan.
4. Birokrasi yang Rumit: Proses administrasi atau regulasi yang menghambat implementasi sistem.
5. Kurangnya Pemahaman Regulasi: Ketidaktahuan tentang pedoman dan regulasi pengelolaan biorepositori yang tepat.
6. Teknologi yang Belum Optimal: Sistem manajemen data yang belum terintegrasi atau kurang efisien.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Berikut adalah tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai target Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori:

1. Peningkatan Anggaran: Mengajukan dana tambahan untuk pengadaan fasilitas dan pelatihan.

2. Pelatihan dan Sertifikasi SDM: Melaksanakan pelatihan intensif dan sertifikasi bagi staf terkait pengelolaan biorepositori.
3. Penyempurnaan Fasilitas: Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penyimpanan sesuai standar yang berlaku.
4. Simplifikasi Proses Administrasi: Mempercepat birokrasi dengan memperjelas prosedur pengajuan dan implementasi.
5. Sosialisasi Regulasi: Melakukan sosialisasi mengenai pedoman dan regulasi pengelolaan biorepositori kepada seluruh pihak terkait.
6. Peningkatan Teknologi: Mengimplementasikan sistem digital untuk manajemen data biorepositori yang lebih efisien.

7) Persentase Realisasi Anggaran

a) Definisi Operasional

Definisi operasional dari IKK persentase realisasi anggaran adalah penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu semester anggaran.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan capaian IKK persentase realisasi anggaran adalah umlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%. Sumber Data berasal dari aplikasi OMSPAN.

cara perhitungan persentase realisasi anggaran adalah sebagai berikut::

$$\begin{aligned} \text{Persentase Realisasi Anggaran} &= \frac{\sum \text{anggaran yang direalisasikan}}{\sum \text{anggaran yang dialokasikan}} \times 100\% \\ &= \frac{7.203.300.778}{14.299.732.000} \times 100\% \\ &= 50,37\% \end{aligned}$$

Nilai capaian ideal adalah 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh anggaran telah digunakan sesuai dengan perencanaan. Nilai di bawah 100% menunjukkan adanya anggaran yang belum digunakan, sementara nilai di atas 100% menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang melebihi alokasi, yang memerlukan justifikasi.

c) Analisis Capaian Kinerja

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) menunjukkan kinerja luar biasa dalam realisasi anggaran semester I tahun 2025, dengan capaian sebesar 50,37% dari total anggaran yang tersedia. Angka ini sudah memenuhi setengah dari target yang ditetapkan dalam satu tahun sebesar 96%, mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan kemampuan perencanaan dan eksekusi yang baik, tetapi juga menunjukkan komitmen BBLBK dalam mendukung program-program prioritas kesehatan masyarakat secara

optimal. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target persentase realisasi anggaran:

1. Penyusunan Rencana Anggaran yang Detail: Membuat perencanaan anggaran yang realistis dan terperinci sesuai kebutuhan.
2. Pengawasan dan Monitoring Berkala: Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara rutin untuk memastikan penggunaan sesuai rencana.
3. Penyusunan Prioritas Pengeluaran: Menetapkan prioritas pengeluaran untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif.
4. Pelaporan Keuangan Transparan: Menyusun laporan keuangan yang jelas dan tepat waktu untuk memastikan akuntabilitas.
5. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkoordinasi dengan unit atau divisi terkait untuk memastikan anggaran dibelanjakan tepat waktu dan sesuai tujuan.
6. Revisi Anggaran Jika Diperlukan: Menyusun revisi anggaran jika terjadi perubahan kebutuhan atau kondisi mendesak.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian target persentase realisasi anggaran:

1. Perencanaan Anggaran yang Akurat: Penyusunan anggaran yang realistis dan sesuai kebutuhan.
2. Pengawasan yang Ketat: Monitoring anggaran secara berkala untuk memastikan penggunaan sesuai rencana.
3. Koordinasi Efektif: Kolaborasi yang baik antara unit terkait untuk penggunaan anggaran yang efisien.
4. Ketersediaan SDM Kompeten: Tenaga kerja yang memahami pengelolaan anggaran dan keuangan.
5. Dukungan Pimpinan: Komitmen dan perhatian dari pimpinan untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat.
6. Sistem Administrasi yang Efisien: Prosedur pengelolaan anggaran yang sederhana dan transparan.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Berikut adalah faktor penghambat pencapaian target persentase realisasi anggaran:

1. Perencanaan Anggaran yang Tidak Realistis: Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
2. Kurangnya Koordinasi: Keterlambatan dalam komunikasi antarunit terkait penggunaan anggaran.
3. Ketidaksesuaian Pengeluaran: Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan prioritas.
4. Keterbatasan SDM: Kurangnya staf yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran.
5. Perubahan Kondisi yang Tidak Terduga: Faktor eksternal yang mengubah kebutuhan anggaran atau rencana penggunaan dana.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Berikut adalah tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian target persentase realisasi anggaran:

1. Revisi Rencana Anggaran: Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual dan prioritas yang mendesak.
2. Peningkatan Koordinasi: Memperkuat komunikasi antarunit untuk mempercepat proses pengeluaran anggaran.
3. Monitoring dan Evaluasi Rutin: Melakukan pengecekan berkala terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan sesuai dengan rencana.
4. Pelatihan SDM: Meningkatkan kemampuan staf dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan keuangan yang efisien.
5. Prioritaskan Pengeluaran: Mengutamakan pengeluaran yang mendesak dan sesuai dengan target program.

8) Nilai Kinerja Anggaran

a) Definisi Operasional

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan.
2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan.
3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan menghitung nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

Target dan capaian NKA dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0, Februari 0, Maret 5, April 10 dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK. Sumber data adalah aplikasi E Monev DJA (dashboard nilai SMART).

c) Analisis Capaian Kinerja

Pada Semester I tahun 2025, BBLBK menghadapi tantangan dalam mencapai target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang telah ditetapkan sebesar 80,1 NKA sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. BBLBK berhasil mencapai setengah dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai target dalam satu tahun, BBLBK masih perlu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depannya agar bisa mencapai nilai yang lebih optimal lagi.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 49,19 yang dicapai dalam satu semester ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran. Namun, perlu dipahami bahwa terdapat sejumlah faktor eksternal dan internal yang memengaruhi pencapaian nilai tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kondisi Eksternal yang Tidak Terduga: Pelaksanaan program dan kegiatan banyak mengalami hambatan akibat dinamika kondisi eksternal, seperti perubahan kebijakan nasional, keterbatasan sumber daya, atau faktor ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan anggaran di lapangan.

2. Proses Transisi dan Adaptasi: Tahun ini menjadi masa transisi dan adaptasi terhadap regulasi baru, sistem kerja yang diperbarui, atau perubahan struktur organisasi yang memerlukan penyesuaian signifikan.
3. Kompleksitas Program: Beberapa program dan kegiatan yang diimplementasikan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Ini berdampak pada penyerapan anggaran dan penilaian kinerja.
4. Faktor Keterlambatan Teknis: Keterlambatan dalam proses pengadaan, penyelesaian administrasi, atau penyampaian laporan juga turut menjadi kendala. Situasi ini sering kali di luar kendali langsung dan memerlukan waktu untuk perbaikan.

Kami memandang bahwa hasil ini menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang. Dengan upaya perbaikan yang telah direncanakan, kami optimis bahwa hasil evaluasi berikutnya akan lebih baik. BBLBK berkomitmen untuk bekerja lebih keras guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien di periode selanjutnya serta tetap berkomitmen untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola anggaran, memastikan bahwa setiap alokasi dapat mendukung pencapaian program kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dan efisien. Upaya ini akan menjadi prioritas dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target nilai kinerja anggaran:

1. Penyusunan Anggaran yang Terperinci: Merencanakan anggaran dengan rinci berdasarkan prioritas dan kebutuhan.
2. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan evaluasi penggunaan dana.
3. Optimalisasi Pengeluaran: Mengelola pengeluaran agar efisien dan sesuai dengan tujuan program.
4. Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan untuk staf dalam mengelola anggaran dan memanfaatkan sumber daya dengan efektif.
5. Penyusunan Laporan Keuangan: Menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
6. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Berkomunikasi dengan unit terkait untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian target nilai kinerja anggaran adalah adanya komitmen bersama dari semua pihak baik pimpinan, para penanggung jawab kegiatan, pejabat pembuat komitmen, pengelola perencanaan, maupun pengelola keuangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi kaidah-kaidah dan perundang-undangan yang berlaku.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi salah satunya adalah masih rendahnya konsistensi RPD terhadap penyerapan, dan kurangnya monitoring dalam penginputan capaian output di aplikasi SAKTI.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Tindak lanjut yang dilakukan melakukan percepatan kegiatan, berkomitmen pada RPD yang telah ditentukan sebelumnya agar konsistensi antara rencana dan pelaksanaan terjaga, serta berkoordinasi dengan operator SAKTI dalam melakukan penginputan.

9) **Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi**

a) Definisi Operasional

Definisi operasional dari IKK persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah informasi mengenai persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi fungsional. Pengembangan kompetensi fungsional merujuk pada pengembangan kompetensi dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan fungsi dan peran spesifik ASN dalam menjalankan tugasnya.

b) Cara Perhitungan

Cara penghitungan capaian dari IKK persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu melalui jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%.

$$\frac{\sum \text{ASN yang mengikuti pelatihan dalam 1 tahun}}{\sum \text{ASN Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan}} \times 100\%$$

Capaian idealnya adalah 98%, yang berarti seluruh ASN telah mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa ada ASN yang belum mendapatkan pengembangan kompetensi.

Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK. Sumber data capaian ini adalah instrumen perhitungan laporan peningkatan kapasitas ASN dilampirkan sertifikat/surat tugas.

c) Analisis Capaian Kinerja

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) berhasil melampaui target peningkatan kompetensi ASN pada semester I tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 80%. Dengan capaian luar biasa sebesar 98% (122,50%), artinya seluruh pegawai telah mengikuti berbagai pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian mereka. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BBLBK dalam mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Langkah strategis ini tidak hanya memastikan kualitas layanan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi untuk menghadapi tantangan kesehatan masyarakat di masa depan.

d) Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya:

1. Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan pelatihan berkala sesuai kebutuhan bidang tugas ASN.
2. Workshop dan Seminar: Mengadakan workshop untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial ASN.
3. Penyusunan Rencana Pengembangan Karir: Membuat rencana pengembangan kompetensi jangka panjang bagi ASN.
4. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu pengembangan.
5. Mentoring dan Coaching: Menyediakan program mentoring dan coaching untuk pembinaan kompetensi ASN.
6. Pemberian Sertifikasi: Memberikan sertifikasi atau penghargaan bagi ASN yang berhasil meningkatkan kompetensinya.

e) Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan pencapaian target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya:

1. Ketersediaan Sumber Daya: Anggaran dan fasilitas yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan ASN.
2. Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dari pimpinan dalam menyediakan kesempatan pengembangan bagi ASN.
3. Program Pelatihan yang Tepat: Penawaran program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas ASN.
4. SDM yang Terampil: Tenaga pengajar atau mentor yang kompeten dan berpengalaman dalam bidangnya.
5. Evaluasi Kinerja yang Berkala: Proses penilaian kinerja yang dapat mengidentifikasi kompetensi yang perlu ditingkatkan.

f) Faktor Penghambat Pencapaian Target

Berikut adalah faktor penghambat pencapaian target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya:

1. Keterbatasan Anggaran: Dana yang tidak mencukupi untuk pelatihan dan pengembangan ASN.
2. Kurangnya Waktu: Keterbatasan waktu untuk mengikuti pelatihan karena beban kerja yang tinggi.
3. Keterbatasan Akses Pelatihan: Keterbatasan akses atau kurangnya program pelatihan yang relevan.
4. Tingkat Partisipasi Rendah: Rendahnya motivasi ASN untuk mengikuti program pengembangan kompetensi.
5. Sistem Penilaian yang Tidak Tepat: Kurangnya mekanisme evaluasi yang akurat dalam mengukur kompetensi yang perlu dikembangkan.

g) Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Berikut adalah tindak lanjut yang dilakukan terhadap penghambat pencapaian target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya:

1. Optimalisasi Anggaran: Mengajukan anggaran tambahan atau memprioritaskan alokasi dana untuk pelatihan ASN.
2. Diversifikasi Program Pelatihan: Menyediakan berbagai jenis pelatihan yang dapat diakses oleh ASN dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan.
3. Pengembangan Pengajar: Melatih dan meningkatkan kapasitas pengajar atau mentor untuk memfasilitasi pelatihan.
4. Peningkatan Motivasi ASN: Memberikan insentif atau penghargaan untuk ASN yang aktif mengikuti pelatihan.
5. Perbaikan Sistem Penilaian: Meningkatkan sistem evaluasi kompetensi yang lebih objektif dan relevan.

h) Justifikasi Capaian Melebihi Target

Berikut adalah justifikasi capaian melebihi target persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya:

1. Program Pelatihan yang Relevan: Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN dan perkembangan tugas yang semakin kompleks.
2. Motivasi ASN yang Tinggi: Peningkatan motivasi ASN untuk mengikuti pelatihan melalui insentif dan penghargaan.
3. Fasilitas yang Memadai: Penyediaan anggaran, waktu, dan akses pelatihan yang memadai bagi ASN.
4. Penyampaian Pelatihan yang Efektif: Kualitas pengajaran dan materi pelatihan yang sesuai dengan standar dan mudah dipahami.

5. Koordinasi yang Baik: Kerja sama antara pimpinan dan unit terkait dalam mendukung program pelatihan.

3.1.2. Capaian Kinerja Lainnya

Selain pencapaian kinerja utama yang telah disampaikan, laporan kinerja BBLBK tahun 2025 juga menguraikan hasil kinerja dari berbagai kegiatan lain yang dilaksanakan sepanjang satu semester tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi utama BBLBK. Kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain:

1) Pertemuan Penyusunan Dokumen Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Sebagai langkah persiapan menuju akreditasi, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan melaksanakan Pertemuan Penyusunan Dokumen Akreditasi pada tanggal 6 - 7 Januari 2025. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pelatihan Pemahaman Akreditasi Laboratorium Kesehatan yaitu bimbingan teknis.



Gambar 3.14. Dokumentasi Pertemuan Penyusunan Dokumen Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tahun 2025

2) Rapat Koordinasi Nasional Sistem Laboratorium Surveilans Sentinel ILI-SARI Terintegrasi COVID-19

Dalam rangka kesiapsiagaan pandemi influenza terintegrasi COVID-19 dan penyakit infeksi pernapasan lainnya melalui penguatan surveilans sentinel ILI – SARI, maka diperlukan pertemuan koordinasi antara site sentinel, laboratorium pemeriksa, hingga lintas sektor terkait agar tercapai sistem yang terintegrasi dan efektif. Sehingga dilakukan pelaksanaan pertemuan Rapat Koordinasi Nasional Sistem Laboratorium Surveilans Sentinel ILI-SARI Terintegrasi COVID-19, Regional 1 pada Tanggal 14 -17 Januari 2025. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan semua protokol dan prosedur diterapkan dengan baik, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan, mendapatkan solusi bersama untuk keberlanjutan program dan sistem umpan balik yang dapat dilakukan, memperkuat jejaring dan kerjasama antar stakeholder terkait (petugas Kesehatan (surveilans dan program), petugas laboratorium, dll), hingga sharing

informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ILI – SARI dan COVID-19 di tingkat global dan nasional serta aturan atau kebijakan terkait.



Gambar 3.15. Dokumentasi Rapat Koordinasi Nasional Sistem Laboratorium Surveilans Sentinel ILI-SARI Terintegrasi COVID-19 Tahun 2025

3) Pelatihan Tenaga Laboratorium Rumah Sakit dalam Rangka AMR Prevalence Survey

Pada tanggal 19-24 Januari 2025, BBLBK, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, bersama Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dan World Health Organization (WHO) serta Flemming Fund mengadakan Pelatihan Laboratorium AMR di BBLKM Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari Indonesia National Survey to Estimate Prevalence, Health and Economic Burden of AMR in Human Bloodstream Bacterial Infections. Pelatihan ini difasilitasi oleh BBLBK dan BBLKM Surabaya. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu peserta memahami AMR prevalence survey pada blood stream infection, Melakukan pemeriksaan laboratorium sehingga meminimalkan bias data AMR dan Memahami biosafety dan biosecurity dalam pemeriksaan laboratorium AMR.



Gambar 3.16. Dokumentasi Pelatihan Tenaga Laboratorium Rumah Sakit dalam Rangka AMR Prevalence Survey Tahun 2025

4) Bimbingan dan Teknis Penyiapan Dokumen Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Pada 21-22 Januari 2024, BBLBK melaksanakan pelatihan pemahaman akreditasi laboratorium kesehatan. Sebagai laboratorium kesehatan masyarakat tier 5, kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan kami dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku.



Gambar 3.17. Dokumentasi Bimbingan dan Teknis Penyiapan Dokumen Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tahun 2025

5) Audiensi Kegiatan WHO terkait WGS Polio

Pada tanggal 24 Januari 2025 Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan melakukan kegiatan Audiensi Kegiatan WHO terkait WGS Polio. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dengan WHO. Diharapkan dengan kegiatan audiensi ini semakin meningkatkan kolaborasi antara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dan WHO.



Gambar 3.18. Dokumentasi Audiensi Kegiatan WHO terkait WGS Polio

6) **Penyusunan RPK dan RPD**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mengadakan rapat penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Tahun Anggaran 2025 pada 30 Januari 2025 yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.



Gambar 3.19 Dokumentasi Penyusunan RPK dan RPD

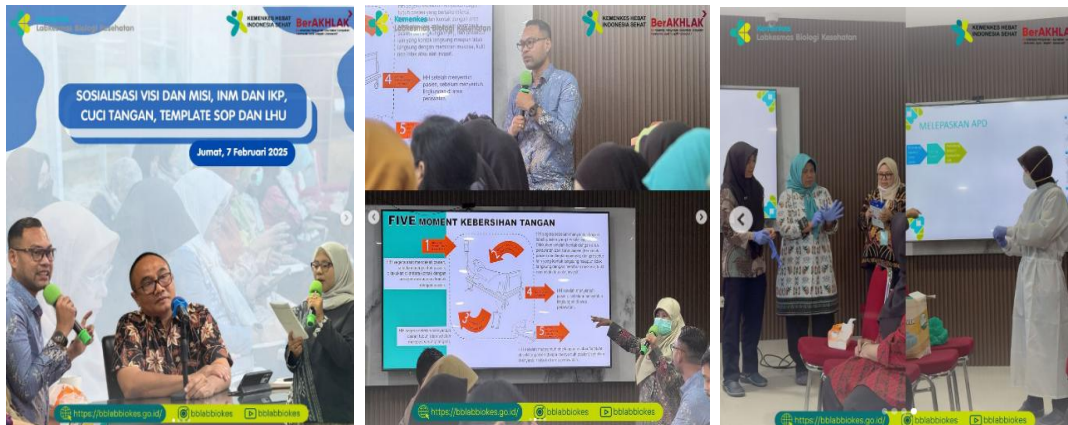
7) **Basic Training in Medical Mycology**

Pada tanggal 25 Januari - 5 Februari 2025 Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mengikuti Basic Training in Medical Mycology di Chandigarh, India. Kegiatan ini diselenggarakan WHO dan PGIMER (Post Graduate Institute of Medical Education & Research) yang bertujuan untuk membangun kemampuan staf laboratorium dalam teknik dasar diagnosis infeksi jamur, pengujian kerentanan terhadap ragi, termasuk kemampuan seperti mikroskopis, kultur, metode molekuler dan tes serologis. Selain itu pelatihan ini diharapkan juga meningkatkan interpretasi dan hasil laboratorium mikologi dan keterampilan dalam pengujian kerentanan antijamur. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota WHO South-East Asia Regional Office (SEARO), termasuk Indonesia. Indonesia diwakili 3 Institusi termasuk Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Pada kesempatan ini Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan diwakili oleh dr. Mursinah SpMK (Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Serologi).



Gambar 3.20. Dokumentasi *Basic Training in Medical Mycology di Chandigarh, India*
8) Sosialisasi Visi dan Misi, INM dan IKP, Cuci Tangan, Template SOP dan LHU

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai Tier 5 melakukan Sosialisasi Visi dan Misi, INM dan IKP, Cuci Tangan, Template SOP, serta LHU pada tanggal 07 Februari 2025. Adapun tujuan kegiatan tersebut supaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah organisasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya cuci tangan dalam mencegah penyebaran penyakit serta meningkatkan kualitas pelayanan. Diharapkan dengan sosialisasi ini dapat Meningkatkan Produktivitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan.



Gambar 3.21. Dokumentasi Sosialisasi Visi dan Misi, INM dan IKP, Cuci Tangan, Template SOP dan LHU

9) Kunjungan Japan International Cooperation System (JICS) dan ACPHEED DRA

Pada tanggal 10 Februari 2025, JICS dan ACPHEED DRA melaksanakan kunjungan ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan untuk membahas langkah strategis dalam pembangunan infrastruktur laboratorium serta meninjau usulan gedung yang akan dibangun. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat kolaborasi dan memastikan rencana pembangunan berjalan optimal.



Gambar 3.22. Dokumentasi Kunjungan Japan International Cooperation System (JICS) dan ACPHEED DRA

10) Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Surveilans Sentinel Penyakit Infeksi Emerging

Surveilans Sentinel Penyakit Infeksi Emerging merupakan salah satu upaya untuk deteksi dini penyakit infeksi emerging dengan pendekatan sindrom dan laboratorium. Dalam implementasinya, diperlukan penyesuaian terkait prosedur operasional/petunjuk teknis kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan - Ditjen P2 pada tanggal 10 - 12 Feb 2025. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan hadir sebagai salah satu kontributor penyesuaian prosedur operasional/petunjuk teknis terutama terkait Pemeriksaan Laboratorium.



Gambar 3.23. Dokumentasi Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Surveilans Sentinel Penyakit Infeksi Emerging

11) Pelatihan Pemahaman SNI ISO 15189:2022

Pada tanggal 10-11 Februari 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mengikuti Pelatihan Pemahaman SNI ISO 15189:2022 di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Kegiatan ini didukung oleh FIND dalam upaya peningkatan mutu BBLBK sebagai salah satu laboratorium pemeriksaan TB sehingga dapat memberikan layanan diagnosis TB yang berkualitas sesuai dengan standar akreditasi ISO 15189:2022.



Gambar 3.24. Dokumentasi Pelatihan Pemahaman SNI ISO 15189:2022

12) *Joint Capacity Building Workshop on Malaria and Lymphatic Filariasis Elimination and Cross-border Collaboration*

Pada 11 - 14 Februari 2025, Indonesia ID dan Timor-Leste TL bersatu dalam “Joint Capacity Building Workshop on Malaria and Lymphatic Filariasis Elimination and Cross-border Collaboration in Timor Island” di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi dan pertukaran ilmu untuk memperkuat strategi eliminasi malaria dan filariasis limfatik di Pulau Timor. Peserta mendapatkan pelatihan teknis tentang surveilans, deteksi kasus, dan pengelolaan vektor, sekaligus meninjau dan menyempurnakan kerja sama yang ada, terutama di sepanjang perbatasan kedua negara.



Gambar 3.25. Dokumentasi *Joint Capacity Building Workshop on Malaria and Lymphatic Filariasis Elimination and Cross-border Collaboration*

13) One Health Leadership Training

Pada 12-15 Februari 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bekerja sama dengan Fleming Fund Country Grant to Indonesia (FFCGI), menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan One Health untuk level middle management di Platinum Hotel Jimbaran, Bali. Pelatihan ini diikuti oleh para kepala bidang/ketua tim kerja/kordinator di lingkup kementerian dan lembaga dalam sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) turut berpartisipasi, dengan dr. Herna, SP.MK. sebagai perwakilan.

Tujuan utama pelatihan ini adalah memperkuat kompetensi kepemimpinan dalam menghadapi tantangan resistansi antimikroba (AMR). Melalui sesi interaktif, peserta diajarkan keterampilan manajemen waktu, stres, komunikasi efektif, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti. Dengan pendekatan yang interaktif, pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas individu dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan responsif terhadap isu AMR. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan memperkuat kolaborasi antar sektor untuk mengatasi masalah AMR di Indonesia.



Gambar 3.26. Dokumentasi One Health Leadership Training

14) Site Visit AMR Prevalence Survey

Pada 12-15 Februari 2025, BBLabBiokes, bersama Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, WHO Indonesia, dan Fleming Fund, melaksanakan kegiatan Site Visit dan Pelatihan Rumah Sakit dalam rangka AMR Prevalence Survey di 2 site yaitu RS Budi Mulia Bitung dan RS H. L. Manambai Abdulkadir. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut AMR National Survey yang bertujuan untuk memperkirakan prevalensi, kesehatan, dan dampak ekonomi terkait Antimicrobial Resistance (AMR) pada infeksi bakteri aliran darah manusia. Site Visit bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan kapasitas rumah sakit agar pelaksanaan survey AMR berjalan dengan baik, serta menghasilkan data prevalensi AMR yang akurat.



Gambar 3.27. Dokumentasi Site Visit AMR Prevalence Survey

15) Kunjungan Assessment Biorepositori untuk program kerjasama TGF Stellar

Sebagai langkah awal mendukung penguatan fungsi Laboratorium untuk pengelolaan spesimen/sampel biorepositori, pada tanggal 17 Februari sampai dengan 21 Februari 2025, Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) melaksanakan kunjungan ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan untuk pelaksanaan assessment biorepositori. FIND ditunjuk menjadi pelaksana program “Technical assistance to support strengthening of biorepository management and



referral system for priority diseases in Indonesia“. Kegiatan assessment ini merupakan kegiatan memperkuat fungsi Laboratorium terkait manajemen biorepositori sampel pada tingkat Lakesmas tingkat 5.

Gambar 3.28. Dokumentasi Kunjungan Assessment Biorepositori untuk program kerjasama TGF Stellar

16) Site Visit Country Team Global Fund

Pada tanggal 18 Februari 2025, Country Team Global Fund (CT GF) bersama dengan UNDP melakukan Site Visit ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Site visit bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan Antimicrobial Resistance (AMR) dan External Quality Assessment (EQA) Malaria serta memahami peran BBLBK sebagai National Influenza Center (NIC) terkait progres pengujian, tantangan, dan pengiriman spesimen. Kunjungan ini semakin memperkuat upaya dalam pengendalian AMR, meningkatkan kualitas diagnosis malaria, dan memperkuat pengawasan influenza di tingkat Nasional.



Gambar 3.29. Dokumentasi Site Visit Country Team Global Fund

17) Koordinasi Pemeriksaan netralisasi antibodi spesimen uji klinis Booster Covid 19 (BCOV) 2021 dan 2022

Pada tanggal 19 Februari 2025 Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan melakukan Kegiatan Pertemuan Perkembangan Pemeriksaan Netralisasi Antibodi Spesimen Uji Klinis Booster Covid-19 (BCOV) 2021 dan 2022 di Universitas Padjadjaran, Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan tim dari Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK). Dalam pertemuan ini membahas mengenai perkembangan kegiatan pemeriksaan netralisasi antibodi spesimen uji klinis Booster Covid-19 (BCOV) 2021 dan 2022.



Gambar 3.30. Dokumentasi Koordinasi Pemeriksaan netralisasi antibodi spesimen uji klinis Booster Covid 19 (BCOV) 2021 dan 2022

18) Site Visit Pelatihan Rumah Sakit dalam rangka AMR Prevalence Survey

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) bersama dengan Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, WHO Indonesia, dan Fleming Fund kembali melaksanakan kegiatan Site Visit dan Pelatihan Rumah Sakit dalam rangka AMR Prevalence Survey di RSUD Kolonedale Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada tanggal 18-21 Februari 2025 dan di RSUD Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada tanggal 25-28 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut AMR National Survey yang bertujuan untuk memperkirakan prevalensi, kesehatan, dan dampak ekonomi terkait Antimicrobial Resistance (AMR) pada infeksi bakteri aliran darah manusia. Site visit ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan kapasitas rumah sakit agar pelaksanaan survey AMR berjalan dengan baik, serta menghasilkan data prevalensi yang akurat.



Gambar 3.31. Dokumentasi Site Visit Pelatihan Rumah Sakit dalam rangka AMR Prevalence Survey

19) Audiensi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan ke Inspektorat Jenderal II Terkait PNBP

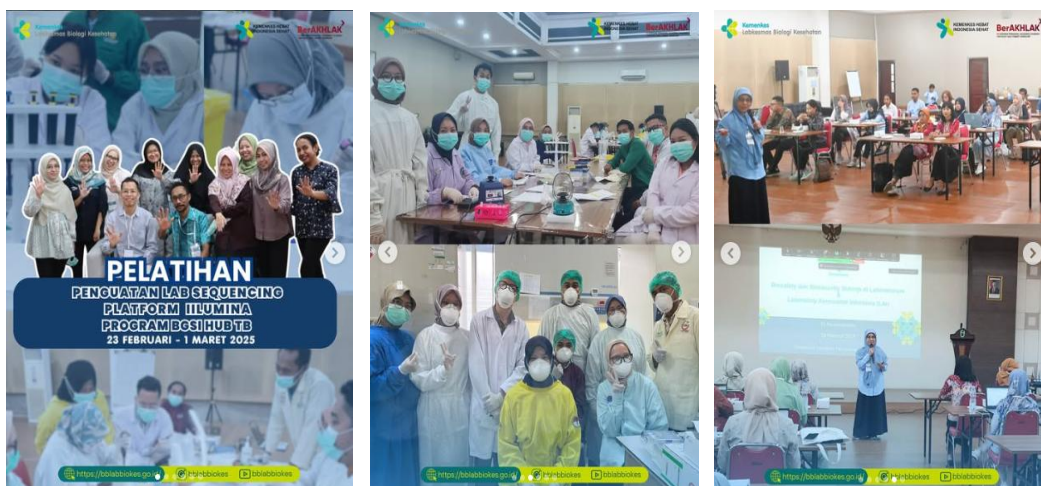
Pada tanggal 4 Maret 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) melakukan audiensi seru dengan Inspektorat Jenderal II, dan hasilnya, ada beberapa kesepakatan penting dalam pertemuan, yaitu disepakati bahwa mulai sekarang, semua kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 45 Tahun 2024 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kesehatan harus dilakukan penarikan PNBP sesuai tarif yang sudah ditetapkan. Intinya, setiap layanan yang kita berikan, ada tarif yang harus dipatuhi. Meskipun, misalnya, bahan dan alatnya disediakan oleh pihak lain, tetap aja penarikan PNBP harus dilakukan sesuai tarif yang ada. Dan selanjutnya, semua pelanggan yang mengirimkan sampel ke BBLBK juga akan dikenakan biaya PNBP. Ini artinya, setiap orang yang membutuhkan layanan di BBLBK, baik Labkesmas ataupun Dinas Kesehatan akan mendapatkan layanan sesuai dengan biaya yang berlaku. Dan yang terakhir, kalau ada PNBP yang belum sempat ditarik di periode sebelumnya, Semua pelanggan yang belum ditagih bakal dapat pemberitahuan, dan penarikan PNBP akan mulai dilakukan sejak 24 Juni 2024.



Gambar 3.32. Dokumentasi Audiensi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan ke Inspektorat Jenderal II Terkait PNBP

20) Pelatihan Penguatan Lab Sequencing Platform Illumina Program BGSi HUB TB

Pada tanggal 23 Februari - 1 Maret 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mengikuti Pelatihan Sequencing TB di RSUP Persahabatan dalam rangka Penguatan Lab Sequencing Platform Illumina Program BGSi Hub TB. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Program Biomedical Genome Science Initiative (BGSi) Hub Penyakit Infeksi dengan fokus TB yang didukung oleh FIND dalam upaya penguatan Lab Sequencing Platform Illumina sebagai dasar pelaksanaan implementasi klinis targeted next-generation sequencing (tNGS) dalam tatalaksana penanganan TB di Indonesia. Peserta pelatihan ini terdiri dari perwakilan Tim BGSi Hub TB RS Persahabatan, Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan, serta Laboratorium jejaring tNGS platform Illumina, termasuk BBLBK. Melalui pelatihan ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam upaya pengendalian TB dan terus mendukung pengembangan sektor kesehatan Indonesia.



Gambar 3.33. Dokumentasi Pelatihan Penguatan Lab Sequencing Platform Illumina Program BGSi HUB TB

21) Training of Trainer Pemantapan Mutu Eksternal Mikroskopis TBC

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) Pemantapan Mutu Eksternal TBC pada 17 - 21 Maret 2025 di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) seperti BBLKM Palembang, BBLKM Surabaya, BBLKM Makassar, serta Balai Besar Laboratorium Biomedis dan Genomika Jakarta, termasuk perwakilan dari BBLBK. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium dalam menjamin akurasi hasil pemeriksaan, mengurangi kesalahan diagnostik, dan mendukung keberhasilan program pengendalian TBC nasional. Dengan pelatihan

ini, peserta diharapkan dapat lebih optimal menjalankan tugas sebagai laboratorium pemeriksaan mikroskopis TBC dan laboratorium rujukan PME di wilayah kerjanya.



Gambar 3.34. Dokumentasi Training of Trainer Pemantapan Mutu Eksternal Mikroskopis TBC

22) Pandemi Preparedness Workshop New Delhi

Pada tanggal 17 - 19 Maret 2025, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan bersama Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan berkesempatan untuk menghadiri Pandemic Preparedness Workshop yang diselenggarakan di New Delhi, India. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen India pada 4th Quad Leaders Summit pada tanggal 21 September 2024. Selama workshop, terdapat sesi teknis dengan pembicara dari India dan Quad partners yang membahas tentang kesiapsiagaan pandemi. Selain itu, ada juga kunjungan lapangan ke salah satu lembaga kesehatan terkemuka, yaitu National Centre for Disease Control



(NCDC) di New Delhi. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi tantangan pandemi di masa depan.

Gambar 3.35. Dokumentasi Pandemi Preparedness Workshop New Delhi

23) Kunjungan Lapangan Persiapan Pengembangan Labkesmas

Tim Konsultan dari Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan lapangan ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan pada tanggal 20 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi terkini laboratorium serta mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan agar Labkesmas semakin optimal dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat. Fokus utama dalam kunjungan ini yaitu mengevaluasi sarana dan prasarana yang tersedia, memastikan fasilitas laboratorium sudah memadai, serta mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kunjungan ini merupakan langkah nyata dalam upaya memastikan bahwa Labkesmas memiliki fasilitas yang lebih baik, sistem kerja yang lebih efisien, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.



Gambar 3.36. Dokumentasi Kunjungan Lapangan Persiapan Pengembangan Labkesmas

24) Finalisasi Protokol Surveilans Terpadu Avian Influenza

Pada tanggal 24-26 Maret 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan hadir dalam kegiatan penting yaitu dalam rangka pengendalian zoonosis, khususnya High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) dengan pendekatan One Health. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat surveilans H5N1 dan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap influenza zoonotik. Diharapkan kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat.



Gambar 3.37. Dokumentasi Finalisasi Protokol Surveilans Terpadu Avian Influenza

25) Pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan
Pada tanggal 24 Maret 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berkesempatan melakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pemeriksaan keuangan untuk tahun 2024 dan Saldo keuangan 2025. Pertemuan yang penuh makna ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.



Gambar 3.38. Dokumentasi Pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan

26) Persiapan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemeriksaan PCR

Pada tanggal 14 April 2025 Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan pertemuan persiapan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan



“Pemeriksaan Molekuler PCR”. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas komponen kurikulum yang akan disusun, termasuk cakupan materi, metode pembelajaran, dan evaluasi pelatihan serta mengidentifikasi mata pelatihan yang harus dimasukkan dalam kurikulum agar selaras dengan kebutuhan surveilans salah satunya adalah ILI dan SARI. Diharapkan dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan yang tersusun dengan baik, diharapkan laboratorium pemeriksa PCR dalam jejaring labkesmas, laboratorium kesehatan lainnya, dan laborarorium tumah sakit dapat menjalankan perannya secara lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan standar.

**Gambar 3.39. Dokumentasi Persiapan Penyusunan Kurikulum dan Modul
Pelatihan Pemeriksaan PCR**

**27) Persiapan Penyusunan Kurikulum dan Modul MOOC Penatalaksanaan
Spesimen ILI SARI**

Pada tanggal 15 April 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan pertemuan persiapan penyusunan kurikulum dan modul Massive Open Online Course (MOOC) “Penatalaksanaan Spesimen Saluran Pernafasan”. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas komponen kurikulum yang akan disusun, termasuk sitematika kurikulum dan tahapan penyusunan kurikulum MOOC serta mengidentifikasi mata pelatihan yang harus dimasukkan dalam kurikulum MOOC agar selaras dengan kebutuhan pengambilan spesimen saluran pernafasan salah satunya untuk surveilans ILI dan SARI. Diharapkan pertemuan ini dapat memberikan masukan untuk kerangka penyusunan MOOC yang sistematis dan komprehensif.



Gambar 3.40. Dokumentasi Persiapan Penyusunan Kurikulum dan Modul MOOC Penatalaksanaan Spesimen ILI SARI

28) Pertemuan Finalisasi Draft Pedoman Surveilans Resisten Antimikroba (AMR)

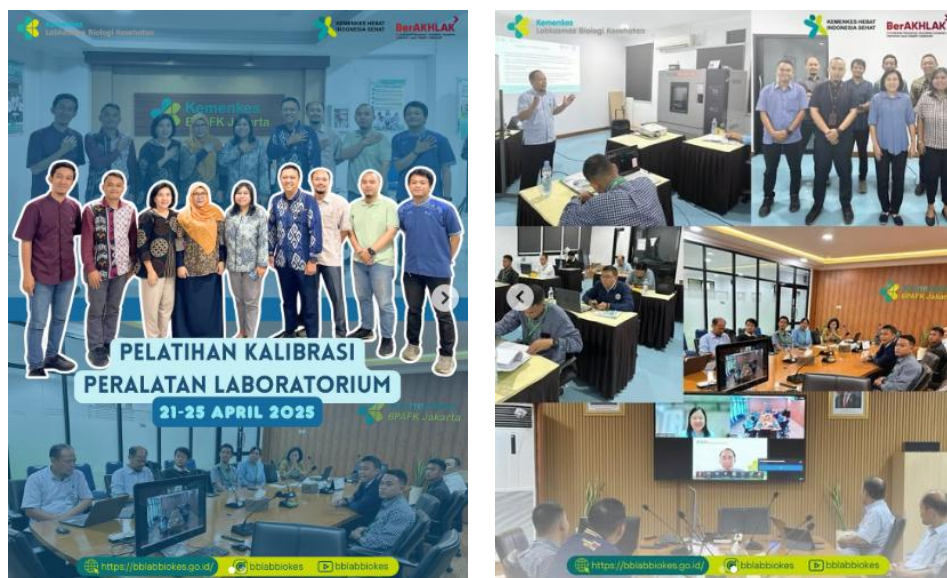
BLBK berperan aktif dalam kegiatan Finalisasi Draft Pedoman Surveilans Resistensi Antimikroba Klinis dan Lingkungan bagi Labkesmas yang dilaksanakan pada 15–17 April 2025 di Hotel Savero Styles, Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Kerja Tata Kelola Laboratorium Kesehatan dengan metode hybrid, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, WHO Indonesia, Flemming Fund, EHI Indonesia, dan Tim Global Fund. Pedoman yang dibahas akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem surveilans AMR di Indonesia. Dengan partisipasi aktif dalam pertemuan ini, BBLBK berkontribusi dalam penyempurnaan pedoman yang aplikatif dan terstandar, serta mendukung implementasi surveilans AMR yang lebih efektif di seluruh Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas). Diharapkan, pedoman berbasis bukti ini dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan resistensi antimikroba secara lebih terorganisir.



Gambar 3.41. Dokumentasi Pertemuan Finalisasi Draft Pedoman Surveilans Resisten Antimikroba (AMR)

29) Pelatihan Kalibrasi Peralatan Laboratorium

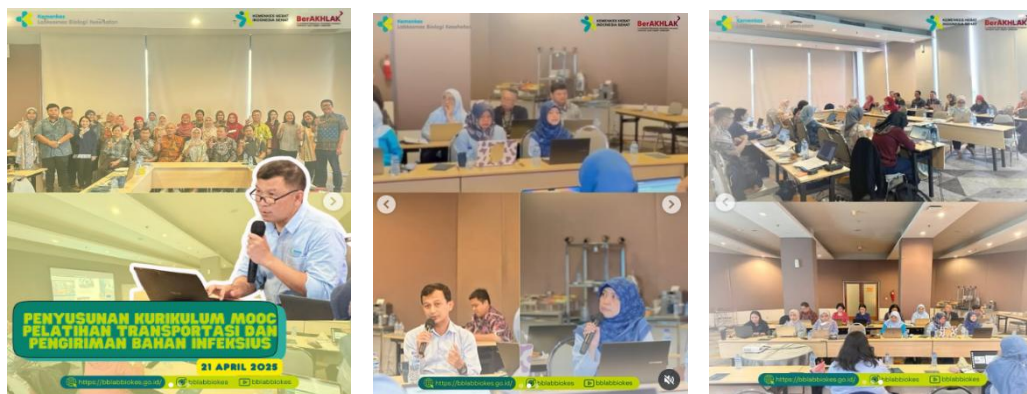
Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas Laboratorium TB. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang di wakili oleh Yakub Gunawan, S.T. dan Khaery Gunawan, S.T. mengikuti pelatihan “Pengujian dan Kalibrasi Mikropipet, Centrifuge, Enkosur dan Timbangan Analitik” yang diselenggarakan oleh Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer pada 21-25 April 2025 di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK). Pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami tentang teori dasar pengujian dan kalibrasi alat laboratorium, metode kerja pengujian dan kalibrasi alat laboratorium, melakukan praktek pengujian dan kalibrasi alat laboratorium, dan dapat mengambil data, mengolah data, dan mengevaluasi data pengujian dan kalibrasi alat laboratorium.



Gambar 3.42. Dokumentasi Pelatihan Kalibrasi Peralatan Laboratorium

30) Penyusunan Kurikulum MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

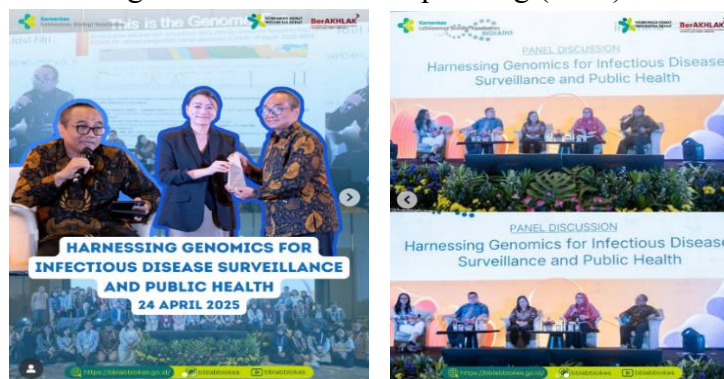
Pada tanggal 21-22 April 2025, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI, mengadakan kegiatan Penyusunan Kurikulum Massive Open Online Course (MOOC) untuk Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tahapan pre-analitik diagnosis penyakit menular, surveilans kesehatan masyarakat, dan KLB, serta untuk memperkuat kompetensi petugas laboratorium dalam menerapkan standar biosafety dan biosecurity pada proses transportasi dan pengiriman bahan infeksius, sesuai dengan regulasi nasional maupun internasional. Kegiatan ini dihadiri oleh para profesional dan pemangku kepentingan termasuk dari BBLBK untuk bersama-sama merancang kurikulum pelatihan yang komprehensif dan aplikatif.



Gambar 3.43. Dokumentasi Penyusunan Kurikulum MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

31) *Harnessing Genomics for infectious disease surveillance and public health*

Pada tanggal 24 April 2025 dr. Darmawali Handoko, M.Epid, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, berkesempatan menjadi salah satu pembicara di Kegiatan Harnessing Genomics for Infectious Disease Surveillance and Public Health. Acara ini adalah ajang pertemuan para klinisi, peneliti, dan praktisi genomik untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik terbaik terkait penerapan teknologi Next Generation Sequencing (NGS).



Gambar 3.44. Dokumentasi *Harnessing Genomics for infectious disease surveillance and public health*

32) Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemeriksaan PCR

Pada 28 April – 1 Mei 2025, BBLBK menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan PCR Surveilans Surveilans Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) bagi Petugas Laboratorium Kesehatan di Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai direktorat teknis di Kementerian Kesehatan, BBPK Ciloto, WHO, CDC, dan UNDP, serta tim teknis internal dari BBLBK. Selama empat hari, peserta aktif menyusun draft awal kurikulum dan modul pelatihan yang mencakup materi struktur pembelajaran, metode pelatihan, hingga evaluasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman pelatihan yang aplikatif dan terstandar, demi memperkuat sistem surveilans laboratorium untuk deteksi dini penyakit menular, khususnya ILI dan SARI. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen BBLBK dalam mendukung peningkatan mutu SDM laboratorium kesehatan serta penguatan ketahanan sistem kesehatan nasional.

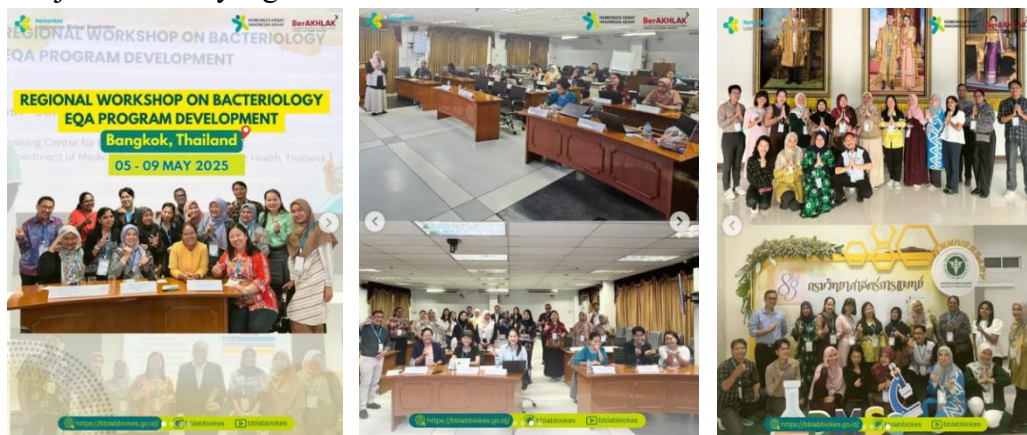


Gambar 3.45. Dokumentasi Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemeriksaan PCR

33) Regional Workshop on Bacteriology EQA Program Development

Balai Besar Laboratorium Kesehatan berpartisipasi dalam kegiatan “Regional Workshop on Bacteriology EQA Program Development” yang diadakan oleh Regional Public Health Laboratory (RPHL) bekerja sama dengan CDC melalui IQLS dan Departemen Ilmu Kedokteran, Thailand, pada tanggal 5–9 Mei 2025 di Bangkok, Thailand. Kegiatan ini difasilitasi oleh dukungan dari Global Fund. Kegiatan ini melibatkan peserta dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perwakilan dari BBLBK, Novi Amalia, turut berpartisipasi dalam workshop ini yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan program Penilaian Mutu Eksternal (EQA) nasional yang berkelanjutan dan selaras dengan standar ISO. Workshop ini juga menjadi wadah penting dalam mempererat kolaborasi

antarnegara dalam peningkatan mutu laboratorium. Diharapkan melalui kegiatan ini, laboratorium kesehatan di Indonesia semakin siap dalam menerapkan sistem manajemen mutu yang konsisten berstandar internasional.



Gambar 3.46. Dokumentasi Regional Workshop on Bacteriology EQA Program Development

34) Kunjungan Lapangan UNDP ke BBLBK Koordinasi terkait Aplikasi SMILE

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) mendapat kunjungan koordinasi dari UNDP Indonesia yang bertujuan untuk mendalami alur pencatatan data alat pemeriksaan laboratorium, BMHP, dan reagen dalam aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik (SMILE). Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan logistik kesehatan dan memastikan implementasi sistem SMILE dapat berjalan dengan optimal di BBLBK. Kunjungan dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu pada Jumat, 2 Mei 2025, untuk mendalami proses pencatatan data dalam SMILE, dan pada Jumat, 9 Mei 2025, untuk melakukan presentasi penggunaan aplikasi SMILE dan ME-SMILE dalam pengelolaan limbah laboratorium. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan limbah serta bahan medis habis pakai (BMHP) secara lebih terstruktur dan efisien serta terjalin koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan logistik kesehatan di seluruh fasilitas laboratorium, guna mencapai sistem yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi.



Gambar 3.47. Dokumentasi Kunjungan Lapangan UNDP ke BBLBK Koordinasi terkait Aplikasi SMILE

35) Pertemuan Lanjutan Analisis Gap ISO/IEC 17043

Pada tanggal 5–6 Mei 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) kembali mengadakan pertemuan lanjutan Analisis Gap ISO/IEC 17043. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian persiapan akreditasi BBLBK sebagai National Influenza Center (NIC) sekaligus sebagai penyelenggara uji profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal (PME) pemeriksaan influenza tahun 2025. Proses diskusi mendalam dilakukan mencakup aspek umum, sumber daya, proses, serta sistem manajemen agar seluruh proses PME di BBLBK dapat berjalan secara profesional dan terakreditasi sesuai ISO/IEC 17043.



Gambar 3.48. Dokumentasi Pertemuan Lanjutan Analisis Gap ISO/IEC 17043

36) Sosialisasi Spesimen Penyakit KLB bagi Petugas Lab Sudinkes Kota Jakarta Selatan

Pada tanggal 30 April 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) berpartisipasi sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Spesimen Penyakit KLB bagi petugas Laboratorium di Rumah Sakit, bertempat di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. BBLBK membahas tentang Penanganan spesimen potensial wabah KLB karena bakteri dan Penanganan spesimen potensial wabah KLB karena virus Kegiatan ini merupakan bagian dari

upaya Pengendalian dan Pencegahan Penularan serta komitmen BBLBK dalam mendukung Kesehatan Masyarakat.



Gambar 3.49. Dokumentasi Sosialisasi Spesimen Penyakit KLB bagi Petugas Lab SudinKes Kota Jakarta Selatan

37) Survei Lapangan Terkait Penatausahaan Aset di Lab Gizi Bogor

Pada tanggal 6 Mei 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, mengadakan kegiatan Survei Lapangan terkait Penatausahaan Aset di Lab Gizi, Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola aset berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan verifikasi fisik atas aset yang digunakan dalam operasional laboratorium. Tim survei yang terdiri dari perwakilan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta unit pengelola barang melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi, keberadaan, dan pencatatan aset yang ada. Selain itu, dilakukan juga pengecekan kesesuaian antara data fisik dengan data dalam sistem penatausahaan aset. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.



Gambar 3.50. Dokumentasi Survei Lapangan Terkait Penatausahaan Aset di Lab Gizi Bogor

38) Update Pemeriksaan Netralisasi Antibodi Spesimen Uji Klinis Booster Covid-19 (BCOV) 2021 dan 2022 dan On The Job Training (OJT) di BBLBK

Pada tanggal 7 Mei 2025, tim dari Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) melakukan kunjungan ke Universitas Padjadjaran. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pembaruan kegiatan pemeriksaan Netralisasi Antibodi terhadap spesimen uji klinis BCOV21 dan BCOV22, serta melakukan koordinasi teknis terkait persiapan pelaksanaan On the Job Training (OJT). Kegiatan OJT kemudian dilaksanakan pada 21–23 Mei 2025 di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, dengan rangkaian sesi materi dan praktik langsung (hands-on) yang mencakup prinsip dasar, alur pelaksanaan, hingga analisis hasil pemeriksaan Netralisasi Antibodi. Melalui kegiatan ini, BBLBK berharap dapat meningkatkan kapasitas teknis personel laboratorium serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pemeriksaan laboratorium yang berkualitas.



Gambar 3.51. Dokumentasi Update Pemeriksaan Netralisasi Antibodi Spesimen Uji Klinis Booster Covid-19 (BCOV) 2021 dan 2022 dan On The Job Training (OJT) di BBLBK

39) Rekonsiliasi Data Kepesertaan PPNPN Serta Iuran Semester I Tahun 2025

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah melaksanakan Proses rekonsiliasi data kepesertaan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) serta iuran Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan proses pencocokan dan penyelarasan data kepesertaan PPNPN dengan data iuran yang telah dibayarkan untuk semester pertama tahun 2025. Dalam kegiatan ini pengelolaan data kepegawaian dan keuangan terlibat secara langsung dengan tujuan untuk

memastikan bahwa data kepesertaan PPNPN dan pencatatan iuran sudah akurat dan sesuai serta menjamin pemenuhan hak bagi karyawan.



Gambar 3.52. Dokumentasi Rekonsiliasi Data Kepesertaan PPNPN Serta Iuran Semester I Tahun 2025

40) On Job Training Surveilans Avian Influenza (Flu Burung) Terpadu Lintas Sektor

Pada tanggal 6–9 Mei 2025, perwakilan dari BBLBK berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan On The Job Training (OJT) Surveilans Avian Influenza Terpadu Lintas Sektor yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan pengendalian zoonosis yang menjadi perhatian global, khususnya terhadap Avian Influenza (Flu Burung). Tujuannya dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas surveilans dalam mendeteksi potensi wabah, memperkuat jejaring dan kolaborasi lintas sektoral, serta mendorong pendekatan One Health dalam penguatan sistem surveilans.



Gambar 3.53. Dokumentasi On Job Training Surveilans Avian Influenza (Flu Burung) Terpadu Lintas Sektor

41) Bimbingan Mentoring Persiapan Akreditasi 15189:2022

Pada tanggal 8–9 Mei 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang bekerja sama dengan FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics) melaksanakan kegiatan Bimbingan Laboratorium TB Menuju Akreditasi SNI ISO 15189:2022 sebagai bagian dari program “Mentoring Indonesia’s TB Laboratories Towards ISO 15189 Accreditation, through a TB SLMTA approach”. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pendampingan langsung (onsite mentoring) guna memperkuat kesiapan laboratorium dalam proses menuju akreditasi ISO 15189:2022, khususnya dalam layanan diagnosis Tuberkulosis (TB). Diharapkan, melalui pendampingan ini seluruh tim laboratorium semakin siap dalam memenuhi standar mutu internasional, serta mampu meningkatkan kualitas layanan diagnostik secara berkesinambungan.



Gambar 3.54. Dokumentasi Bimbingan Mentoring Persiapan Akreditasi 15189:2022

42) Pertemuan Penyusunan Dokumen SNI/ISO 17043:2023

Pertemuan Penyusunan ISO 17043:2023 telah dilaksanakan pada tanggal 14–17 Mei 2025 di Bandung. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam upaya menyelaraskan pemahaman dan memperkuat komitmen bersama dalam penerapan standar mutu uji profisiensi. Dengan suasana yang hangat dan kolaboratif, para peserta berdiskusi secara mendalam untuk menyusun dokumen yang sesuai dengan ketentuan terbaru.



Gambar 3.55. Dokumentasi Pertemuan Penyusunan Dokumen SNI/ISO 17043:2023

43) RPHL Global Leadership Laboratory Program (GLLP) Training of Trainers and Training of Mentors

Perwakilan Indonesia dari sektor laboratorium kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT) dan Training of Mentors (ToM) Global Laboratory Leadership Programme (GLLP) yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand, pada 12–16 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Regional Public Health Laboratory (RPHL) Network bersama WHO, FAO, WOH, CDC, dan mitra teknis lainnya dalam mendukung penguatan kapasitas laboratorium di negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Melalui pelatihan ini, Indonesia mendorong terbentuknya pelatih dan mentor GLLP dengan Mengembangkan kapasitas kepemimpinan laboratorium nasional, Mendorong kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan One Health, Meningkatkan kesiapsiagaan dan respons penyakit menular di masa depan. Dengan komitmen kuat, Indonesia siap memperkuat sistem laboratorium kesehatan sebagai pilar utama ketahanan kesehatan global.



Gambar 3.56. Dokumentasi RPHL Global Leadership Laboratory Program (GLLP) Training of Trainers and Training of Mentors

Pernapasan Potensial KLB/Wabah

44) On The Job Training Sistem Rujukan Spesimen Penyakit

Pada tanggal 14–17 Mei 2025, tim dari BBLBK hadir sebagai fasilitator dalam kegiatan On the Job Training (OJT) Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah di Pintu Masuk dan Wilayah Regional I Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan deteksi dini, pengelolaan spesimen (pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik), serta pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi guna menghadapi ancaman KLB/wabah. Dalam kegiatan ini, tim dari BBLBK menyampaikan materi mulai dari prosedur pengambilan spesimen, pengepakan, hingga pengiriman spesimen sesuai standar. Tak ketinggalan, juga diberikan pembekalan mengenai Biosafety dan tata cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang baik dan benar.



Gambar 3.57. Dokumentasi On The Job Training Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah

45) Orientasi Program Rightsizing untuk Surveilans Sentinel ILI-SARI

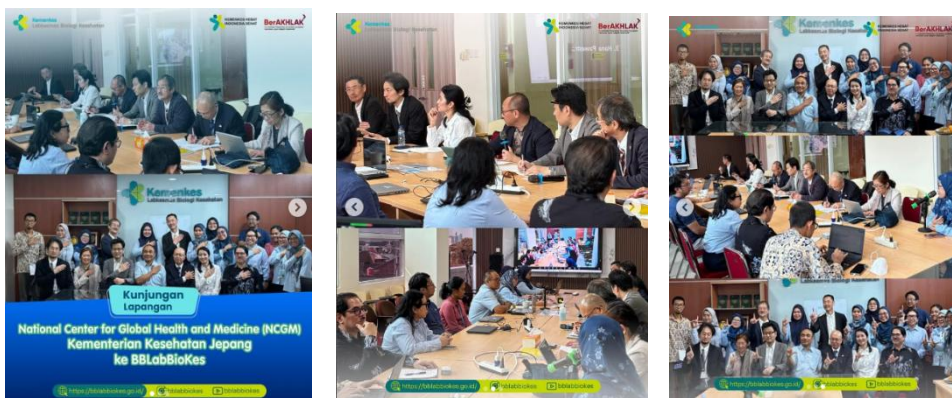
Kegiatan Orientasi Program Rightsizing untuk surveilans Influenza-Like Illness (ILI) dan Severe Acute Respiratory Infection (SARI) telah diselenggarakan pada tanggal 14–16 Mei 2025 di Kota Depok. Kegiatan ini difokuskan pada upaya peningkatan jumlah spesimen dari site ILI-SARI sebagai bagian dari penguatan sistem surveilans penyakit menular. Semoga hasil dari orientasi ini dapat mendukung optimalisasi pengumpulan data dan spesimen dalam surveilans ILI-SARI di Indonesia.



Gambar 3.58. Dokumentasi Orientasi Program Rightsizing untuk Surveilans Sentinel ILI-SARI

46) National Center for Global Health and Medicine (NCGM) Kementerian Kesehatan Jepang ke BBLabBioKes

Pada tanggal 19 Mei 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) menerima kunjungan dari The National Center for Global Health and Medicine (NCGM), Kementerian Kesehatan Jepang. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda “Initial Assessment for the Development of National Essential Diagnostic List (NEDL) in ASEAN Countries” yang berlangsung pada 19–23 Mei 2025. Dalam kunjungan ini, dilakukan diskusi mendalam mengenai berbagai aspek penting mengenai sistem laboratorium kesehatan masyarakat. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk saling bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan diagnostik yang berkualitas.



Gambar 3.59. Dokumentasi National Center for Global Health and Medicine (NCGM) Kementerian Kesehatan Jepang ke BBLBK

47) On Job Training Surveilans Avian Influenza (Flu Burung) Terpadu Lintas Sektor

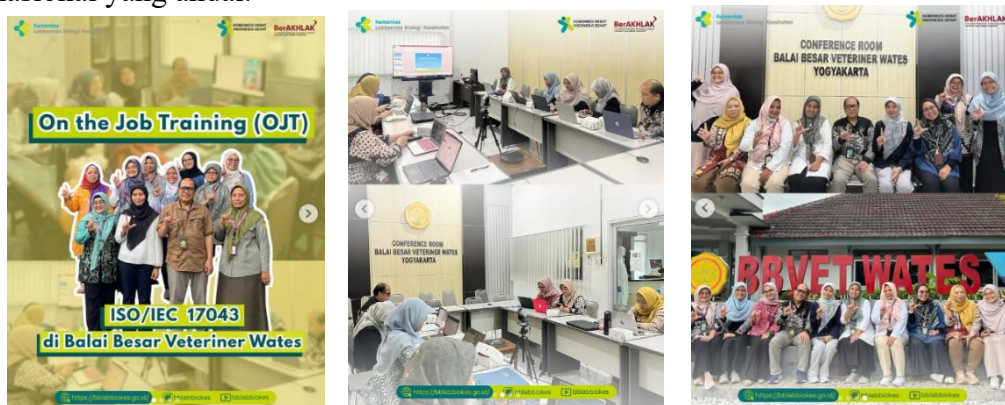
Pada tanggal 19–23 Mei 2025, BBLBK berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan On The Job Training (OJT) Surveilans Avian Influenza (Flu Burung) Terpadu Lintas Sektor yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam pengendalian zoonosis, khususnya terhadap High Pathogenic Avian Influenza (HPAI) atau Flu Burung yang masih menjadi perhatian global.



Gambar 3.60. Dokumentasi On Job Training Surveilans Avian Influenza (Flu Burung) Terpadu Lintas Sektor

48) On the Job Training (OJT) ISO/IEC 17043

Pada 20–23 Mei 2025, BBLBK mengikuti On the Job Training (OJT) di Balai Besar Veteriner Wates sebagai bagian dari penguatan peran sebagai National Influenza Center (NIC) sekaligus peningkatan kapasitas sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) 17043 untuk pemeriksaan PCR influenza dan COVID-19. Pelatihan ini dilakukan melalui metode praktik langsung dan pendampingan intensif oleh tim ahli, bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis, meningkatkan kesiapan operasional, serta menghadapi tantangan dalam pelaksanaan uji profisiensi di lapangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kompetensi dan mutu layanan BBLBK dalam rangka pemenuhan standar akreditasi internasional sebagai NIC dan penyelenggara uji profisiensi nasional yang andal.



Gambar 3.61. Dokumentasi On the Job Training (OJT) ISO/IEC 17043

49) Penyusunan Modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

Pada tanggal 26–28 Mei 2025, tim dari BBLBK berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius. Transportasi dan pengiriman bahan infeksius memegang peranan penting dalam sistem laboratorium kesehatan masyarakat, terutama dalam mendukung tahapan pre-analitik diagnosis penyakit menular, surveilans kesehatan masyarakat, serta penanganan kejadian luar biasa (KLB). Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium dalam menerapkan standar biosafety dan biosecurity terkait transportasi dan pengiriman bahan infeksius sesuai dengan regulasi Nasional maupun Internasional.



Gambar 3.62. Dokumentasi Penyusunan Modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

50) Workshop Peningkatan Wawasan Petugas Surveilans RS dan Puskesmas di Jakarta Timur

Pada tanggal 25 Mei 2025 BBLBK berpartisipasi sebagai narasumber yang diwakili oleh Sundari dan dr. Mursinah, Sp.MK pada acara peningkatan wawasan petugas surveilans RS dan Puskesmas di wilayah Jakarta Timur. Pada pertemuan ini membahas tentang bagaimana manajemen tata laksana spesimen PD3I, dan new emerging disease dan penyakit lainnya.



Gambar 3.63. Dokumentasi Workshop Peningkatan Wawasan Petugas Surveilans RS dan Puskesmas di Jakarta Timur

51) Penerimaan CPNS Baru Tahun 2025 di BBLBK

Pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, sebanyak 14 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2024 dari berbagai jabatan diterima oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (dr. Darmawali Handoko, M. Epid), di dampingi oleh Kepala Subbag Administrasi Umum (Budiyanto, ST, M.Tr.A.P) yang bertempat di Ruang Rapat Biorepository. Dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan memberikan arahan dan menekankan sebagai Calon ASN yang ditempatkan di Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan perlu mengetahui 4D yaitu bagaimana (Dikenal, Diterima, Disukai dan Dipercaya) di dalam menjalankan tugas sehari-hari di lingkungan kerja dimana ditugaskan, dan diakhiri dengan ucapan selamat dan sukses kepada para CPNS formasi 2024 menjadi bagian dari ASN di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, semoga tugas baru ini selalu diberkahi dan menjadi langkah awal menuju kesuksesan.



Gambar 3.64. Dokumentasi Penerimaan CPNS Baru Tahun 2025 di BBLBK

52) Pertemuan Pembahasan Dokumen Mutu Akreditasi SNI ISO 15189

Pada tanggal 3 hingga 5 Juni 2025, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan laboratorium serta mempersiapkan proses akreditasi laboratorium kesehatan sesuai dengan standar SNI ISO 15189:2022, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Pembahasan Dokumen Mutu Akreditasi SNI ISO 15189. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau, menyempurnakan, dan menyelaraskan dokumen mutu laboratorium agar sesuai dengan persyaratan standar akreditasi terbaru, guna mendukung tercapainya pelayanan laboratorium yang andal, akurat, dan berkualitas.



Gambar 3.65. Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Dokumen Mutu Akreditasi SNI ISO 15189

53) Refreshing Mikroskopis Malaria Bagi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM) di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta

Kegiatan *Refreshing Mikroskopis Malaria bagi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM)* diselenggarakan pada Senin–Selasa, 2–3 Juni 2025! Kegiatan ini diikuti oleh para ATLM dari Puskesmas dan Rumah Sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dengan semangat belajar dan antusiasme tinggi, para peserta mendapatkan pembekalan materi dan praktik langsung yang dipandu oleh narasumber dari Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Budi Prasetyorini, SKM. Peserta hadir dari berbagai institusi seperti RS Gatot Subroto, RS Mintohardjo, RS Cipto Mangunkusumo, RSPI Sulianti, RS Marinir Cilandak, RSUD Kepulauan Seribu, RSUD Tanjung Priok, RS Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Puskesmas dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Turut hadir pula Kepala Program Sudin, Kepala Subkel Kesling, dan Kepala Seksi PPMPTM Dinkes Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3.66. Dokumentasi Refreshing Mikroskopis Malaria Bagi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM) di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta

54) On The Job Training (OJT) Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah

Berlangsung pada tanggal 24–27 Mei 2025 di Makassar, kegiatan On The Job Training Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah di Pintu Masuk dan Wilayah sukses diselenggarakan dengan semangat kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kota/Kabupaten, serta Balai dan Balai Besar Karantina Kesehatan dari berbagai wilayah. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan turut ambil bagian melalui kehadiran Markus Evan Anggia, Ari Salbiah, Sauma Roma Intan, dan Arie Ardiansyah Nugraha sebagai Narasumber dalam memperkuat jejaring sistem rujukan spesimen di lapangan.



Gambar 3.67. Dokumentasi On The Job Training (OJT) Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah

55) Pertemuan Coaching Intensif Finalisasi Dokumen ISO/IEC 17043:2023

BBLBK melaksanakan kegiatan coaching intensif sebagai langkah strategis dalam proses finalisasi dokumen ISO/IEC 17043:2023, standar internasional untuk penyelenggara Program Uji Profisiensi (Proficiency Testing/PT). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen mutu, meningkatkan pemahaman tim teknis, serta memperkuat komitmen BBLBK dalam memberikan layanan laboratorium yang berkualitas dan terakreditasi.



Gambar 3.68. Dokumentasi Pertemuan Coaching Intensif Finalisasi Dokumen ISO/IEC 17043:2023

56) Implementasi Surveilans Terpadu Avian Influenza Sebagai Tindak Lanjut dari Workshop dan On The Job Training

Sebagai bagian dari upaya pengendalian Avian Influenza (AI) yang bersifat zoonotik, Tim BBLBK berperan serta dalam Implementasi Surveilans Terpadu Avian Influenza di site sentinel Kota Surakarta. Kegiatan surveilans terintegrasi ini, berfokus pada pengambilan spesimen dari manusia, unggas, dan lingkungan.



Gambar 3.69. Dokumentasi Implementasi Surveilans Terpadu Avian Influenza Sebagai Tindak Lanjut dari Workshop dan On The Job Training

57) Pelatihan Audit Internal SNI ISO 15189:2022 Berbasis SNI ISO 19011:2018

Dalam rangka meningkatkan mutu dan keandalan sistem manajemen laboratorium, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mengikuti Pelatihan Audit Internal SNI ISO 15189:2022 yang berbasis pada SNI ISO 19011:2018. Kegiatan ini bertujuan untuk membimbing peserta dengan keterampilan dalam melaksanakan audit internal yang efektif, sesuai standar internasional, demi menjamin kualitas layanan diagnostik TB yang akurat dan terpercaya. Dengan pembimbingan langsung dari para ahli, diharapkan audit internal dapat menjadi alat evaluasi dan peningkatan berkelanjutan yang berdampak nyata.



Gambar 3.70. Dokumentasi Pelatihan Audit Internal SNI ISO 15189:2022 Berbasis SNI ISO 19011:2018

58) On The Job Training (OJT) ISO/IEC 17043

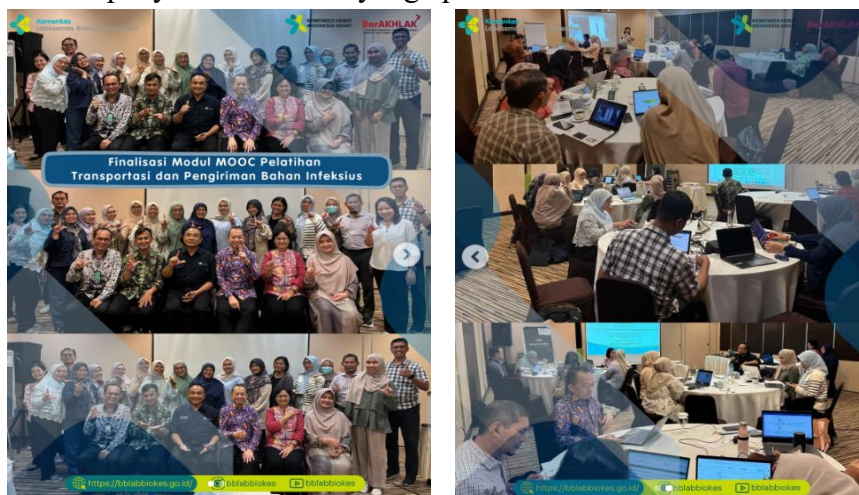
Pada 10-13 Juni 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) mengikuti On the Job Training (OJT) di Balai Besar Labkesmas Palembang sebagai upaya penguatan peran sebagai National Influenza Center (NIC) sekaligus peningkatan kapasitas sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) sesuai standar ISO/IEC 17043 untuk pemeriksaan PCR influenza dan COVID-19. Kegiatan ini penting untuk memastikan layanan yang akurat dan terpercaya dalam mendukung kesehatan masyarakat. Pelatihan dilakukan dengan metode praktik langsung dan pendampingan intensif oleh tim ahli, sehingga peserta mendapatkan pengalaman nyata dalam pelaksanaan uji profisiensi. Pendekatan ini memperkuat pemahaman teknis, kesiapan operasional, serta kemampuan menghadapi tantangan di lapangan secara komprehensif. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi BBLBK dalam meningkatkan kompetensi dan mutu layanan laboratorium, sekaligus memenuhi standar akreditasi internasional. Diharapkan pelatihan ini memperkuat kapasitas SDM, mendukung proses akreditasi, dan mendorong kemandirian BBLBK dalam penyelenggaraan uji profisiensi yang berkualitas dan terpercaya.



Gambar 3.71. Dokumentasi On The Job Training (OJT) ISO/IEC 17043

59) Finalisasi Modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) telah melaksanakan kegiatan Finalisasi Modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius pada 10–12 Juni 2025 bertempat di Hotel Santika Bogor. Modul ini akan menjadi bagian penting dalam mendukung pembelajaran daring bagi tenaga laboratorium di seluruh Indonesia. Semangat kolaborasi dan komitmen bersama terwujud dalam penyusunan modul yang aplikatif dan sesuai standar biosafety.



Gambar 3.72. Dokumentasi Finalisasi Modul MOOC Pelatihan Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

60) Kegiatan Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan baru saja menyelesaikan peran sebagai narasumber dalam Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini, dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging. Bersama perwakilan dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, dan instansi teknis lainnya di Provinsi Riau, yang berlangsung pada 10-14 Juni 2025 di Hotel Bono, Pekanbaru. Kami berbagi materi penting tentang pengelolaan spesimen penyakit infeksi emerging, rantai dingin, biosafety, dan biosecurity. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pemahaman teknis dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud komitmen BBLBK dalam mendukung kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan nasional.



Gambar 3.73. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging

61) Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium Tuberkulosis

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Laboratorium dengan fokus pada penggunaan alat MGIT, yang dilaksanakan pada tanggal 10–12 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para peserta yang berdedikasi dalam peningkatan kualitas laboratorium, yaitu Sundari, Novi Amalia, Kartika Pela, Iis Imroatun Sholihah, dan Susan Novita Sari. Melalui pelatihan ini, diharapkan kompetensi teknis dalam pengelolaan alat MGIT dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelayanan laboratorium yang andal dan bermutu.



Gambar 3.74. Dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium Tuberkulosis

62) On The Job Training (OJT) Pemeriksaan Congenital Rubella Syndrom (CRS)

Dalam rangka penguatan kapasitas laboratorium jejaring Campak Rubella dan Congenital Rubella Syndrome (CRS), Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) menyelenggarakan kegiatan On The Job Training pemeriksaan CRS. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17–21 Juni 2025 bertempat di Balai Besar Labkesmas Banjarbaru. Pelatihan dilakukan secara praktik langsung (hands-on) di laboratorium dengan supervisi dari tim BBLBK. Melalui kegiatan ini, diharapkan kompetensi tenaga laboratorium dalam mendeteksi dan menangani kasus CRS di Indonesia dapat semakin meningkat.



Gambar 3.75. Dokumentasi OJT Pemeriksaan Congenital Rubella Syndrom (CRS)
63) Meningkatkan peran laboratorium kesehatan masyarakat menuju Indonesia Emas

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang diwakili oleh Bapak dr.Darmawali Handoko, M.Epid selaku kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berpartisipasi sebagai narasumber dalam Seminar Ilmiah yang merupakan rangkaian dari Musyawarah Nasional II dan Forum Ilmiah IV ASLABKESDA INDONESIA. Acara yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Juni 2025 di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat Menuju Indonesia Emas”. Dengan fokus dalam materi penting mengenai “Peran dan Dukungan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Terkait Penyakit Emerging dan New Emerging.”



Gambar 3.76. Dokumentasi Meningkatkan Peran Laboratorium Kesehatan Masyarakat Menuju Indonesia Emas

64) Penyusunan Tools Assessment Kapasitas Surveilans Sentinel ILI

Pada 23–26 Juni 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berpartisipasi dalam penyusunan Tools Assessment Kapasitas Pintu Masuk Negara yang diselenggarakan oleh Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Kemenkes RI, secara hybrid di Bandung. Kegiatan ini didukung narasumber dari WHO Indonesia, PAEI, dan FKM UI. Tools assessment ini bertujuan memperkuat sistem pemantauan dan deteksi dini penyakit menular di pintu-pintu masuk negara, khususnya melalui surveilans sentinel ILI yang terstruktur dan terstandar. Pelaksanaan surveilans diharapkan menjadi lebih efektif, kesiapsiagaan meningkat, serta respons terhadap potensi wabah dapat lebih cepat dan terintegrasi.



Gambar 3.77. Dokumentasi Penyusunan Tools Assessment Kapasitas Surveilans Sentinel ILI di Pintu Masuk Negara

65) On The Job Training (OJT) Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah di Pintu Masuk dan Wilayah

Kegiatan On the Job Training (OJT) sistem rujukan spesimen penyakit pernafasan potensial wabah/KLB di pintu masuk dan wilayah telah dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 24–27 Juni 2025. Selama empat hari penuh, para peserta mendapatkan pembekalan dan praktik langsung untuk memperkuat sistem deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi wabah di lapangan. Suasana pelatihan makin seru dan interaktif dengan kehadiran fasilitator hebat dari BBLBK: Novi Amalia, Tri Rahayu, Rulina Novianti, dan Aenun Dzikra Marsya, yang berbagi ilmu dan pengalaman dengan penuh semangat.



Gambar 3.78. Dokumentasi On The Job Training (OJT) Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah di Pintu Masuk dan Wilayah

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu awal Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun anggaran 2025 berdasarkan DIPA yang terbit pada bulan November 2023 dan berdasarkan Perjanjian Kerja awal tahun 2025 adalah sebesar Rp45.510.062.000 yang terdiri dari kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebesar Rp35.548.806.000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat sebesar Rp9.961.256.000. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah melakukan beberapa kali revisi anggaran selama Satu Semester tahun 2025 baik di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil DJPb, maupun DJA. Proses revisi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai macam kebutuhan, antara lain:

- a) Revisi DIPA ke-1 di tingkat DJA pada bulan Februari 2025 dengan tujuan Revisi Anggaran Efisiensi Belanja barang Rp30.910.107.000 dan Belanja Modal Rp300.223.000

- b) Revisi DIPA ke-2 di tingkat Kanwil DJPb pada bulan Februari 2025 dengan tujuan Pemenuhan Belanja Operasional.
- c) Revisi DIPA ke-3 di tingkat Kanwil DJPb pada bulan April 2025 dengan tujuan Penyesuaian Halaman III DIPA dan Pergeseran antar KRO.
- d) Revisi POK di tingkat KPA sebanyak 2 kali selama satu semester tahun 2025 dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2025 terkait dengan penyesuaian kebutuhan dari para penanggung jawab kegiatan serta Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Nomor PR.04.02/B.I/1925/2025 tanggal 14 Februari 2025 Hal: Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dari pagu sebesar Rp45.510.062.000, BBLBK mendapatkan distribusi *selfblocking* anggaran belanja barang sebesar Rp30.910.107.000 dan belanja modal sebesar Rp300.223.000 total *selfblocking* sebesar Rp31.210.330.000, sehingga total pagu efektif BBLBK Semester I tahun 2025 menjadi sebesar Rp14.299.732.000. distribusi alokasi dan realisasi anggaran BBLBK Semester I pada tahun 2025 selengkapnya terlihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8. Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

Kode	Unit Kerja/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)	%
		Awal	<i>Selfblocking</i> Barang dan Modal	Pagu Efektif		
	Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan	45.510.062.000	31.210.330.000	14.299.732.000	7.203.300.778	50,37
6993	Peningkatan Fasilitas, Mutu dan Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat	35.548.806.000	30.831.672.000	970.430.000	536.502.752	55,29
BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	875.540.000	768.460.000	99.580.000	53.583.926	53,81
CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	6.462.675.000	2.468.971.000	247.000.000	218.879.421	88,62
DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	916.824.000	901.073.000	23.251.000	5.880.000	25,29
PEA	Koordinasi	1.092.562.000	1.047.992.000	44.570.000	13.421.000	30,11
PEC	Kerja sama	116.000.000	96.890.000	19.110.000	340.000	1,78
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	540.485.000	511.588.000	28.897.000	2.375.000	8,22
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	24.041.020.000	23.537.248.000	503.772.000	242.023.405	48,04
UBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.503.700.000	1.499.450.000	4.250.000	-	0,00
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas	9.961.256.000	378.658.000	13.329.302.000	6.666.798.026	50,02

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

Kode	Unit Kerja/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output	Alokasi Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)	%
		Awal	Selfblocking Barang dan Modal	Pagu Efektif		
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.754.522.000	302.081.000	13.233.011.000	6.643.503.426	50,20
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15.096.000	-	15.096.000	-	0,00
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	67.524.000	23.652.000	28.052.000	13.147.600	46,87
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	124.114.000	52.925.000	53.143.000	10.147.000	19,09

Sedangkan realisasi anggaran per-IKK Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan selama Semester I Tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan IKK Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun 2025

No.	Indikator	KRO/RO	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	a. PEA.001. Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	44.570.000	13.421.000	30,11
		b. QAH.001. Layanan Deteksi Dini dan Respon Kejadian Penyakit Menular	25.297.000	1.375.000	5,44
		c. QAH.003. Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium	3.600.000	1.000.000	27,78
2.	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	RAB.005. Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	503.772.000	242.023.405	48,04
3.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	UBA.001. Pembinaan, Pendampingan, dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	4.250.000	-	0,00

No.	Indikator	KRO/RO	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4.	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	BGD.002. Penilaian Kelayakan Operasional Layanan Labkesmas melalui Akreditasi	99.580.000	53.583.926	53,81
5.	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/atau internasional	PEC.001. Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional	19.110.000	340.000	1,78
6.	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	CCB.002. Pemeliharaan Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	247.000.000	218.879.421	88,62
TOTAL ANGGARAN			947.179.000	530.622.752	56,02

3.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan merupakan satuan kerja yang sebelumnya menjadi bagian dari Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK SDK) sebagai Laboratorium Nasional Prof. Dr. Sri Oemijati yang berada di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Perubahan besar dalam struktur organisasi terjadi pada tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut, Laboratorium Nasional Prof. Dr. Oemijati berganti nama menjadi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dan mengalami peralihan naungan, dari yang sebelumnya berada di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menjadi di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Dirjen Kesmas). Hal ini berdampak pula pada pemindahan aset Barang Milik Negara (BMN) dari BKPK ke BBLBK.

Wujud transparansi dan akuntabilitas sarana dan prasarana BBLBK dituangkan dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan BMN disusun menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN). Nilai BMN pada laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp132.609.805.797 nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi nilai BMN dalam pos perkiraan neraca dengan rincian seperti yang terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10. Laporan Posisi Barang Milik Negara Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Pertanggal 30 Juni 2025

Akun Neraca		Jumlah
Kode	Uraian	
117111	Barang Konsumsi	2.032.487.762
117199	Persediaan Lainnya	3.024.735.589
132111	Peralatan dan Mesin	202.662.607.205
133111	Gedung dan Bangunan	59.490.868.251
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(141.934.809.710)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.454.004.555)
JUMLAH		115.821.884.542

Sumber: Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca – Posisi Pertanggal 30 Juni 2025 – Anaudited Tahun Anggaran 2025

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja mencakup berbagai fasilitas, seperti gedung kantor yang digunakan oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan serta perangkat pengolah data (komputer, laptop, printer, dan scanner), sistem informasi dan komunikasi (platform media daring dan situs web), serta berbagai alat perkantoran penunjang lainnya merupakan salah satu faktor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas SDM dalam mencapai target kinerja.

Laboratorium kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan atau masyarakat. Laboratorium kesehatan membutuhkan sarana dan prasarana dengan desain khusus yang menjamin keamanan dan keselamatan SDM laboratorium, objek/bahan pemeriksaan serta lingkungan sekitar. Jika berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka standar tata bangunan dan ruang Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar memenuhi standar dalam peraturan tersebut.

3.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

a) Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran yang seharusnya dengan realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran yang tersedia. Pendekatan perhitungan pada tingkat RO digunakan untuk menilai efisiensi, yang dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi evaluasi kinerja anggaran. Proses ini dimulai pada awal tahun anggaran berikutnya setelah data realisasi anggaran per RO tersedia. Untuk menentukan nilai kinerja secara keseluruhan, semua indikator, termasuk penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, capaian output, dan efisiensi, harus dinyatakan dalam skala yang sama, yaitu nol hingga seratus persen.

Pengukuran efisiensi sumber daya di tingkat RO menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{RO} : Efisiensi RO tingkat satuan kerja
- $AARO_i$: Alokasi anggaran RO i
- $RARO_i$: Realisasi anggaran RO i
- CRO_i : Capaian RO i

Perhitungan efisiensi RO Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2025 terlihat pada Tabel 3.11

Tabel 3. 11. Efisiensi Rincian Output (RO) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Semester I Tahun Anggaran 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (2)	(6)=(5) - (4)
Penilaian Kelayakan Operasional	65%	99.580.000	53.583.926	64.727.000	11.143.074

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (2)	(6)=(5) - (4)
Layanan Labkesmas Melalui Akreditasi					
Pemeliharaan Alat Kesehatan Masyarakat	90%	247.000.000	218.879.421	222.300.000	3.420.579
Pelatihan Tata Kelola Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	42%	23.251.000	5.880.000	9.765.420	3.885.420
Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	34%	44.570.000	13.421.000	15.153.800	1.732.800
Pengelolaan Jaringan dan Kerjasama Nasional	87%	19.110.000	340.000	16.625.700	16.285.700
Layanan Deteksi Dini dan Respon Kejadian Penyakit Menular	31%	25.297.000	1.375.000	7.842.070	6.467.070
Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium	32%	3.600.000	1.000.000	1.152.000	152.000
Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	60%	503.772.000	242.023.405	302.263.200	60.239.795
Pembinaan, Pendampingan, dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	98%	4.250.000	0	4.165.000	4.165.000

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (2)	(6)=(5) - (4)
Layanan BMN	92%	5.000.000	3.776.000	4.600.000	824.000
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	34%	10.261.000	0	3.488.740	3.488.740
Layanan Umum	55%	183.960.000	90.979.310	101.178.000	10.198.690
Layanan Data dan Informasi	34%	8.513.000	0	2.894.420	2.894.420
Layanan Perkantoran	55%	13.025.277.00	6.548.748.11	7.163.902.35	615.154.234
		0	6	0	
Layanan Sarana Internal	70%	15.096.000	0	10.567.200	10.567.200
Layanan Manajemen SDM	60%	28.052.000	13.147.600	16.831.200	3.683.600
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	40%	13.999.000	680.000	5.599.600	4.919.600
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35%	10.274.000	0	3.595.900	3.595.900
Layanan Manajemen Keuangan	45%	17.066.000	6.290.000	7.679.700	1.389.700
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	35%	11.804.000	3.177.000	4.131.400	954.400
Jumlah		14.299.732.00	7.203.300.77	7.968.462.70	765.161.922
		0	8	0	
Efisiensi RO Unit Kerja					
= $\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$					5,35%
(7) = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)}$					

*Alokasi anggaran menggunakan pagu efektif setelah efisiensi belanja barang dan belanja modal

Nilai efisiensi yang dicapai Kementerian/Lembaga diperoleh dengan asumsi minimal sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai tertinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh sebab itu, transformasi skala efisiensi perlu dilakukan agar

diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal yaitu 100% (seratus persen). Sedangkan, jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal 0% (nol persen).

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi pada contoh pengukuran efisiensi, maka nilai efisiensi RO satuan kerja di atas adalah sebesar:

$$NE = 50\% + \left(\frac{5,35\%}{20} \times 50\right) = 63,37\%$$

Terlihat dari hasil perhitungan bahwa Nilai Efisiensi BBLBK pada Semester I tahun anggaran 2025 adalah sebesar 63,37%.

b) Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Sebagai satker yang baru berdiri di tahun 2024, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan masih belum memenuhi standar sesuai peraturan tersebut, seperti yang terlihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 12. Standar Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten Berdasarkan KMK RI. No. HK.01.07/Menkes/1801/2024

No	Jenis Tenaga Teknis	Labkesmas Tingkat 5	Ketersediaan
1	D3/D4 ATLM	35	14
2	D3/D4 Elektromedis	2	0
3	D3 Sanitasi /D4 Tenaga Kesling	0	0
4	D4/S1/S2 Epidemiolog	6	1
5	S1 Kesmas (peminatan Entomolog)	0	0
6	S2 Bioinformatika	1	0
7	S1 Biologi	5	10

No	Jenis Tenaga Teknis	Labkesmas Tingkat 5	Ketersediaan
8	S2 Biomedik/Bioteknologi/Biomolekuler	10	4
9	Kompetensi Mikrobiologi	2	2
10	D3 Analis Kimia/ S1 Kimia/Farmasi	15	7
11	Kompetensi Patologi Klinik	1	0
JUMLAH		77	38

Kedepannya, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan akan terus berupaya untuk memenuhi standar ketersediaan SDM tersebut melalui beberapa cara meliputi job vacancy dan CASN baik PNS maupun PPPK.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawainya, BBLBK memberikan kesempatan yang luas bagi para pegawainya untuk mengikuti berbagai macam pendidikan dan pelatihan terkait dengan jabatannya, serta difasilitasi juga dengan alih jabatan dari pelaksana menjadi fungsional salah satunya adalah fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan.

3.5. Penghargaan/ Apresiasi

Penghargaan yang diberikan oleh pihak eksternal untuk Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan selama satu semester tahun 2025, antara lain:

1. Sertifikat penghargaan atas peran serta dan turut aktif sebagai narasumber

Dalam rangka pertemuan koordinasi lintas sektor untuk pencegahan dan pengendalian penyakit campak dan pertusis berbasis laboratorium di labkesmas regional 1 pada tanggal 06 Mei s/d 09 Mei 2025. Rakor ini diselenggarakan dengan dukungan *Global Fund* melalui komponen *Resilient and Sustainable System for Health* (RSSH). Tujuannya adalah membangun ketahanan sistem kesehatan, khususnya dalam mendeteksi dan merespons penyakit menular yang berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan kabupaten/kota terpilih, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) tingkat 2, 3, dan 4, serta mitra teknis yang bergerak dalam bidang pemeriksaan laboratorium. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Aceh dan menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penguatan surveilans laboratorium. Balai Besar Laboratorium Kesehatan, turut hadir diwakili langsung oleh kepala Balai dr. Darmawali Handoko, M.Epid dan Ibu Yuni Rukmiati, M.Biomed yang hadir sebagai narasumber.



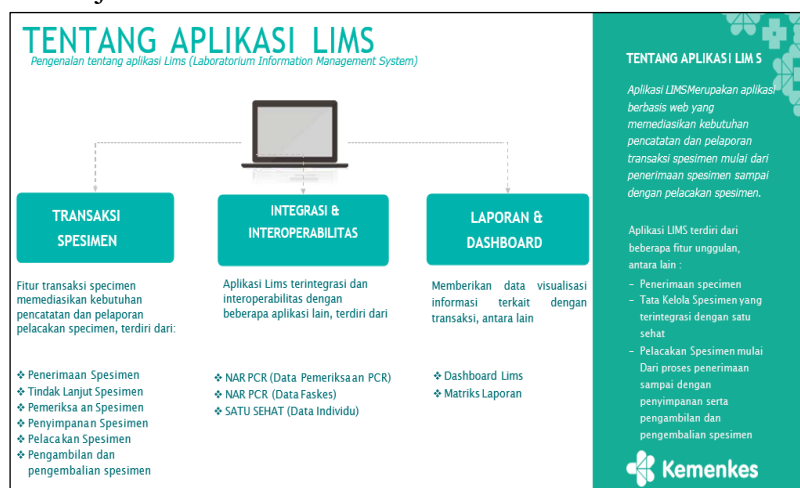
Gambar 3.79. Sertifikat Penghargaan atas peran serta dan turut aktif sebagai narasumber pencegahan dan pengendalian penyakit campak dan pertusis berbasis laboratorium di labkesmas regional 1

3.6. Inovasi/ Terobosan

Inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan pada tahun 2025, antara lain:

1. Aplikasi *Laboratory Information Management System (LIMS)*

Salah satu inovasi BBLBK pada tahun 2025 adalah pengembangan aplikasi *Laboratory Information Management System (LIMS)*. Aplikasi ini dibangun dalam rangka mengintegrasikan data hasil pemeriksaan pada aplikasi yang ada di seluruh Labkesmas tingkat 5 dan tingkat 4 ke dalam aplikasi LIMS, khususnya untuk pemeriksaan penyakit berpotensi wabah sebagai salah satu upaya kewaspadaan dini pengendalian wabah penyakit di Indonesia serta mendukung tugas dan fungsi BBLBK dalam rangka membina dan mengkoordinasikan hasil pemeriksaan labkesmas. Integrasi aplikasi ini dimaksudkan agar kita mendapatkan gambaran secara *realtime* terkait perkembangan dan sebaran penyakit berpotensi wabah sehingga data yang telah terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* dalam penyusunan kebijakan.



Gambar 3.80. Aplikasi *Laboratory Information Management System* (LIMS)

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK), sebagai laboratorium rujukan nasional dan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5, telah mengambil langkah inisiatif dengan mengimplementasikan *Laboratory Information Management System* (LIMS). Sistem LIMS yang dikembangkan oleh BBLBK diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data laboratorium, mulai dari pendaftaran spesimen hingga pelaporan hasil pemeriksaan. Namun, di tingkat regional, masih terdapat banyak Labkesmas yang menggunakan sistem manual atau aplikasi *Laboratory Information System* (LIS) yang tidak terintegrasi, sehingga pemanfaatan data secara nasional untuk mendukung surveilans berbasis laboratorium menjadi terbatas.

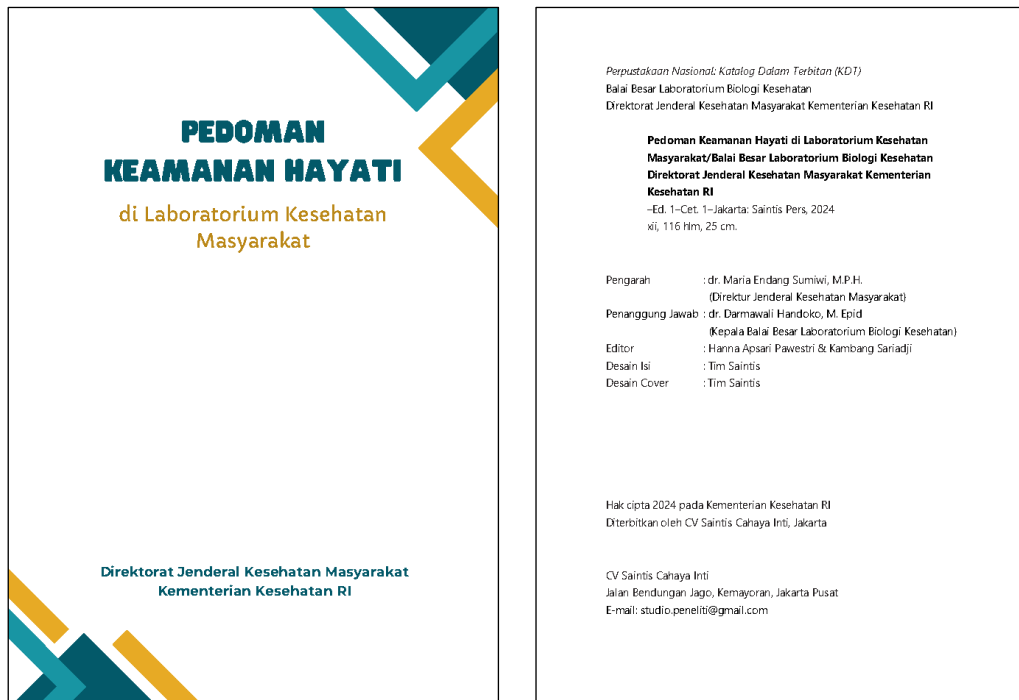
Optimalisasi penerapan LIMS di seluruh jaringan Labkesmas merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem surveilans penyakit yang lebih tangguh dan efektif. Dengan mengintegrasikan data laboratorium, dapat dibangun ekosistem data yang terhubung secara nasional, memungkinkan analisis data yang lebih menyeluruh dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selain itu, optimalisasi LIMS akan meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dari total 22 laboratorium kesehatan masyarakat di lingkup Ditjen Kesmas, baru 6 laboratorium atau sekitar 27,3% yang telah terintegrasi dengan Aplikasi LIMS milik BBLBK, sedangkan sisanya masih berproses untuk menangani beberapa kendala dalam proses *bridging*. Labkesmas yang telah melakukan integrasi antara lain:

- 1) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang
- 2) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
- 3) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
- 4) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado
- 5) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang
- 6) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara

2. Buku Pedoman Keamanan Hayati di Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Buku Pedoman Keamanan Hayati ini merupakan panduan menyeluruh yang dirancang untuk memperkuat pengelolaan dan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Indonesia. Pedoman ini disusun berdasarkan masukan dari para ahli internasional serta praktisi laboratorium, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari risiko yang ditimbulkan oleh material biologis berbahaya.



Gambar 3.81. Buku Pedoman Keamanan Hayati di Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Agen patogen berbahaya serta bahan-bahan laboratorium dapat disalahgunakan untuk kepentingan bioterrorisme, biokrimal, dan sabotase. Oleh karena itu, pedoman ini mencakup berbagai aspek implementasi keamanan hayati di Labkesmas, termasuk manajemen risiko laboratorium, penilaian risiko, hingga penerapan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah insiden keamanan hayati. Buku ini juga memberikan panduan bagi laboratorium kesehatan masyarakat dengan berbagai tingkatan.

Selain itu, pedoman ini menekankan peran penting Komite Keamanan Hayati dalam institusi Labkesmas. Komite ini bertugas mengawasi serta meninjau seluruh aktivitas laboratorium yang melibatkan material berisiko tinggi, memastikan penerapan prosedur keamanan yang mencakup kontrol akses, keamanan fisik, serta perlindungan informasi.

Pedoman ini juga memperkenalkan matriks keputusan yang membantu laboratorium dalam mengidentifikasi material dengan konsekuensi tinggi. Matriks ini memungkinkan penilaian risiko yang lebih komprehensif terhadap material biologis, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat virulensi, ketahanan terhadap dekontaminasi, dan potensi penggunaan sebagai senjata biologis. Dalam menghadapi ancaman bioterrorisme, biokrimal, sabotase, serta insiden lain yang terkait dengan keamanan hayati, pedoman ini menjadi referensi penting bagi Labkesmas.

3. Perjanjian Kerja Sama antara BBLBK dengan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri tentang Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3.

Perjanjian Kerja Sama antara BBLBK dengan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri tentang Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3.



PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGANGKUTAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
antara
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
dengan
PT WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
Nomor Pihak Pertama : HK.03.01/B.1X.2/ 637 /2025
Nomor Pihak Kedua : MOU/066/JPO/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima telah ditandatangani Perjanjian Kerja sama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), oleh dan antara :

1. BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

Jl. Percetakan Negara II No.23 Jakarta Pusat 10560

Bahwa dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **Yuswanto, ST** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN** berdasarkan SK HK 02.03/B.1X.2/10092/2024 tanggal 02 Desember 2024. Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. PT WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI

Jl. Raya Rangkasbitung Km. 6, RW 1, Desa Parakan, Kec. Jawilan, Kab. Serang 42177, Kab. Serang, 4217

Bahwa dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **Ipe Priyatna** selaku Direktur PT WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK/AEUKT/1/2024 tanggal 01 Januari 2024 serta Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 5 Tanggal 4 Agustus 2018, Akta Perubahan Terakhir No. 71 Tanggal 30 Agustus 2023 berikut Kontrak Kerjasama Operasional Nomor : 035.2/WPLI-TJS-BSJ-TPA-WSLI tanggal 26 Oktober 2023 dan Kontrak Kerjasama Operasional 294.2-WPLI-TPA-TJS tanggal 26 Oktober 2023 Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA** adalah institusi yang bergerak dalam jasa pelayanan dan pemeriksaan laboratorium yang membutuhkan jasa pengelolaan Limbah B3;
- PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan, pengumpulan dan pengolahan limbah B3 sesuai dengan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diterbitkan sebagaimana dimaksud diantaranya :
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3) :
 - Nomor : S.1009/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/3/2024, PT Wahana Pamunah Limbah Industri
 - Nomor : S.489/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021, PT Tenang Jaya Sejahtera
 - Nomor : S.907/PSLB3-PLB3/PPLB3/PK/PLB.3/12/2022, PT Tenang Jaya Sejahtera
 - Nomor : S.614/PSLB3-PLB3/PPLB3/PK/PLB.3/10/2023, PT Wahana Solusi Limbah Indonesia
 - Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3) di keluarkan Standar OSS :
 - Nomor : 91204042929020001 tanggal 30 Desember 2022, PT Wahana Pamunah Limbah Industri
 - Nomor : 81200028536140052 tanggal 03 Mei 2024, PT Tenang Jaya sejahtera
 - Nomor : 81200170617710011 tanggal 20 Februari 2024, PT Wahana Solusi Limbah Indonesia

Gambar 3.82. Perjanjian Kerja Sama antara BBLBK dengan PT. Wahana Pamunah Limbah

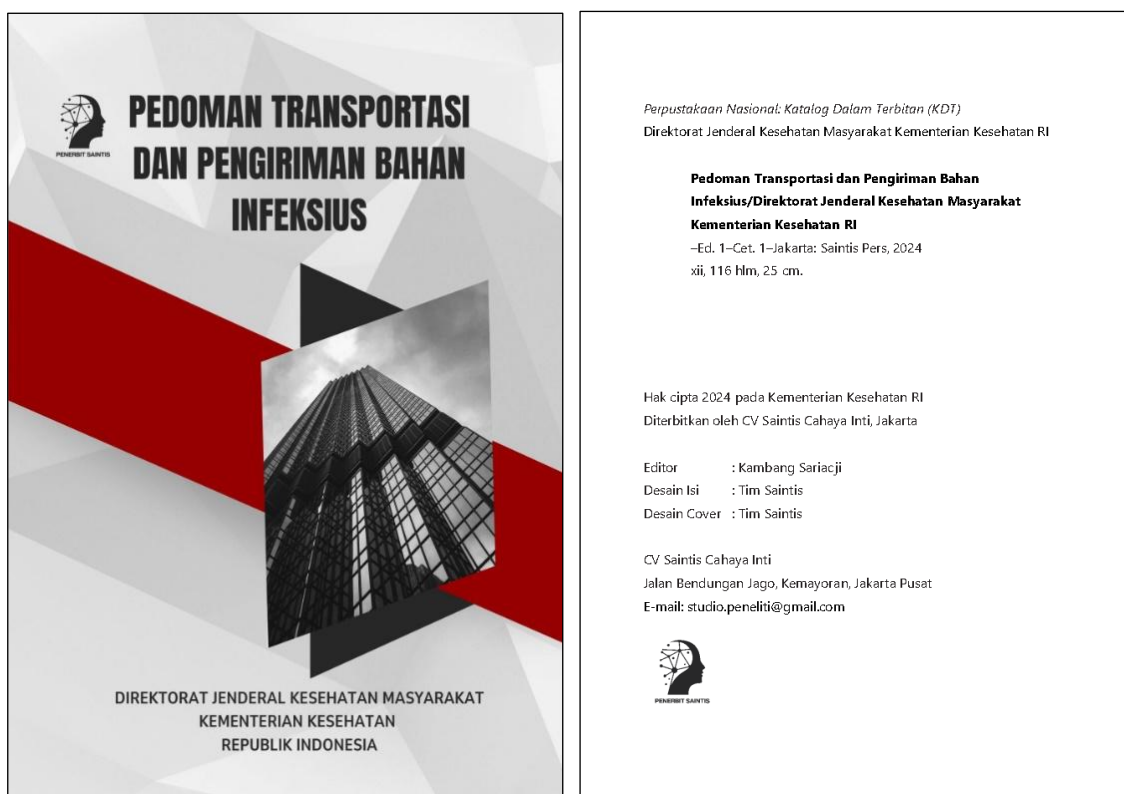
4. Buku Pedoman Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

Buku Pedoman Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius ini menyajikan panduan lengkap mengenai prosedur penanganan dan pengiriman spesimen infeksius secara aman. Pedoman ini menekankan pentingnya prinsip biosafety dan biosecurity, serta menjelaskan langkah-langkah teknis seperti

penggunaan pengepakan tiga lapis (*triple packaging*) dalam transportasi bahan infeksius sesuai dengan standar internasional.

Selain itu, buku ini mengulas berbagai regulasi nasional dan internasional yang wajib dipatuhi guna menjamin keamanan bahan infeksius selama proses pengiriman. Faktor kondisi di lapangan juga turut diperhitungkan dalam menjaga keamanan selama transportasi dan distribusi bahan berbahaya tersebut.

Dengan pembahasan mendalam tentang prosedur, tantangan, dan solusi dalam pengiriman bahan infeksius, buku ini menjadi sumber referensi penting bagi para profesional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bahan infeksius, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.



Gambar 3.83. Buku Pedoman Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

5. Buku Panduan Instruksi Kerja Pemeriksaan Laboratorium Virus Influenza

Buku "Pemeriksaan Laboratorium Influenza untuk Labkesmas" ini disusun sebagai panduan menyeluruh bagi petugas laboratorium dalam melakukan pemeriksaan influenza di Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Buku ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Menyediakan Pedoman Teknis: Menghadirkan prosedur operasional standar (SOP) yang rinci dan sistematis untuk berbagai jenis pemeriksaan laboratorium influenza, mencakup pengambilan spesimen, pemrosesan sampel, hingga interpretasi hasil.

2. Meningkatkan Kapasitas Diagnostik: Memperkuat kemampuan laboratorium dalam mendiagnosis influenza melalui informasi terbaru mengenai teknik dan teknologi pemeriksaan, serta panduan dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.
3. Penatalaksanaan Ekstraksi RNA dan Pemeriksaan RT-PCR: Menjelaskan teknik ekstraksi RNA serta metode diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi virus influenza melalui RT-PCR di laboratorium tingkat 2 hingga 5.
4. Penatalaksanaan Whole Genome Sequencing: Memberikan panduan dalam melakukan sekuensing genom virus influenza di laboratorium tingkat 4 dan 5.
5. Penatalaksanaan Kultur Virus Influenza: Menyediakan petunjuk dalam melakukan kultur virus influenza yang hanya dapat dilakukan di laboratorium tingkat 5.

Dengan adanya buku ini, diharapkan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di seluruh Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mendeteksi dan mengendalikan influenza. Selain itu, pedoman ini bertujuan untuk mendukung upaya nasional dan global dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman influenza.



Gambar 3.84. Buku Panduan Instruksi Kerja Pemeriksaan Laboratorium Virus Influenza

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun Semester I Anggaran 2025 Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan prinsip *Good Governance*. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang tahun untuk mencapai sasaran dan target indikator yang telah ditetapkan.

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan selama Semester I tahun anggaran 2025, antara lain:

- 1) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai bahkan beberapa indikator melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan rincian lengkapnya, sebagai berikut:
 - a) Capaian IKK jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi (41,67%) dari target 12 rekomendasi;
 - b) Capaian IKK jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel sebanyak 10.189 (101,89%) dari target sebanyak 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel;
 - c) Capaian IKK persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas tercapai 100%;
 - d) Capaian IKK mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sebanyak 21 kali (1050%) dari target 2 kali;
 - e) Capaian IKK jumlah MoU/ PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional sebanyak 6 MoU/PKS/Laporan (120%) dari target 5 MoU/PKS/Laporan;
 - f) Capaian IKK Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository tercapai 100%;
 - g) Capaian IKK Persentase Realisasi Anggaran tercapai sebesar 96% (50,37%) dari target 96%;
 - h) Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran tercapai sebesar 49,19 NKA (61,41%) dari target sebesar 80,1 NKA; dan
 - i) Capaian IKK Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi tercapai 98% (122,50%) dari target 80%.

- 2) Dari hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, dapat diartikan bahwa Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah berperan aktif dalam hal-hal, sebagai berikut:
- a) Melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan specimen klinis yang mencapai 10.189 spesimen jauh melebihi target awal sebanyak 10.000 spesimen
 - b) Berkontribusi dalam Sistem Kesehatan Nasional melalui surveilans laboratorium, rekomendasi kebijakan, dan bimbingan teknis di berbagai wilayah;
 - c) Berkomitmen terhadap standar mutu laboratorium melalui sistem pengelolaan biorepository yang telah mencapai 100% standar minimal sehingga mendukung surveilans berbasis laboratorium yang lebih efisien serta keberhasilannya dalam melakukan 21 kali PME yang jauh melampaui target sebanyak 2 kali;
 - d) Penguatan jejaring dan kerjasama karena telah melakukan kerja sama dengan berbagai Lembaga nasional maupun internasional melalui penandatanganan 6 dokumen kerja sama (MoU/PKS);
 - e) Pengembangan kompetensi SDM yang menunjukkan keberhasilan dalam pelatihan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi; dan
 - f) Efisiensi dan transparansi anggaran dengan capaian realisasi sebesar 50,37% serta NKA yang mencapai 49,19 NKA.

4.2. Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang dihasilkan berdasarkan kesimpulan di atas, antara lain:

- 1) Perencanaan anggaran yang lebih terstruktur diperlukan untuk menghindari perubahan anggaran yang kerap terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, stabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat terjaga;
- 2) Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan perlu melakukan inovasi dan terobosan guna memastikan kegiatan berjalan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan sebagai bahan perbaikan rencana kerja tahun berjalan, dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dalam proses tersebut;
- 3) Memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan, rumah sakit, dan jejaring laboratorium daerah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dengan mengoptimalkan penggunaan data hasil pemeriksaan laboratorium untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan tepat waktu;

- 4) Mempertahankan pencapaian yang sudah melampaui target dengan mengikutsertakan lebih banyak parameter pengujian dalam PME;
- 5) Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan sistem kerja untuk mendukung pelayanan laboratorium yang berkelanjutan; dan
- 6) Mempertahankan tingkat pelatihan SDM yang tinggi dengan memperluas materi pelatihan pada bidang bioteknologi, bioinformatika, dan pengendalian penyakit serta mengembangkan program sertifikasi kompetensi teknis yang diakui secara nasional maupun internasional.

Laporan ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Kendala dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan anggaran selama tahun 2025, sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan ke depannya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menghasilkan kinerja yang berkualitas.

LAMPIRAN

**Lampiran yang terdapat di dalam Laporan Kinerja Balai Besar
Laboratorium Biologi Kesehatan TA 2025, antara lain:**

1. Perjanjian Kinerja BBLBK TA 2025 awal;
2. Daftar Pegawai BBLBK pertanggal 31 Juni 2025; dan
3. Berita acara reviu internal Laporan Kinerja BBLBK TA 2025.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) SEMESTER I
TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Awal Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Darmawali Handoko, M.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Maria Endang Sumiwi, MPH
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat,

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Pihak Pertama,
Kepala Balai Besar Laboratorium
Biologi Kesehatan,

dr. Darmawali Handoko, M.Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Sasaran Strategis (8): Menguatnya surveilan yang adekuat		
I	Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program: Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium		
1	Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar 2. Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinis dan lingkungan sesuai standar 3. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	
2	Sasaran Kegiatan UPT: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan 2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel 3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas 4. Mengikuti dan lulus Pemanapan Mutu Eksternal (PME) 5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/atau internasional 6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	12 Rekomendasi 10.000 Spesimen Klinis dan/atau Sampel 100 % 2 Kali 5 MoU/PKS/ Laporan 100 %

Halaman 1 dari 2

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
B	Sasaran Strategis (17): Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik		
	Program: Dukungan Manajemen		
II	Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan		
2.	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran 2. Nilai Kinerja Anggaran 3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi	96 % 80,1 NKA 80 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 35.548.806.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Rp. 9.961.256.000,-
Total Anggaran DIPA Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan	Rp. 45.510.062.000,-

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat,

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Pihak Pertama,
Kepala Balai Besar Laboratorium
Biologi Kesehatan,

dr. Darmawali Handoko, M.Epid

Halaman 2 dari 2



BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
JL. PERCETAKAN II, NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560